



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Polisi Militer No.2 Telp. (0380) 833462 (0380) 838447 - Fax (0380) 832975, Kupang



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai dokumen tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah pusat ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 - d. BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
 - f. BAB VI rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - h. BAB VIII penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Pasal 5

- (1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2023.
- (2) Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2023 dengan rencana kerja PD.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2023 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

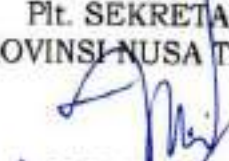
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2022

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2022

 **Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

 **JOHANNA E. LISAPALY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 075

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :75 TAHUN 2022

TANGGAL :30 Juni 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.1 Maksud	I-9
1.4.2 Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif	II-1
2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana	II-2
2.1.1.2 Demografi Wilayah	II-4
2.1.2 Potensi Perkembangan Wilayah	II-5
2.1.2.1 Kawasan Lindung	II-5
2.1.2.2 Kawasan Budidaya	II-7
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-8
2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB	II-8
2.1.3.2 Laju Inflasi	II-11
2.1.3.3 PDRB Per Kapita	II-13
2.1.3.4 Indeks Gini (Gini Ratio)	II-14
2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia	II-14
2.1.3.6 Pengeluaran per Kapita	II-16
2.1.3.7 Umur Harapan Hidup	II-17
2.1.3.8 Angka Kemiskinan	II-18
2.1.3.9 Presentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	II-20
2.1.3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-21
2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	II-22
2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan	II-22
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-23
2.1.4.1 Pendidikan	II-23
2.1.4.2 Kesehatan	II-27
2.1.4.3 Pekerjaan Umum	II-29
2.1.4.4 Perhubungan	II-35

2.1.4.5 Energi Sumber Daya	II-36
2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II-37
2.1.4.7 Penanaman Modal	II-38
2.1.4.8 Sosial.....	II-39
2.1.4.9 Pertanian	II-41
2.1.4.10 Kehutanan.....	II-47
2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan.....	II-48
2.1.4.12 Peternakan	II-51
2.1.4.13 Pariwisata.....	II-54
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah	II-56
2.1.5.1 Ekonomi Makro Regional	II-56
2.1.5.2 Keuangan Pemerintah Daerah	II-56
2.1.5.3 Perkembangan Inflasi	II-56
2.1.5.4 Stabilitas Sistem Keuangan Daerah	II-57
2.1.5.5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah	II-57
2.1.5.6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	II-57
2.1.5.7 Prospek Perekonomian Daerah	II-57
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi P-RPJMD ..	II-58
2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021	II-58
2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing- masing Perangkat Daerah	II-60
2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-93
2.2.3.1 Urusan Pendidikan	II-93
2.2.3.2 Urusan Kesehatan	II-96
2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	II-114
2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	II-121
2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	II-125
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-131
2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-131
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-134
2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-134
2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum.....	II-135
2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-138

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	III-1
3.1.2 Laju Inflasi.....	III-6
3.1.3 Penduduk Miskin.....	III-8
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III-9
3.1.5 Ratio Gini.....	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-10
3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021	III-10
3.2.1.2 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-22
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	
DAERAH	IV-1
4.1 Arahan RPJMN 2020-2024 dan P-RPJMD 2018-2023	IV-1
4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024	IV-1
4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara.....	IV-4
4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023...	IV-8
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-10
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-14
4.3.1 Tema Pembangunan 2023.....	IV-14
4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	IV-14
4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.....	IV-23
4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	IV-26
4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2023	IV-27
4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah	IV-34
4.4 Inovasi Daerah	IV-37
4.4.1 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK).....	IV-40
4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki	IV-43
4.4.3 Pemberdayaan Kelompok Perempuan Bambu....	IV-49
 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN	
/KOTA	V-1
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	V-3

5.2 Penduduk Miskin	V-5
5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	V-8
5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	V-11
5.5 Gini Rasio	V-14
5.6. Fokus Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023	V-16
5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata.....	V-17
5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah	V-
5.6.3 Penanganan Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	V-
 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .	 VI-1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 VII-1
 BAB VIII PENUTUP	 VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021	II-4
Tabel 2.2	Kawasan Lindung di Provinsi NTT	II-6
Tabel 2.3	PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021	II-8
Tabel 2.4	Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT, Tahun 2018-2021	II-9
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018-2021	II-12
Tabel 2.6	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2017-2019	II-12
Tabel 2.7	PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017 – 2020	II-13
Tabel 2.8	Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021	II-14
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT menurut Komponen, Tahun 2015-2021	II-15
Tabel 2.10	Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-16
Tabel 2.11	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021	II-17
Tabel 2.12	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021	II-20
Tabel 2.13	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2021	II-20
Tabel 2.14	Persentase Baduta dan Balita <i>Stunting</i> , <i>Wasting</i> dan <i>Underweight</i> di NTT Tahun 2016-2021.....	II-21
Tabel 2.15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021	II-22
Tabel 2.16	Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020	II-22
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021	II-23
Tabel 2.18	Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	II-24
Tabel 2.19	Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP).....	II-25

Tabel 2.20	Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)	II-26
Tabel 2.21	Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017	II-27
Tabel 2.22	Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTT Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.23	Panjang Jalan Provinsi menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020	II-29
Tabel 2.24	Rekapitulasi Jembatan Provinsi pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020	II-30
Tabel 2.25	Jalan Nasional di Provinsi NTT.....	II-31
Tabel 2.26	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-34
Tabel 2.27	Arus Penumpang yang datang dan berangkat pada Pelabuhan Udara setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-35
Tabel 2.28	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021	II-36
Tabel 2.29	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020	II-37
Tabel 2.30	Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020	II-38
Tabel 2.31	Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.32	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021	II-39
Tabel 2.33	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017	II-40
Tabel 2.34	Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-43
Tabel 2.35	Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021	II-44
Tabel 2.36	Produksi Tanaman Sayuran menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021	II-45
Tabel 2.37	Luas Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota (Hektar) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2020	II-47
Tabel 2.38	Produksi Perikanan Tangkap menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019.....	II-49

Tabel 2.39	Produksi Perikanan Budidaya menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun	II-50
Tabel 2.40	Produksi Rumput Laut Menurut Subsektor dan Kabupaten/ Kota (Ton) Tahun 2015-2017	II-51
Tabel 2.41	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)	II-52
Tabel 2.42	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)	II-53
Tabel 2.43	Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Tahun 2019-2021	II-54
Tabel 2.44	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-55
Tabel 2.45	Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021 ...	II-59
Tabel 2.46	Pemetaan Program NTT Bangkit NTT Sejahtera dengan Permendagri 90 Tahun 2019	II-63
Tabel 2.47	Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021	II-71
Tabel 2.48	Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran P- RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.....	II-76
Tabel 2.49	Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	II-93
Tabel 2.50	Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021	II-94
Tabel 2.51	Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	II-97
Tabel 2.52	Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021	II-98
Tabel 2.53	Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang Tahun Anggaran 2021.....	II-100
Tabel 2.54	Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021	II-106
Tabel 2.55	Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021	II-112
Tabel 2.56	Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	II-115
Tabel 2.57	Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-118
Tabel 2.58	Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	II-122

Tabel 2.59	Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	II-123
Tabel 2.60	Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021	II-125
Tabel 2.61	Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021	II-127
Tabel 2.62	Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021	II-130
Tabel 3.1	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan lapangan usaha	III-3
Tabel 3.2	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan Pengeluaran	III-5
Tabel 3.3	Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas	III-7
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2021	III-11
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021 .	III-12
Tabel 3.7	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021	III-13
Tabel 3.8	Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018-2021	III-14
Tabel 3.9	Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018-2021..	III-14
Tabel 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018-2021	III-15
Tabel 3.11	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT.....	III-17
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT	III-21
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021	III-22
Tabel 3.14	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT.....	III-23
Tabel 4.1	Indikator Makro Pembangunan Nasional	IV-3
Tabel 4.2	Koridor Pembangunan di Provinsi NTT Tahun 2020-2024	IV-7
Tabel 4.3	Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024.....	IV-7
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023	IV-9
Tabel 4.5	Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.6	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	

	Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023	IV-12
Tabel 4.7	Daerah tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara	IV-25
Tabel 4.8	Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT	IV-25
Tabel 4.9	Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023	IV-32
Tabel 4.10	Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.11	Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-39
Tabel 4.12	Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-39
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki	IV-45
Tabel 5.1	Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023	V-4
Tabel 5.2	Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022	V-7
Tabel 5.3	Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	V-9
Tabel 5.4	Angka TPT Kab/Kota se-NTT Tahun 2017-2021	V-10
Tabel 5.5	Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun Rencana 2023	V-12
Tabel 5.6	Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022 ...	V-14
Tabel 5.7	Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023	V-20
Tabel 5.8	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022	V-21
Tabel 5.9	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	V-22
Tabel 5.10	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2022...	V-23
Tabel 5.11	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ngada Tahun 2022..	V-24
Tabel 5.12	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Lembata Tahun 2022	V-25
Tabel 5.13	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Belu Tahun 2022	V-26
Tabel 5.14	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Malaka Tahun 2022	V-27
Tabel 5.15	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ende Tahun 2022 ...	V-28
Tabel 5.16	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Nagekeo Tahun 2022	V-29
Tabel 5.17	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022	V-30
Tabel 5.18	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Tahun 2022	V-31

Tabel 5.19	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022	V-32
Tabel 5.20	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022	V-33
Tabel 5.21	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022	V-34
Tabel 5.22	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	V-35
Tabel 5.23	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	V-36
Tabel 5.24	Lokus Resiko Stunting Kota Kupang Tahun 2022	V-37
Tabel 6.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Pagu Indikatif Perangkat Daerah per Program Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.3	Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	VII-3
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	VII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	I-9
Gambar 2.1	Peta Provinsi NTT	II-1
Gambar 2.2	Peta dan data Bencana di NTT tahun 2021	II-3
Gambar 2.3	IPM NTT tahun 2011-2021	II-15
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provinsi NTT dan Nasional	III-6
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT	III-9
Gambar 4.1	Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional	IV-3
Gambar 4.2	Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	IV-6
Gambar 4.3	Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera	IV-8
Gambar 4.4	Tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	IV-16
Gambar 4.5	Tiga Pilar Ekonomi Inklusif	IV-16
Gambar 4.6	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023.....	IV-17
Gambar 4.7	Strategi Pembangunan Tahun 2023	IV-18
Gambar 4.8	Peta Pembangunan wilayah Nusa Tenggara.....	IV-23
Gambar 4.9	Inovasi Pemda NTT Berdasarkan jenis Inovasi.....	IV-33
Gambar 4.10	Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023	IV-35
Gambar 4.11	Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores	IV-35
Gambar 4.12	Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor dan Alor	IV-35
Gambar 4.13	Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao	IV-36
Gambar 4.12	Pengembangan Pariwisata Estate NTT	IV-36
Gambar 5.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022	V-3
Gambar 5.2	Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021	V-6
Gambar 5.3	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun 2017-2021	V-13

Gambar 5.4	Koefisien Gini NTT Tahun 2015-2020.....	V-16
Gambar 5.5	Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting	V-18
Gambar 5.6	Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulangan Kemiskinan	V-19
Gambar 5.6	Inovasi Konvergensi Stunting di NTT	V-20

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023. RKPD ini disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 sudah lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 mengupayakan untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023 termasuk perubahan aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2023.

RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan.



Dimana, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur yaitu : **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periode keempat ditujukan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia NTT yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif, berdaya saing tinggi, didukung oleh SDM berkualitas. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan yang didukung dengan pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan, peningkatan jaringan infrastruktur, transportasi, meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Selain itu juga untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah yang menjaga keseimbangan lingkungan dibutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan terutama lahan kritis termasuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Visi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018-2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Arah kebijakan periode ke empat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas**.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 sekaligus mengacu pada tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu : **“Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”**, maka target pencapaian tema ini, diarahkan untuk mewujudkan **NTT Bangkit**, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran,



kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, serta 2) mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan **NTT Sejahtera**, yang diukur dari 1) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial

Upaya untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, *top down*, *bottom up*, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah secara sistematis dengan data-data yang akurat. Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada RKP 2023 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dengan telah dilakukannya konsultasi publik dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 masih dihadapkan pada situasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ; *pertama*, ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. *Kedua*, Penanganan dampak pasca Pandemi Covid-19 yang telah membawa keresahan dan dampak nyata pada masalah kesehatan dan berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dalam penanganan pasca pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 sangat diperlukan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);



23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117).

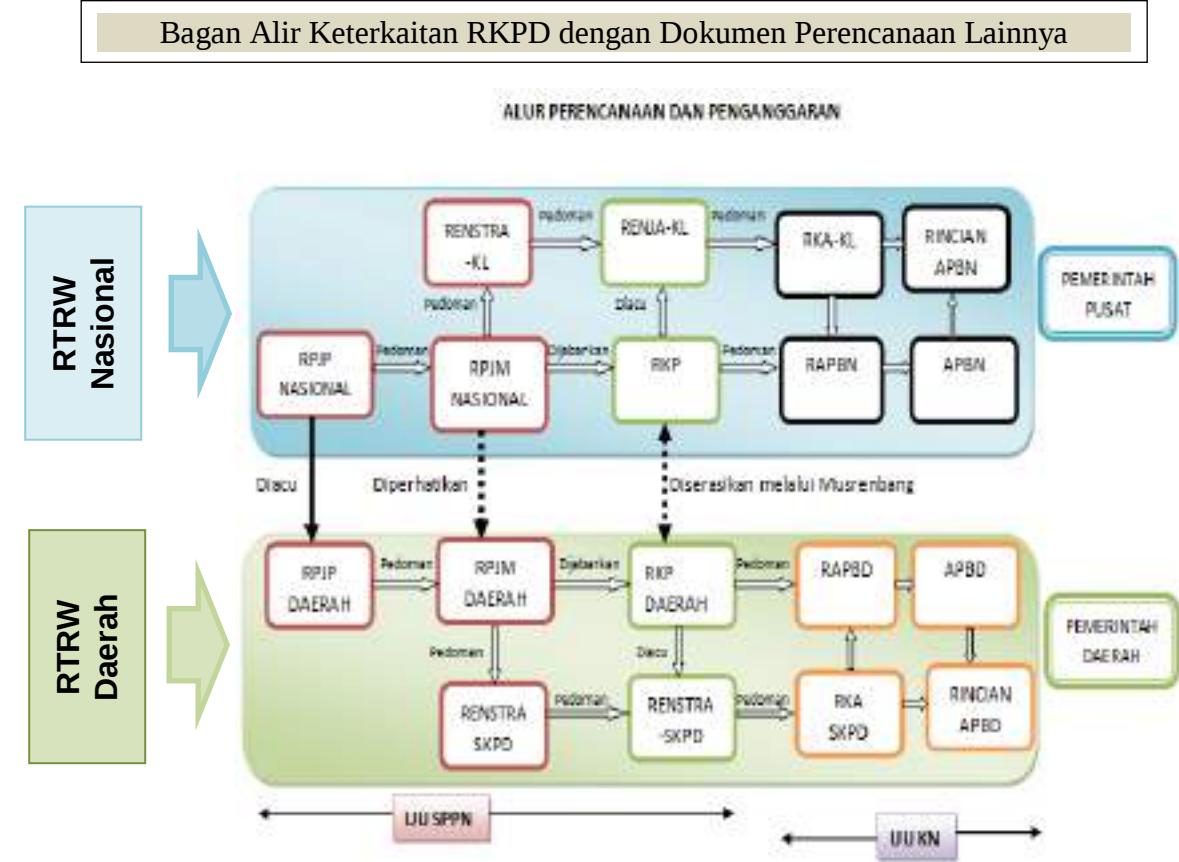
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2023, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2023 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan



dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA. 2023. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan RAPBD TA. 2023;
2. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota;
3. Menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran;
4. Untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat;
5. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.



Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2023.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 untuk mendukung pencapaian target pembangunan provinsi.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2023 sebagai acuan untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH



BAB II GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah darat seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8⁰ – 12⁰ Lintang Selatan dan 118⁰ – 125⁰ Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2021

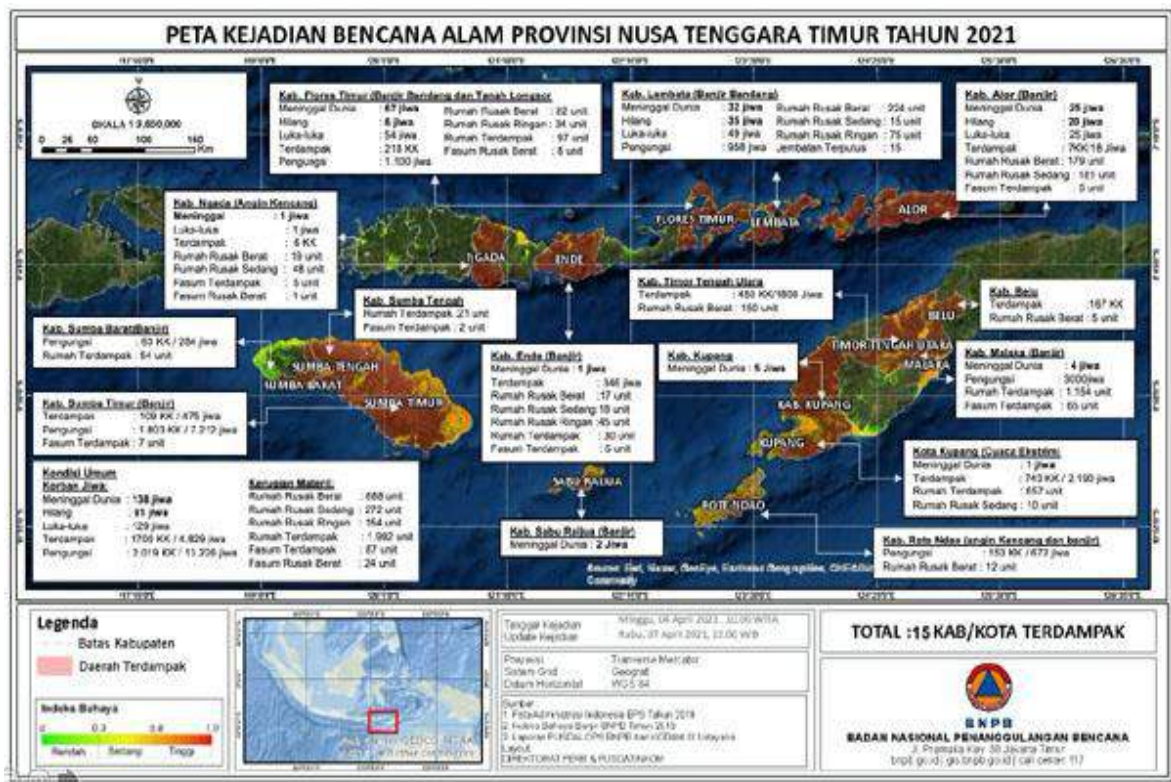
Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana hidrometeorologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometeorologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometeorologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badan Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154.

Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021



Sumber : BNPB, 2021

Bencana hidrometeorologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometeorologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO₂, N₂O dan CH₂. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

- 1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida.
- 2) Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri.
- 3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3.
- 4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun 2021 di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 111 Jiwa/Km² menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km².

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)			
	2018	2019	2020	2021
Kota Kupang	2.351	2.413	2.456	2.511
Sumba Barat Daya	234	239	210	212
Sumba Barat	173	176	197	201

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)			
	2018	2019	2020	2021
Sabu Raijua	205	211	194	197
Sikka	184	185	186	187
Belu	174	176	175	177
Manggarai	174	177	163	164
Flores Timur	145	146	158	160
Malaka	163	165	158	160
Ende	132	132	131	132
Timor Tengah Selatan	118	119	115	116
Nagekeo	102	103	113	115
Rote Ndao	129	134	112	114
Manggarai Timur	113	115	110	111
Lembata	111	113	107	109
Timor Tengah Utara	94	95	97	98
Ngada	94	95	96	97
Manggarai Barat	86	87	82	83
Alor	70	70	72	73
Kupang	70	73	66	67
Sumba Tengah	39	40	47	48
Sumba Timur	36	37	35	35
Nusa Tenggara Timur	112	114	111	112

Sumber : BPS NTT, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1.	Hutan lindung	652.915,78
2.	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274
	b. Sempadan sungai	181.837
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944
3.	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau	276.666,85
4.	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan (*provisioning*): pangan, air bersih, serat (*fiber*), bahan bakar (*fuel*); (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating*): pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (*cultural*): spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space*), rekreasi dan *ecotourism*, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara (*nutrient*), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

- 1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
- 2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semaui dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
- 3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangbua*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;
- 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembangan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh

yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan(*rest area*) eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan tahun 2021, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,5386 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110.886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98.930 miliar.

Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rp)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	29.804	30.370	32.343	17.838	18.496	18.673	19.599
Pertambangan dan Penggalian	1.202	1.250	1.155	1.189	908	939	814	829
Industri Pengolahan	1.253	1.405	1.367	1.312	841	918	867	823
Pengadaan Listrik dan Gas	75	76	85	91	52	52	58	61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54	57	60	68	43	45	48	53
Konstruksi	10.745	11.606	10.454	11.485	7.255	7.576	6.832	7.311
Perdagangan Besar dan Eceran;	11.025	12.266	11.888	12.724	7.785	8.380	7.880	8.217



Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rp)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor								
Transportasi dan Pergudangan	5.459	5.834	4.917	5.058	3.528	3.646	3.203	3.282
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	757	806	594	613	493	522	382	400
Informasi dan Komunikasi	6.570	7.078	7.923	8.222	5.794	6.118	6.850	7.041
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.072	4.307	4.639	4.947	2.589	2.672	2.901	2.976
Real Estate	2.475	2.480	2.426	2.467	1.658	1.658	1.632	1.681
Jasa Perusahaan	292	306	191	165	175	182	110	94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.232	14.573	15.191	14.866	8.483	9.175	9.603	9.268
Jasa Pendidikan	9.436	10.246	10.737	10.598	5.572	5.913	6.025	5.890
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.151	2.328	2.560	2.864	1.480	1.564	1.633	1.780
Jasa lainnya	2.098	2.267	1.946	1.870	1.434	1.528	1.294	1.233
PDRB	98.930	106.728	106.506	110.886	65.929	69.389	68.810	70.538

Sumber : BPS NTT, 2022; * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2021

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51	29,17
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08	1,07
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28	1,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82	10,36
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16	11,48
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62	4,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56	0,55
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36	4,46



Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**
Real Estate	2,50	2,32	2,28	2,23
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26	13,41
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08	9,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40	2,58
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83	1,69
PDRB	100	100	100	100

Sumber : BPS NTT, 2021 ; * Angka Sementara , ** Angka Sangat Sementara.

Pada tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 29,17% (19.599 triliun), terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 70.538 Triliun (ADHK). Sektor terbesar kedua dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 13,41%. Sedangkan sektor ekonomi dengan share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06% disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019			
	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,94	3,69	1,00	4,92
Pertambangan dan Penggalian	1,94	3,32	-13,33	1,90
Industri Pengolahan	5,16	9,01	-5,42	-5,10
Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	0,82	12,29	4,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,44	6,04	11,34
Konstruksi	6,39	4,43	-9,82	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,66	-5,98	4,27
Transportasi dan Pergudangan	7,93	3,34	-12,16	2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	6,43	-27,22	4,79
Informasi dan Komunikasi	4,89	5,59	11,96	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,22	8,57	2,56

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019			
	2018	2019	2020*	2021**
Real Estate	4,85	0,00	-1,54	2,97
Jasa Perusahaan	1,67	3,86	-39,27	-14,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,56	8,17	4,67	-3,45
Jasa Pendidikan	2,41	6,12	1,89	-2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	5,67	4,38	9,02
Jasa lainnya	6,47	6,55	-15,30	-4,74
PDRB	5,11	5,24	-0,83	2,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022 ; * Angka Sementara ; ** Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik menjadi Rp. 70.538 miliar pada tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen.

2.1.3.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, & tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100) Tahun 2018–2021

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Inflasi (%)		
					Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020	Tingkat Inflasi tahun Kalender 2021
Makanan, Minuman, dan Tembakau	144,17	104,21	105,09	105,44	3,68	2,10	0,20
Pakaian dan Alas Kaki	-	104,32	105,37		-	0,98	0,19
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,04	102,48	102,84		1,66	0,32	0,07
Sandang	122,18	104,73	105,81		4,87	0,95	0,26
Kesehatan	129,04	104,86	107,79		3,16	2,60	0,18
Transportasi	-	103,89	103,01		-	-1,30	0,00
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	100,42	100,07		-	-0,34	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-	103,15	103,90		-	0,74	0,20
Pendidikan	-	106,21	107,70		-	1,40	0,01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	125,65	-	107,60		3,30	-	0,21
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	133,78	-	112,08		-0,40	-	0,29
Penyediaan Makanan dan Minuman/Rest oran	-	105,22	-		-	1,99	-
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	105,94	-		-	6,11	-
Nusa Tenggara Timur	134,7	135,59	-		0,80	0,78	-
Nasional	135,39	131,28	105,68		2,72	1,68	0,13

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021

Dari tabel 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terlihat bahwa angka inflsi mengalami penurunan.

Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar 2,72% jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,68% dan tahun 2021 sebesar 0,13%.

2.1.3.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020

U r a i a n	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)				
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,67
PDRB perkapita (Ribu Rp)				

Uraian	2017	2018	2019	2020
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220.097
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416.851
Pertumbuhan				
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-2,34
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021

2.1.3.4 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa “kecenderungan ketimpangan” tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	0,355	0,356	0,339

Sumber : BPS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

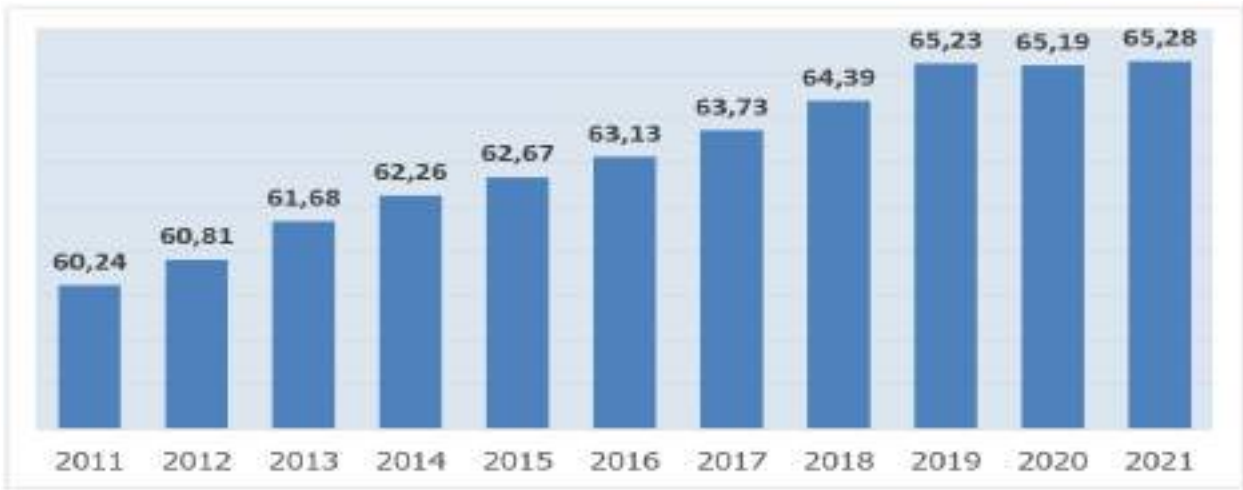
2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

Indikator komponen IPM diperoleh dari pengukuran perbandingan dari Angka Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan Konsumsi per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup yaitu angkaperkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia 15 tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Gambar 2.3 IPM NTT tahun 2011-2021



IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2017 sebesar 63,73 menjadi 65,28 tahun 2021,tumbuh 0,14 persen (meningkat 0,09 poin) dibandingkan capaian tahun2020.Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal. Pada tahun 2017 IPM NTT 63,73 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 70,81 pada tahun 2021 IPM NTT 65,28, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 72,29. (BPS, Provinsi NTT dalam Angka 2022)

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (thn)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15
Harapan Lama Sekolah (HLS) (thn)	12,84	12,97	13,07	13,10	13,15	13,18	13,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (thn)	6,93	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63	7,69
Pengeluaran per Kapita (PPP)(Rp.000)	7,003	7,122	7,350	7,566	7,769	7,598	7.554
IPM NTT	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28
IPM Rata-rata Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS NTT, 2022

2.1.3.6 **Pengeluaran per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,769 juta menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 7,598 juta dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta.

Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	[MetodeBaru] Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	7586.00	7321.00	7307.00
Sumba Timur	9640.00	9406.00	9354.00
Kupang	7698.00	7526.00	7476.00
Timor Tengah Selatan	6955.00	6861.00	6839.00
Timor Tengah Utara	6479.00	6364.00	6324.00
Belu	7677.00	7479.00	7431.00
Alor	6958.00	6786.00	6751.00
Lembata	7474.00	7305.00	7257.00
Flores Timur	7770.00	7631.00	7578.00
Sikka	8313.00	8081.00	8021.00
Ende	9315.00	9094.00	9027.00
Ngada	8961.00	8865.00	8819.00
Manggarai	7276.00	7203.00	7133.00
Rote Ndao	6720.00	6539.00	6503.00
Manggarai Barat	7602.00	7468.00	7410.00
Sumba Tengah	6198.00	6108.00	6061.00
Sumba Barat Daya	6594.00	6372.00	6355.00
Nagekeo	8469.00	8309.00	8254.00
Manggarai Timur	5919.00	5818.00	5780.00
Sabu Raijua	5354.00	5265.00	5256.00
Malaka	5998.00	5901.00	5861.00
Kota Kupang	13592.00	13337.00	13218.00
Nusa Tenggara Timur	7769.00	7598.00	7554.00

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.7 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2020 angka usia harapan hidup sebesar 67,01 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Tahun 2021 angka umur harapan hidup sebesar 67,15 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	66,11	66,15	66,20	66,58	66,98	67,08	67,12
Sumba Timur	63,88	64,00	64,12	64,45	64,94	65,13	65,16
Kupang	63,17	63,33	63,49	63,86	64,39	64,63	64,91
Timor Tengah Selatan	65,55	65,60	65,65	65,91	66,32	66,42	66,46
Timor Tengah Utara	66,09	66,14	66,19	66,45	66,86	66,96	67,09
Belu	63,01	63,21	63,42	63,81	64,35	64,61	64,89
Alor	60,23	60,35	60,47	60,8	61,29	61,48	61,64
Lembata	65,85	66,02	66,19	66,57	66,97	67,07	67,20
Flores Timur	63,28	64,36	64,45	64,7	65,10	65,20	65,31
Sikka	66,10	66,20	66,30	66,61	67,07	67,24	67,45
Ende	64,37	64,42	64,48	64,75	65,17	65,29	65,43
Ngada	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04	68,12
Manggarai	64,48	65,66	65,84	66,23	66,77	67,03	67,11
Rote Ndao	62,86	63,13	63,41	63,8	64,34	64,60	64,88
Manggarai Barat	65,98	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38	67,46
Sumba Tengah	67,65	67,73	67,74	67,96	68,32	68,38	68,42
Sumba Barat Daya	67,08	67,71	67,76	68,02	68,43	68,53	68,57
Nagekeo	66,25	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13	67,25
Manggarai Timur	67,27	67,39	67,40	67,62	67,98	68,04	68,07
Sabu Raijua	58,38	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64	60,66
Malaka	64,15	64,27	64,29	64,52	64,89	64,97	65,01
Kota Kupang	68,34	68,46	68,58	68,9	69,37	69,55	69,73
Nusa Tenggara Timur	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.8 Angka Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun 2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa. Sedangkan, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21 persen. Pada tahun 2021 Penduduk miskin berjumlah 1.169,31 ribu orang

Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 20,44 persen, menurun 0,55 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,77 persen poin terhadap September 2020.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, menurun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 27,3 ribu orang terhadap September 2020.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,57 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 25,08 persen, turun menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak

24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen).

Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumahtangga miskin/bulan.

Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTT turun dari 4,16 pada September 2020 menjadi 3,96 pada Maret 2021.

Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Indeks Keparahannya Kemiskinan juga turun dari 1,24 menjadi 1,05 pada periode September 2020 sampai Maret 2021.

Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021

Indikator	Angka Kemiskinan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53	1.169.31
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343,396	354,898	373,922	403,055	415.116
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15	4,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24	1,44
Persentase Penduduk Miskin NTT	22.58	22,01	21.38	20,62	21,21	20.99
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10.70	10.12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase gizi buruk (%)	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87	1,9	2,5	5,1	2,4
Persentase gizi kurang (%)	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84	6,3	6,9	23,1	17,5

Sumber : SIPD Provinsi NTT, Laporan e-PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes prov NTT Februari 2021)

Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor

Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2021

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun						Indonesia
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017
Baduta	Stunting	32.1	29.8	26.5	22.3	17.1	15.8	20.1
	Wasting	17.5	17.9	7.9	9.4	7.6	7.7	12.8
	Underweight	23.0	22.8	12.6	9.4	13	13.6	14.8
Balita	Stunting	38,7	40,3	35.4	30.0	24.2	22.0	29.6
	Wasting	17.4	15.8	8.3	9.4	7.5	8.0	9.5
	Underweight	28.2	28.3	19.6	19.9	18	18.3	17.8

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021

2.1.3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT padapada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan NusaTenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.

2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0	78,6	69,0	69,2	67,9

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 95,08 tahun 2020 menjadi 95,25 dan APS tahun 2021 sebesar 95,32 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	95.31	96.14	96.28
Sumba Timur	92.23	92.30	92.72
Kupang	95.57	95.23	95.36
Timor Tengah Selatan	92.74	92.61	93.03
Timor Tengah Utara	96.58	97.99	97.60
Belu	92.68	92.43	92.57
Alor	93.45	93.33	93.75
Lembata	93.53	93.90	94.09
Flores Timur	92.37	92.75	92.32
Sikka	93.85	93.06	93.30
Ende	95.16	94.83	95.03
Ngada	97.10	96.91	97.32
Manggarai	96.97	97.01	96.98
Rote Ndao	93.57	94.14	94.37
Manggarai Barat	94.52	95.37	95.38
Sumba Tengah	95.64	95.95	95.82
Sumba Barat Daya	95.25	95.33	95.72
Nagekeo	94.71	95.35	95.02
Manggarai Timur	98.14	99.03	98.66
Sabu Raijua	95.82	95.84	95.89
Malaka	96.81	96.92	96.68
Kota Kupang	98.76	98.64	98.70
Nusa Tenggara Timur	95.08	95.25	95.32

Sumber: BPS, Tahun 2022

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Rasio Guru/Murid

Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan tersebut.

Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	8	8	8	5174	5372	5572	255	277	280	20	19	20
Sumba Timur	21	21	21	10865	11088	11536	573	624	673	19	18	17
Kupang	57	58	58	13617	14359	15561	1194	1218	1287	11	12	12
Timor Tengah Selatan	36	37	43	13349	14095	15872	798	849	970	17	17	16
Timor Tengah Utara	29	30	30	8577	8992	9670	692	709	728	12	13	13
Belu	22	24	25	7808	8579	9318	585	645	626	13	13	15
Alor	34	35	35	6605	6721	7176	672	681	772	10	10	9
Lembata	13	15	15	3746	3883	4307	295	309	303	13	13	14
Flores Timur	23	23	23	7516	7714	8076	583	630	630	13	12	13
Sikka	20	22	23	9351	9305	9809	575	620	655	16	15	15
Ende	21	21	21	7740	7713	8062	651	650	633	12	12	13
Ngada	13	13	13	5646	5808	6039	367	384	389	15	15	16
Manggarai	26	26	26	14724	14288	14819	797	817	826	18	17	18
Rote Ndao	10	12	13	5023	5409	6010	328	346	377	15	16	16
Manggarai Barat	25	27	27	8539	8831	8981	586	627	654	15	14	14
Sumba Tengah	4	4	4	1717	2390	2610	137	142	138	13	17	19
Sumba Barat Daya	21	23	26	8954	9652	10880	471	543	597	19	18	18
Nagekeo	11	15	15	4610	5039	5486	363	412	417	13	12	13
Manggarai Timur	47	47	47	10549	10659	10611	884	904	977	12	12	11
Sabu Raijua	7	7	7	3714	3989	4531	216	222	222	17	18	20
Malaka	25	31	32	7246	7921	8994	614	659	722	12	12	12
Kota Kupang	36	39	41	16058	16446	16314	1145	1188	1208	14	14	14
Nusa Tenggara Timur	509	538	553	181128	188253	200234	12781	13456	14084	14	14	14

Sumber: BPS, Tahun 2022

Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	40	40	40	9696	9600	9749	630	643	691	15	15	14
Sumba Timur	74	75	75	15726	16406	17256	936	949	1010	17	17	17
Kupang	156	164	169	22365	22697	23106	1986	1990	2120	11	11	11
Timor Tengah Selatan	145	146	174	31375	32022	33561	1881	1936	2261	17	17	15
Timor Tengah Utara	91	92	93	17048	17342	17856	1328	1338	1487	13	13	12
Belu	46	47	52	13861	14044	14297	871	938	1023	16	15	14
Alor	105	108	109	11593	11825	12563	1279	1344	1463	9	9	9
Lembata	51	51	51	7081	7380	7806	635	684	820	11	11	10
Flores Timur	62	63	63	14169	14164	14398	1013	1017	1158	14	14	12
Sikka	79	81	85	17437	17717	18507	1157	1184	1326	15	15	14
Ende	88	89	89	14848	15013	15468	1242	1227	1260	12	12	12
Ngada	60	61	61	10581	10603	10450	740	769	820	14	14	13
Manggarai	68	70	76	24355	24330	25013	1181	1147	1330	21	21	19
Rote Ndao	36	42	43	9042	9376	9659	631	687	705	14	14	14
Manggarai Barat	88	88	93	18082	18166	19237	1352	1433	1716	13	13	11
Sumba Tengah	33	33	34	5493	5564	5800	495	490	576	11	11	10
Sumba Barat Daya	97	97	102	24579	25091	27165	1311	1342	1541	19	19	18
Nagekeo	56	56	56	8734	8738	9021	770	781	835	11	11	11
Manggarai Timur	134	136	137	20371	20506	20820	1520	1523	1663	13	13	13
Sabu Raijua	24	24	24	6216	6559	6737	408	421	559	15	16	12
Malaka	59	59	59	12925	12577	13081	973	933	1059	13	13	12
Kota Kupang	52	53	56	21888	22160	22502	1400	1439	1470	16	15	15
Nusa Tenggara Timur	1644	1675	1741	337465	341880	354052	23739	24215	26893	14	14	13

Sumber: BPS, Tahun 2022



Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	63	63	63	13939	13257	12638	742	687	731	19	19	17
Sumba Timur	192	192	192	26880	26073	25470	1946	1842	1967	14	14	13
Kupang	284	288	288	37863	36121	35004	2813	2751	2933	13	13	12
Timor Tengah Selatan	357	358	390	56727	54329	52200	3568	3469	3832	16	16	14
Timor Tengah Utara	149	150	158	20064	19165	18976	1491	1419	1529	13	14	12
Belu	92	92	92	17380	16591	15946	1257	1217	1280	14	14	12
Alor	190	192	194	17518	16891	16831	1477	1495	1720	12	11	10
Lembata	101	101	101	11390	11318	11184	915	902	1005	12	13	11
Flores Timur	152	152	152	18032	17694	17589	1443	1413	1539	13	13	11
Sikka	190	190	190	23865	23148	22742	1715	1700	1830	14	14	12
Ende	177	177	177	18498	18011	17475	1593	1588	1716	12	11	10
Ngada	111	113	113	13150	12443	12022	926	927	1024	14	13	12
Manggarai	156	160	162	29637	28825	27689	1471	1435	1620	20	20	17
Rote Ndao	121	121	122	18016	17608	17073	1184	1190	1242	15	15	14
Manggarai Barat	173	173	174	25068	23417	21961	1695	1716	1917	15	14	11
Sumba Tengah	49	49	49	6875	6564	6228	558	536	584	12	12	11
Sumba Barat Daya	134	138	141	40051	38308	36630	1504	1452	1509	27	26	24
Nagekeo	100	100	100	10536	10379	10087	896	923	951	12	11	11
Manggarai Timur	227	226	227	27904	26256	25367	1859	1826	1997	15	14	13
Sabu Raijua	49	49	49	8557	8406	8146	494	504	581	17	17	14
Malaka	121	119	121	15695	14674	14086	1233	1177	1282	13	12	11
Kota Kupang	84	84	84	28586	28211	28365	1549	1541	1635	18	18	17
Nusa Tenggara Timur	3272	3287	3339	486231	467689	453709	32329	31710	34424	15	15	13

Sumber: BPS, Tahun 2022

2.1.4.2 Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2017 terdapat 50 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017

Wilayah	Jumlah Fasilitas Kesehatan									
	Rumah Sakit Bersalin		Puskesmas		Posyandu		Polindes		Rumah Sakit	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sumba Barat	-	-	9	9	219	244	-	31	2	2
Sumba Timur	-	-	22	22	560	558	72	72	3	3
Kupang	-	-	26	26	710	734	13	10	1	1
Timor Tengah Selatan	1	-	35	35	788	824	60	66	1	2
Timor Tengah Utara	-	-	26	26	508	498	139	144	2	3
Belu	-	-	17	17	419	419	41	40	4	4
Alor	-	-	24	26	433	433	40	39	2	2
Lembata	-	-	9	9	318	316	-	58	3	3
Flores Timur	-	-	20	21	555	553	80	73	1	1
Sikka	-	-	23	23	625	632	120	120	3	3
Ende	-	-	24	24	635	641	86	26	2	2
Ngada	-	-	14	14	344	348	42	43	1	1
Manggarai	-	-	21	21	575	577	20	23	2	2
Rote Ndao	-	-	12	12	374	374	-	7	1	1
Manggarai Barat	-	-	18	18	455	460	18	18	2	2
Sumba Tengah	-	-	8	8	186	186	-	29	1	1
Sumba Barat Daya	-	-	12	14	465	463	57	54	1	1
Nagekeo	-	-	7	7	261	268	47	48	-	1
Manggarai Timur	-	-	23	25	559	559	20	17	-	-
Sabu Raijua	-	-	6	6	211	232	-	4	1	1
Malaka	-	-	17	20	520	419	50	37	1	1
Kota Kupang	-	1	11	11	313	315	39	-	12	13
Nusa Tenggara Timur	1	1	384	394	10033	10053	944	959	46	50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.22. berikut ini:

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)														
	Tenaga Medis			Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan			Tenaga Kefarmasian			Tenaga Kesehatan Lainnya		
	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021
Sumba Barat	60	43	32	312	318	381	58	78	122	18	22	18	47	21	32
Sumba Timur	23	65	58	404	571	637	190	292	348	22	17	38	-	22	40
Kupang	13	43	49	169	268	474	293	201	675	20	34	55	-	33	79
Timor Tengah Selatan	61	54	68	205	227	528	199	319	596	29	26	59	-	44	87
Timor Tengah Utara	39	76	54	306	394	506	304	306	612	66	63	80	-	43	73
Belu	56	86	49	555	700	493	263	197	255	60	64	50	-	47	48
Alor	18	42	81	596	292	666	394	231	497	35	54	91	-	21	88
Lembata	26	30	28	318	289	251	278	263	322	11	35	39	-	30	37
Flores Timur	37	35	54	366	458	700	310	350	693	50	46	71	-	29	59
Sikka	13	99	51	300	463	692	325	364	587	42	52	62	-	38	54
Ende	26	58	39	416	463	789	292	297	711	36	44	77	-	18	53
Ngada	20	44	55	247	226	570	110	103	486	30	36	59	-	11	45
Manggarai	17	71	45	691	790	880	596	649	904	53	43	84	-	45	72
Rote Ndao	15	20	51	107	63	264	92	89	245	24	24	37	-	12	45
Manggarai Barat	28	38	46	320	380	562	236	286	537	30	36	53	-	41	73
Sumba Tengah	17	19	20	219	256	267	9	118	128	14	44	12	-	18	21
Sumba Barat Daya	34	46	11	382	440	76	132	60	26	25	19	8	-	15	5
Nagekeo	20	27	34	257	242	306	232	218	359	28	21	29	-	11	29
Manggarai Timur	9	9	28	683	822	875	273	694	783	27	41	60	-	41	80
Sabu Raijua	9	20	19	123	161	201	127	144	186	5	11	24	-	15	37
Malaka	41	53	48	329	378	353	274	302	289	69	49	41	-	44	48
Kota Kupang	44	469	123	291	1280	775	189	522	381	33	73	122	-	67	80
Nusa Tenggara Timur	626	1447	1043	7596	9481	11246	5176	6083	9742	727	854	1169	47	666	1185

Sumber: BPS, Tahun 2022



2.1.4.3 Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Sampai dengan tahun 2020, Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) sebagaimana Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sumba Barat	58.72	50.00	61.24	2.47	10.26	10.26	2.00	2.53	2.53	24.08	24.91	13.67
Sumba Timur	99.31	111.16	10.96	32.80	19.09	28.47	20.00	14.37	10.37	121.84	129.73	125.88
Kupang	160.97	164.37	21.00	23.41	11.21	11.21	55.00	45.60	38.90	108.22	126.33	87.37
Timor Tengah Selatan	165.18	172.56	174.71	5.70	4.50	4.50	6.00	5.85	3.65	118.23	111.85	111.90
Timor Tengah Utara	128.56	124.36	124.36	3.20	7.40	7.40	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60
Belu	56.52	54.72	54.72	5.90	7.70	7.70	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
Alor	31.86	27.79	37.52	9.20	8.73	12.34	35.00	25.68	32.64	47.66	61.62	41.33
Lembata	18.26	22.30	37.28	4.36	0.00	0.00	-	0.00	0.00	16.38	16.70	1.72
Flores Timur	89.54	104.39	102.91	15.31	4.65	54.00	10.00	11.00	10.90	34.74	29.86	30.68
Sikka	66.50	72.88	72.88	8.25	4.80	48.00	4.00	0.60	0.60	11.89	12.06	12.06
Ende	105.59	82.54	86.28	15.25	30.20	30.20	6.00	14.53	14.23	19.24	18.89	15.45
Ngada	115.61	104.34	115.94	3.80	25.96	25.96	32.00	27.63	27.03	47.85	41.31	30.31
Manggarai	56.71	65.05	56.20	21.80	12.00	18.60	12.00	7.40	14.30	7.79	13.65	9.00
Rote Ndao	23.01	23.41	23.41	5.00	4.60	4.60	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Manggarai Barat	29.91	61.31	60.88	18.74	24.00	10.80	21.00	28.80	29.90	72.65	27.69	40.22
Sumba Tengah	18.58	18.30	18.30	5.10	1.50	1.50	2.00	1.20	1.20	0.80	5.45	5.45
Sumba Barat Daya	76.77	67.45	67.45	-	6.14	6.14	0.07	3.20	3.20	6.23	6.28	6.28
Nagekeo	52.80	53.62	59.69	4.20	4.20	4.20	7.00	6.20	6.20	11.37	11.34	5.27
Manggarai Timur	34.70	51.40	59.80	17.60	6.60	8.40	6.00	5.80	6.40	54.90	49.20	38.40
Sabu Raijua	17.60	18.29	23.69	5.00	5.65	4.10	9.00	6.70	5.41	7.20	8.36	5.80
Malaka	64.15	64.38	64.38	3.00	2.00	2.00	0.55	1.55	1.55	0.23	0.00	0.00
Kota Kupang	26.72	25.73	28.07	1.00	2.34	0.00	-	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
Nusa Tenggara Timur	1497.58	1540.35	1649.36	211.10	203.54	208.58	228.66	209.89	210.26	712.67	696.23	581.80



Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020

No	Lokasi Pulau/Kab/Kota	SEMULA			MENJADI		
		Panjang Jembatan (M)	Jumlah Ruas	Banyaknya Jembatan	Panjang Jembatan (M)	Jumlah Ruas	Banyaknya Jembatan
1	Kabupaten Alor	331	2	26	331	2	26
2	Kabupaten Lembata	63	1	5	-	-	-
3	Kabupaten Flotim	163	2	14	163	2	14
4	Kabupaten Sikka	341	7	27	341	7	27
5	Kabupaten Ende	699	6	31	699	6	31
6	Kabupaten Nagekeo	113	2	10	66	1	6
7	Kabupaten Ngada	840	9	40	840	9	40
8	Kabupaten Manggarai Timur	184	1	15	184	1	15
9	Kabupaten Manggarai	1.005	4	34	763	3	19
10	Kabupaten Manggarai Barat	75	1	3	75	1	3
11	Kabupaten Sumba Timur	1.117	8	61	344	3	28
12	Kabupaten Sumba Tengah	38	1	6	38	1	6
13	Kabupaten Sumba Barat	107	2	4	107	2	4
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	107	1	7	107	1	7
15	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Kupang	1.272	5	69	1.272	5	69
17	Kabupaten Tts	970	7	37	970	7	37
18	Kabupaten Ttu	909	4	53	909	4	53
19	Kabupaten Belu	1.110	6	57	1.110	6	57
20	Kabupaten Rote Ndao	252	3	24	-	-	-
21	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
		9.692	72	523	8.315	61	442



Tabel 2.25 Jalan Nasional di wilayah Provinsi NTT

FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)							
NO	NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG RUAS (K M)	ARTERI (K M)	KOLEKTOR 1 (K M)
	BARU						
1	1			LABUHAN BAJO - MALWATAR	62,157	62,157	0
2	1	11	K	JLN. WAETAMA (LABUHAN BAJO)	1,6	0	1,6
3	1	12	K	JLN. VAN BEKKUM (LABUHAN BAJO)	0,81	0	0,81
4	1	13	K	JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUHAN BAJO)	1,1	0	1,1
5	2			MALWATAR - BTS. KOTA RUTENG	61,152	61,152	0
6	2	11	K	JLN. KOMODO (RUTENG)	3,752	3,752	0
7	3			BTS. KOTA RUTENG - KM. 210	46,25	46,25	0
8	3	11	K	JLN. A. YANI (RUTENG)	1,203	1,203	0
9	3	12	K	JLN. RANAKA (RUTENG)	0,605	0,605	0
10	4			KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI	46,316	46,316	0
11	5			BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA	40,819	40,819	0
12	6			BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA	15,514	15,514	0
13	6	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA)	2,15	2,15	0
14	6	12	K	JLN. AHMAD YANI (BAJAWA)	0,457	0,457	0
15	6	13	K	JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA)	0,804	0,804	0
16	7			MALANUZA - GAKO	18,052	18,052	0
17	8			GAKO - AEGELA	32,662	32,662	0
18	9			AEGELA - BTS. KOTA ENDE	53,556	53,556	0
19	9	11	K	JLN. ARAH BAJAWA (ENDE)	0,997	0,997	0
20	9	12	K	JLN. PERWIRA (ENDE)	0,122	0,122	0
21	9	13	K	JLN. SOEKARNO (ENDE)	0,4	0,4	0
22	9	14	K	JLN. KATEDRAL (ENDE)	0,727	0,727	0
23	10			BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO	27,635	27,635	0
24	10	11	K	JLN. A. YANI (ENDE)	1,419	1,419	0
25	10	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (ENDE)	2,735	2,735	0
26	10	13	K	JLN. KESEHATAN (ENDE)	0,563	0,563	0
27	11			DETUSOKO - WOLOGAI	9,068	9,068	0
28	12			WOLOGAI - JUNCTION	9,191	9,191	0
29	13			JUNCTION - WOLOWARU	13,475	13,475	0
30	14			WOLOWARU - LIANUNU	13,968	13,968	0
31	15			LIANUNU - HEPANG	47,694	47,694	0
32	16			HEPANG - NITA	6,971	6,971	0
33	17			NITA - WOLOARA	5,037	5,037	0
34	18			WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE	3,913	3,913	0
35	18	11	K	JLN. GAJAH MADA (MAUMERE)	1,267	1,267	0
36	18	12	K	JLN. NONGMEAK (MAUMERE)	0,685	0,685	0
37	18	13	K	JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE)	0,44	0,44	0
38	19			BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE	4,999	4,999	0
39	19	11	K	JLN. A. YANI (MAUMERE)	1,864	1,864	0
40	19	12	K	JLN. SUDIRMAN (MAUMERE)	1,988	1,988	0
41	20			WAEPARE - KM 180	26,689	26,689	0
42	21			KM 180 - WAERUNU	36,108	36,108	0
43	22			WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA	64,047	64,047	0
44	22	11	K	JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA)	4,447	4,447	0
45	22	12	K	JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA)	1,178	1,178	0
46	22	13	K	JLN. YOAKIM BL. DEROSARI (LARANTUKA)	1,982	1,982	0
47	22	14	K	JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA)	1,943	1,943	0



FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)							
NO	NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG RUAS (K M)	ARTERI (K M)	KOLEKTOR 1 (K M)
	BARU						
48	22	15	K	JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA)	0,935	0,935	0
49	23			BOLOK - TENAU	4,332	4,332	0
50	24	11	K	JLN. KE TENAU (KUPANG)	5,258	5,258	0
51	24	13	K	JLN. PAHLAWAN (KUPANG)	2,815	2,815	0
52	24	14	K	JLN. SUKARNO (KUPANG)	0,77	0,77	0
53	24	15	K	JLN. A. YANI (KUPANG)	1,1	1,1	0
54	24	16	K	JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG)	0,3	0,3	0
55	25	13	K	JLN. TIMOR TIMUR (KUPANG)	6,713	6,713	0
56	26	11	K	SIMPANG OESAPA - LAP.TERBANG ELTARI	3,847	3,847	0
57	26	12	K	JLN. RAYA ELTARI (KUPANG)	8,103	8,103	0
58	26	13	K	JLN. MOH. HATTA (KUPANG)	0,45	0,45	0
59	26	14	K	JLN. SOEDIRMAN (KUPANG)	1,75	1,75	0
60	26	15	K	JLN. JLN. SOEHARTO (KUPANG)	1,5	1,5	0
61	26	16	K	JLN. A. NISNONI (KUPANG)	6,6	6,6	0
62	27			OESAPA - OESAO	16,33	16,33	0
63	27	11	K	OESAPA - OESAO	3,491	3,491	0
64	28			OESAO - BOKONG	41,981	41,981	0
65	29			BOKONG - BATUPUTIH	7,019	7,019	0
66	30			BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE	28,085	28,085	0
67	30	11	K	JLN. GAJAH MADA (SOE)	4,305	4,305	0
68	30	12	K	JLN. SUDIRMAN (SOE)	0,2	0,2	0
69	31			BTS. KOTA SOE - NIKINIKI	20,402	20,402	0
70	31	11	K	JLN. DIPONEGORO (SOE)	1,025	1,025	0
71	31	12	K	JLN. A. YANI (SOE)	5,361	5,361	0
72	32			NIKINIKI - NOELMUTI	44,218	44,218	0
73	33			NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU	6,114	6,114	0
74	33	11	K	JLN. PATTI MURA (KEFAMENANU)	0,975	0,975	0
75	33	12	K	JLN. KARTINI (KEFAMENANU)	1,581	1,581	0
76	33	13	K	JLN. ELTARI (KEFAMENANU)	7,512	7,512	0
77	34			BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI	12,698	12,698	0
78	34	11	K	JLN. A. YANI (KEFAMENANU)	4,393	4,393	0
79	35			MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN)	13,958	13,958	0
80	36			NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK	32,881	32,881	0
81	37			HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA	16,219	16,219	0
82	37	11	K	JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA)	1,418	1,418	0
83	37	12	K	JLN. SUPOMO (ATAMBUA)	1,032	1,032	0
84	37	13	K	JLN. M. YAMIN (ATAMBUA)	1,178	1,178	0
85	37	15	K	JLN. SOEKARNO (ATAMBUA)	1,339	1,339	0
86	38			BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN	30,459	30,459	0
87	38	11	K	JLN. MARTADINATA (ATAMBUA)	0,946	0,946	0
88	38	12	K	JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA)	2,383	2,383	0
89	38	13	K	JLN. KI HAJAR DEWANTORO (ATAMBUA)	1,2	1,2	0
90	38	14	K	JLN. SUTOMO (ATAMBUA)	0,15	0,15	0
91	39			BTS. KOTA KEFAMENANU - OLEFAUB	19,307	0	19,307
92	40			WAIKELO - WAITABULA	5,039	0	5,039
93	41			WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK	32,291	0	32,291
94	41	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	5,547	0	5,547
95	42			BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	61,438	0	61,438

FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)							
NO	NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG RUAS (K M)	ARTERI (K M)	KOLEKTOR 1 (K M)
	BARU						
96	42	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	4,253	0	4,253
97	43			BATAS KAB. SUMBA TIMUR - KM. 35.00	32,815	0	32,815
98	44			KM. 35,00 - BTS. KOTA WAINGAPU	28,382	0	28,382
99	44	11	K	JLN. SUPRAPTO (WAINGAPU)	0,835	0	0,835
100	44	12	K	JLN. PANJAITAN (WAINGAPU)	0,526	0	0,526
101	44	13	K	JLN. MT. HARYONO (WAINGAPU)	0,705	0	0,705
102	44	14	K	JLN. A. YANI (WAINGAPU)	1,189	0	1,189
103	44	15	K	JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU)	0,922	0	0,922
104	44	16	K	JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU)	0,608	0	0,608
105	44	17	K	JLN. ADAM MALIK (WAINGAPU)	2,657	0	2,657
106	44	18	K	JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU)	2,164	0	2,164
107	44	19	K	JLN. NANSI MESI (WAINGAPU)	0,695	0	0,695
108	45			WAINGAPU - MELOLO	57,85	0	57,85
109	45	11	K	JLN. GATOT SUBROTOA (WAINGAPU)	1,82	0	1,82
110	45	12	K	JLN. PATTIMURA (WAINGAPU)	0,72	0	0,72
111	45	13	K	JLN. ANGKASA (WAINGAPU)	0,78	0	0,78
112	45	14	K	JLN. CENDANA (WAINGAPU)	2,31	0	2,31
113	46			MELOLO - BAING	56,7	0	56,7
114	47			BTS. KOTA KALABAHI - TARAMANA	40,65	0	40,65
115	47	11	K	JLN. KARTINI (KALABAHI)	0,271	0	0,271
116	47	12	K	JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHI)	0,944	0	0,944
117	47	13	K	JLN. SUDIRMAN (KALABAHI)	1,345	0	1,345
118	47	14	K	JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHI)	0,631	0	0,631
119	47	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHI)	0,419	0	0,419
120	47	16	K	JLN. SAMRATULANGI (KALABAHI)	0,745	0	0,745
121	47	17	K	JLN. PATTIMURA (KALABAHI)	1,125	0	1,125
122	48			TARAMANA - LANTOKA - MARITAING	57,671	0	57,671
123	49			JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI	8,423	0	8,423
124	50			JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG	22	22	0
125	57			BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI	63,409	0	63,409
126	57	11	K	JLN. MUTANG RUA (RUTENG)	0,66	0	0,66
127	57	12	K	JLN. WAE CEES (RUTENG)	1,405	0	1,405
128	57	13	K	JLN. SATOR TACIK (RUTENG)	1,38	0	1,38
129	58			PAPELA - PANTEBARU	25,95	0	25,95
130	59			PANTEBARU - BAA	30,75	0	30,75
131	60			BOLOW - SEBA	25,15	0	25,15
132	61			SEBA - MESARA	20,12	0	20,12
133	62			JUNCTION - KELIMUTU	13,4	0	13,4
134	63			AEGELA - DANGA (MBAY)	29,46	0	29,46
135	64			DANGA (MBAY) - NILA - MARAPOKOT	12	0	12
136	65			WAILEBE - SP. SAGU	38,363	0	38,363
137	66			SP. SAGU - SP. WITIHAMBA - PELABUHAN DERI (ASDP)	13,7	0	13,7
138	67			WAEJARANG - BALAURING	61,45	0	61,45
139	68			BARANUSA - KABIR	33,1	0	33,1
JUMLAH					1.857,91	1.052,33	805,584

b. Sanitasi Lingkungan

Persentase jumlah kepemilikan masih rendah yakni kurang dari setengah jumlah rumah belum memiliki jamban/WC. Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dibutuhkan percepatan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Komunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	45.99	44.84	62.25	11.78	11.50	10.74	1.81	4.92	4.67	40.42	38.74	22.35
Sumba Timur	62.97	62.98	72.90	9.71	11.63	13.80	3.47	4.11	1.43	23.85	21.28	11.88
Kupang	84.18	84.66	85.86	10.79	9.05	7.60	0.49	0.77	0.74	4.54	5.53	5.80
Timor Tengah Selatan	84.83	82.89	80.12	7.98	10.63	13.13	-	0.39	0.16	7.19	6.10	6.58
Timor Tengah Utara	72.48	81.22	83.38	20.33	11.95	10.04	0.36	0.60	0.76	6.83	6.22	5.82
Belu	77.48	79.39	81.04	13.31	15.65	13.56	2.53	1.03	0.77	6.68	3.93	4.63
Alor	78.91	76.54	72.50	15.76	11.32	21.17	2.73	2.81	3.56	2.60	9.33	2.77
Lembata	90.40	90.13	90.43	6.41	5.52	5.50	0.00	0.72	0.19	3.19	3.63	3.88
Flores Timur	85.78	83.66	91.91	2.93	6.32	2.63	0.43	0.00	0.00	10.87	10.03	5.46
Sikka	70.49	74.75	74.54	14.39	17.69	15.62	1.62	0.44	0.31	13.49	7.12	9.53
Ende	65.85	67.70	72.00	28.61	23.21	19.17	5.54	5.66	4.38	0.00	3.43	4.46
Ngada	83.90	92.03	89.14	13.67	5.88	7.25	0.24	0.26	0.00	2.20	1.83	3.61
Manggarai	67.08	74.30	81.06	16.74	16.34	9.27	2.81	2.92	2.46	13.37	6.44	7.20
Rote Ndao	71.83	79.25	85.71	7.75	4.73	3.99	0.83	1.54	0.20	19.59	14.49	10.10
Manggarai Barat	68.24	75.64	79.02	10.76	10.32	10.43	4.63	3.10	3.29	16.37	10.94	7.26
Sumba Tengah	59.33	68.99	68.73	6.21	3.77	5.70	1.07	1.20	2.34	33.38	26.04	23.22
Sumba Barat Daya	59.47	59.32	66.49	3.28	6.31	5.65	1.00	0.75	2.02	36.25	33.63	25.84
Nagekeo	82.11	88.45	87.57	8.59	6.51	5.86	0.50	1.50	1.50	8.80	3.55	5.07
Manggarai Timur	88.71	81.45	83.93	8.00	10.06	10.01	1.03	0.68	1.52	2.26	7.81	4.54
Sabu Raijua	77.57	85.20	82.22	9.04	7.05	5.55	1.10	0.18	0.22	12.29	7.57	12.02
Malaka	58.46	62.51	68.02	20.47	17.40	19.59	4.03	5.38	3.69	17.03	14.70	8.69
Kota Kupang	73.75	73.57	76.70	24.96	25.09	22.67	1.30	1.07	0.50	0.00	0.27	0.12
Nusa Tenggara Timur	74.48	76.39	79.20	13.17	12.63	11.89	1.68	1.67	1.41	10.67	9.30	7.50



2.1.4.4 Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan *load Factor* angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Meheng Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale.

Tabel 2.27 Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021

Bandara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwa)					
	Datang			Berangkat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tambolaka - Sumba Barat Daya	103.642	54.633	33.940	106.244	50.006	36.992
Umbu Meheng Kunda - Sumba Timur	72.718	51.044	52.634	77.495	47.519	55.175
Terdamu - Sabu Raijua	5.780	3.952	2.989	5.960	4.191	3.584
A. A. Bere Talo - Belu	42.869	19.610	7.993	45.040	19.674	7.732
Mali - Alor	48.892	29.639	22.310	49.499	28.884	22.176
Wunopito - Lembata	14.011	3.959	4.976	13.090	3.809	4.470
Gewayantana - Flores Timur	37.419	24.937	17.753	38.146	25.889	15.650
Frans Seda - Sikka	101.962	59.208	47.324	100.905	54.683	49.376
H. Aroeboesman - Ende	86.939	55.829	54.298	86.404	55.038	55.029
Toreleleo - Ngada	41.083	24.381	21.472	45.901	25.921	23.215
Frans Sales Lega - Manggarai	12.925	6.134	10.490	13.244	6.134	11.646
Lekunik - Rote Ndao	26.626	13.656	12.218	28.122	14.768	12.357
Komodo - Manggarai Barat	347.510	167.859	154.800	346.505	163.046	163.045
Eltari - Kota Kupang	936.224	495.384	499.770	817.758	441.124	440.126
Jumlah	1.878.600	1.010.225	942.967	1.774.313	940.695	900.573

Sumber: BPS, tahun 2022



2.1.4.5 Energi Sumber Daya

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listrik sebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	38.75	46.53	62.98	10.27	7.60	-	26.15	23.19	20.57	24.84	22.68	16.45
Sumba Timur	46.30	49.15	71.60	5.21	7.19	-	44.06	36.56	25.26	4.43	7.10	3.14
Kupang	66.89	69.94	84.48	11.02	11.10	-	11.92	8.10	6.84	10.17	10.86	8.68
Timor Tengah Selatan	33.71	40.59	68.76	9.85	7.59	-	19.96	13.54	16.13	36.48	38.28	15.11
Timor Tengah Utara	57.37	70.38	91.46	19.74	14.64	-	8.37	6.64	1.82	14.52	8.35	6.73
Belu	59.39	73.26	92.92	27.04	16.51	-	2.06	0.75	1.12	11.51	9.47	5.95
Alor	61.65	70.22	80.99	5.13	8.03	-	20.74	14.36	12.41	12.48	7.38	6.60
Lembata	75.35	83.56	95.76	9.79	7.85	-	6.28	1.84	0.92	8.58	6.75	3.32
Flores Timur	88.39	89.58	97.62	7.63	6.59	-	0.25	2.78	0.34	3.73	1.05	2.04
Sikka	60.51	68.16	81.79	19.03	13.62	-	11.06	3.80	8.47	9.41	14.42	9.74
Ende	74.86	83.89	93.92	16.07	7.20	-	7.09	3.80	4.52	1.98	5.10	1.56
Ngada	73.58	73.87	82.63	5.51	6.39	-	13.96	12.72	14.87	6.95	7.02	2.50
Manggarai	47.70	59.82	85.28	24.53	14.93	-	19.39	17.13	11.58	8.39	8.13	3.14
Rote Ndao	60.43	71.65	95.33	8.73	9.67	-	17.16	11.95	2.19	13.69	6.74	2.47
Manggarai Barat	39.52	49.44	67.94	12.87	14.84	-	25.96	25.64	20.41	21.65	10.08	11.65
Sumba Tengah	32.16	37.05	53.86	5.02	3.42	-	44.02	41.93	30.60	18.80	17.60	15.54
Sumba Barat Daya	26.87	32.28	51.55	9.54	6.38	-	32.57	25.94	24.31	31.02	35.40	24.14
Nagekeo	69.45	82.04	90.58	6.95	10.00	-	11.62	3.90	5.04	11.98	4.05	4.38
Manggarai Timur	29.68	31.38	56.31	12.48	8.55	-	33.31	23.93	32.89	24.53	36.14	10.80
Sabu Raijua	39.59	41.14	57.37	7.58	5.78	-	24.14	47.32	36.54	28.69	5.76	6.08
Malaka	58.08	67.01	90.91	24.71	14.57	-	7.35	8.55	0.84	9.86	9.87	8.25
Kota Kupang	85.67	84.10	99.40	14.26	15.88	-	-	0.00	0.57	0.07	0.02	0.03
Nusa Tenggara Timur	56.83	63.34	81.12	13.24	10.70	-	15.91	12.70	11.31	14.02	13.25	7.57

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2020 terdapat 4.059 3,752 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 997,050 orang.

Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah)		
	2018	2019	2020
Sumba Barat	269.929	352.974	396.804
Sumba Timur	619.349	698.489	773.847
Kupang	1.351.115	1.298.787	730.067
Timor Tengah Selatan	382.912	461.289	465.127
Timor Tengah Utara	429.477	492.977	541.913
Belu	676.272	856.785	882.848
Alor	330.958	398.024	418.453
Lembata	253.592	288.772	284.078
Flores Timur	364.942	443.806	466.733
Sikka	663.007	740.661	800.370
Ende	576.955	715.155	803.225
Ngada	414.697	504.816	568.765
Manggarai	569.966	718.605	794.435
Rote Ndao	250.409	257.596	247.498
Manggarai Barat	291.444	392.259	462.075
Sumba Tengah	24.388	31.005	35.701
Sumba Barat Daya	145.015	164.424	176.142
Nagekeo	155.181	166.886	164.428
Manggarai Timur	122.417	117.660	98.032
Sabu Raijua	35.231	36.252	25.560
Malaka	53.801	85.521	107.787
Kota Kupang	2.215.720	2.304.729	2.308.005
Nusa Tenggara Timur	10.196.779	11.527.473	11.551.894

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2020 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 352 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan 358 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 313 menjadi 307 unit (Tabel 2.) Jumlah anggota

koperasi tahun 2019 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2020 sebanyak 997,050 orang antara tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 185,225 orang (Tabel 2.30).

Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2015	2,004	318	2,322
2016	2,222	312	2,534
2017	2,408	312	2,72
2018	2,818	312	3,13
2019	3,394	313	3,707
2020	3,752	307	4,059

Sumber : Dinas Kop & Nakertrans

Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
581,975	585,695	698,47	811,825	997,05

2.1.4.7 Penanaman Modal

Realisasi investasi triwulan IV tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp4.634.617.649.240 atau 92,69 %. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai mencapai Rp. 4,29 triliun. Realisasi investasi itu terdiri dari, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 751.344.820.972 dari 139 perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanam modal (LKPM). Selain itu ada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.789.358.235.188 dari 336 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Jika dilihat dari target kinerja sebesar Rp. 5 Miliar, hasil investasi itu mencapai 25 % dengan realisasi PMA 30,05 % dan PMDN 151,57%. Tahun 2021 target realisasi investasi secara nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 triliun sedangkan target sesuai RPJMD sebesar Rp. 7,59 triliun atau 63,49 %.

Permasalahan utama kurangnya investasi swastaadalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM; data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)											
	Tenaga Kerja			Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021
Sumba Barat	749	-	-	-	1.679.104	5.143.455	597.426	22.500.000.000	75.094.435.920	1	9	37
Sumba Timur	6.008	-	-	-	78.885.039	34.339.312	613.784.498	1.057.059.519.701	501.353.958.558	2	42	120
Kupang	69	-	-	-	43.146.946	106.245.897	262.608.357	578.205.297.985	1.551.190.098.275	20	15	41
Timor Tengah Selatan	10	-	-	-	1.322.999	6.390.418	1.500.727	17.728.184.000	93.300.107.047	1	13	374
Timor Tengah Utara	-	-	-	-	2.674.104	679.358	-	35.833.000.000	9.918.620.000	-	16	31
Belu	12	-	-	-	16.891.937	537.606	31.061.607	226.351.950.000	7.849.050.000	3	14	17
Alor	281	-	-	-	-	753.809	-	-	11.005.611.714	1	24	16
Lembata	784	-	-	-	5.169.500	260.051	-	69.271.305.930	3.796.744.668	1	4	2
Flores Timur	47	-	-	-	1.943.433	7.782	1.700.000	26.042.000.000	113.618.552	1	7	1
Sikka	200	-	-	-	1.456.168	8.360	81.574.230	19.512.656.520	122.053.771	2	10	66
Ende	4	-	-	-	20.550	42.984	31.150.689	275.365.458	627.565.865	2	4	10
Ngada	-	-	-	-	-	6.608.726	-	-	96.487.397.038	-	2	33
Manggarai	190	-	-	-	7.658.652	10.861.804	-	102.625.930.635	158.582.330.902	1	17	82
Rote Ndao	75	-	-	-	1.915.424	3.877.734	3.151.898	25.666.684.788	56.614.909.980	2	4	40
Manggarai Barat	937	-	-	-	68.333.675	10.115.456	796.675.617	915.671.242.832	147.685.656.434	33	20	220
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	1.578.627	-	-	23.047.948.350	-	1	7
Sumba Barat Daya	822	-	-	-	12.449.891	9.123.931	131.024.011	166.828.538.323	133.209.396.967	-	28	104
Nagekeo	-	-	-	-	-	1.207.333	-	-	17.627.065.305	-	1	30
Manggarai Timur	-	-	-	-	7.206.493	3.832.757	-	96.567.000.000	55.958.244.669	-	6	109
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	949.058	-	-	13.856.250.000	-	-	44
Malaka	200	-	-	-	8.761.851	759.120	6.900.000	117.408.807.741	11.083.153.352	1	2	4
Kota Kupang	2.179	-	-	-	32.315.238	84.813.137	576.786.984	433.024.186.746	1.238.271.804.481	26	115	328
Nusa Tenggara Timur	12.567	-	-	-	291.833.707	288.136.714	2.538.516.043	3.910.571.670.659	4.206.796.021.848	97	354	1.716

2.1.4.8 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius.

Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Wilayah	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Jiwa)																									
	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Korban Tindak Kekerasan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Lansia Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Penyandang Cacat	Pemulung	Tuna Susila	Penyandang HIV/AIDS	Pengemis	Gelandangan	Eks Narapidana	Korban Penyalahgunaan Napza	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Alam	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Komunitas Adat Terpencil	Pekerja Migran / Deportan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kelompok Minoritas	Korban Tarffiking	Korban Bencana Sosial
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Sumba Barat	3.380	8.554	17	-	234	-	1.067	300	21	27	45	-	-	205	6	7.669	99	-	494	-	-	17	-	49	-	-
Sumba Timur	1.446	5.114	-	234	-	-	177	57	32	4	149	-	2	425	-	3.796	62	-	348	-	21	-	-	17	-	-
Kupang	2.184	9.638	82	167	237	-	5.244	1.757	43	321	99	-	-	351	15	8.565	2.580	406	192	11	5	82	12	23	-	11
Timor Tengah Selatan	3.042	11.601	115	126	377	-	8.569	3.847	11	13	204	-	-	351	10	24.460	292	242	254	12	8	115	2	20	-	12
Timor Tengah Utara	1.917	7.761	100	350	252	-	2.327	1.807	14	47	62	-	-	356	-	17.756	10.286	105	212	5	34	100	3	27	-	5
Belu	1.081	4.907	10	5	348	-	1.242	880	376	623	562	512	20	921	7	13.096	-	108	375	90	9	10	-	25	-	90
Alor	2.430	6.309	-	-	525	-	10.500	330	47	38	42	-	-	372	140	10.949	8.750	350	233	2	3	-	1	15	-	2
Lembata	755	2.869	39	-	229	-	8.616	496	1	1	166	2	9	217	7	10.550	-	50	141	-	1	39	10	11	-	-
Flores Timur	514	2.460	14	93	536	-	5.200	1.422	22	23	250	-	-	265	19	1.785	667	304	478	304	-	14	1	11	-	304
Sikka	2.289	6.726	16	32	477	-	6.884	5.829	6	-	464	-	135	405	-	9.906	-	148	143	-	28	16	4	221	-	-
Ende	1.725	6.099	1	4	985	-	3.092	2.374	15	34	176	1	1	612	20	4.718	405	93	129	132	20	1	23	46	-	132
Ngada	485	2.567	28	-	116	-	1.469	1.064	7	-	89	-	-	256	9	2.841	136	141	113	2	33	28	28	12	-	2
Manggarai	487	1.140	18	-	84	-	4.571	3.116	29	41	150	-	-	459	-	10.077	-	-	203	63	12	18	-	23	-	63
Rote Ndao	1.089	3.073	15	-	243	-	1.447	1.398	17	-	18	-	-	231	-	5.324	1.212	47	259	2	22	15	20	18	-	2
Manggarai Barat	3.314	12.526	45	48	102	-	1.532	1.145	54	56	56	-	-	276	-	5.621	21.358	21	276	1	4	45	-	37	-	1
Sumba Tengah	799	2.777	6	-	151	-	580	425	5	9	12	-	-	108	-	3.452	58	40	129	-	-	6	-	14	-	-
Sumba Barat Daya	2.527	7.482	-	52	126	-	2.163	739	21	37	159	55	98	253	-	29.803	325	-	225	-	4	-	2	49	-	-
Nagekeo	664	2.964	7	2	-	-	367	937	-	-	56	-	-	113	6	3.780	36.787	15	173	135	5	7	-	-	-	135
Manggarai Timur	1.879	7.327	4	-	706	-	2.228	1.379	11	7	41	-	-	189	-	25.028	944	-	411	-	3	4	-	21	-	-
Sabu Raijua	667	1.624	-	-	25	-	439	36	4	5	5	-	-	203	-	7.864	944	-	154	-	1	-	-	13	-	-
Malaka	406	2.220	2	-	22	-	1.234	577	-	-	151	-	-	24	-	3.899	1.109	-	129	46	2	2	-	-	-	46
Kota Kupang	859	5.138	-	146	-	-	1.237	485	309	511	744	34	-	619	131	5.975	92	72	-	-	19	-	-	41	-	-
Nusa Tenggara Timur	33.939	120.876	519	1.259	5.775	-	70.185	30.400	1.045	1.797	3.700	604	265	7.211	370	216.914	86.106	2.142	5.071	805	234	519	106	693	-	805



2.1.4.9 Pertanian

Perekonomian di Nusa Tenggara Timur dibagi dalam 18 lapangan bidang usaha. Lapangan usaha terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada pada sektor pertanian dengan persentase 29 persen. Selama pandemi, sektor pertanian selalu mengalami pertumbuhan positif. Saat pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini, berbagai bidang seperti bidang perdagangan, konstruksi, pariwisata tumbuh negatif. Tetapi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif di masa pandemi ini.

Sektor pertanian di NTT tumbuh positif dengan angka 4,26 persen di masa pandemi ini. Jika sektor pertanian tumbuh positif itu berarti meski di masa pandemi setiap orang sangat membutuhkan produk pertanian. Untuk itu, pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor pangan dan pariwisata di NTT khususnya dan dapat mendukung semua bidang pada umumnya.

Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk NTT bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang 305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton per ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. salah satu faktor yang paling menentukan



dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa : benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline tanam jagung panen sapi yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran produksi 7 ton/ha adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TJPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep *pentha helix* atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakkan pengelolaan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan.

Perkembangan produksi padi selama tahun 2021 dilihat menurut Subround, terjadi kenaikan produksi padi secara berturut-turut pada Subround Januari hingga April 2021 dan Mei hingga Agustus 2021, masing-masing sebesar 9,18 ribu ton GKG atau 4,59 persen dan 10,17 ribu ton GKG atau 2,88 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen yang terjadi pada Subround Januari hingga April sebesar 1,3 ribu hektar atau 2,57 persen. Di sisi lain, penurunan produksi padi hanya terjadi pada Subround September hingga Desember 2021, yaitu sekitar 12,49 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau 7,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Sementara produksi padi di NTT sepanjang 2021 mencapai sekitar 731,88 ribu ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6,85 ribu ton GKG atau 0,95 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 725,02 ribu ton GKG.

Tabel 2.34 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	32.013	23.588	30.574
Sumba Timur	68.917	49.563	54.189
Kupang	61.593	52.086	55.838
Timor Tengah Selatan	20.032	16.496	14.539
Timor Tengah Utara	40.135	12.942	32.661
Belu	17.107	11.761	22.449
Alor	2.382	3.324	3.196
Lembata	2.730	3.591	765
Flores Timur	10.997	11.165	8.089
Sikka	13.051	17.235	11.399
Ende	19.561	20.627	23.684
Ngada	55.563	51.771	54.380
Manggarai	92.029	92.346	96.433
Rote Ndao	37.776	22.600	26.795
Manggarai Barat	121.440	126.012	100.874
Sumba Tengah	25.883	26.238	27.757
Sumba Barat Daya	35.858	42.689	41.311
Nagekeo	40.087	36.790	29.776
Manggarai Timur	88.988	74.361	66.798
Sabu Raijua	4.063	4.493	8.634
Malaka	19.728	24.383	20.239
Kota Kupang	1.792	963	1.498
Nusa Tenggara Timur	811.724	725.024	731.878

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedele. Sedangkan hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu; (i) komoditas hortikulutra; alpukat, jeruk keprok, mangga dan pisang; (ii) komoditas biofarmaka; jahe, dan (iii) komoditas sayur-sayuran: bawang merah, bawang putih, cabe besar dan cabe rawit.

Tabel 2.35 Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021

Jenis Buah–Buahan Tahunan	Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2019	2020	2021
Alpukat	116.825	111.186	342.837
Anggur	183	179	74
Apel	90	76	358
Belimbing	7.555	5.594	6.630
Duku/Langsat	160	42	155
Durian	15.742	14.416	37.131
Jambu Air	10.010	10.375	16.850
Jambu Biji	38.755	52.723	151.505
Jeruk Besar	37.095	20.854	18.454
Jeruk Siam/Keprok	260.177	548.670	568.119
Jeruk/ Orange	518.447	569.524	-
Mangga	38	396.599	854.833
Manggis	1.653	9	166
Markisa	210.496	4.242	-
Nangka/Cempedak	78.093	175.346	255.007
Nenas	678.789	164.040	111.060
Pepaya	2.274.612	668.141	1.020.612
Pisang	37.537	2.369.251	2.364.974
Rambutan	10.465	37.392	78.555
Salak	8.073	29.372	24.184
Sawo/Sapodilla	26.655	6.513	9.131
Sirsak	27.852	25.978	42.508
Sukun	21.989	21.012	30.298

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST

Tabel 2.36 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	351	34	818	1.227	870	1.276	-	66	-	186	1.888	119	1.048	75	3.992	233	55	1.795	47	-	-
Sumba Timur	1.753	1.289	1.385	5.324	5.782	4.652	28	134	18	62	4.154	174	3.531	301	5.244	2.371	2.229	2.600	100	166	34
Kupang	11.576	24.877	21.196	14.516	18.660	21.026	-	5.423	160	6.217	13.250	6.195	14.687	137	14.849	17.474	27.235	26.787	1.204	818	550
Timor Tengah Selatan	12.130	17.340	15.030	16.654	13.630	10.344	3.900	15.835	2.270	21.450	25.710	10.150	24.350	176	24.900	13.600	15.300	9.130	1.570	3.160	3.740
Timor Tengah Utara	244	360	154	214	187	848	45	412	37	435	2.355	735	1.349	44	467	2.473	1.153	971	84	303	91
Belu	2.660	3.704	2.532	7.700	16.806	14.161	-	1.451	-	1.566	4.585	1.482	3.554	138	3.863	6.172	7.829	6.396	2.493	3.576	1.162
Alor	314	300	1.190	2.460	4.155	2.540	-	2.217	-	2.404	8.033	2.610	7.715	68	9.422	6.276	6.511	4.281	-	-	-
Lembata	403	315	715	325	141	67	-	-	6	-	124	-	63	22	107	23	4	58	7	-	5
Flores Timur	14	170	37	134	114	747	-	-	-	10	251	47	391	10	606	374	71	579	-	-	-
Sikka	1.204	2.112	378	7.281	10.531	4.670	15	405	609	23	7.441	249	25.705	95	10.347	8.036	8.657	6.510	61	4	-
Ende	655	550	369	1.410	2.283	1.822	1.300	3.120	880	2.560	3.340	2.245	2.799	163	3.487	4.175	7.590	3.504	510	220	40
Ngada	16	14	4	164	100	147	2	18	42	40	225	29	128	154	263	48	47	86	5	-	-
Manggarai	792	12.670	7.452	1.444	2.304	1.036	-	1.342	-	757	1.734	947	1.455	119	804	7.929	2.167	2.079	130	81	20
Rote Ndao	34.257	27.753	45.952	41.160	38.816	22.482	-	595	-	1.725	14.206	260	17.235	140	10.311	13.757	5.425	11.505	1.799	1.320	120
Manggarai Barat	2.940	893	845	7.745	9.645	9.900	-	2.270	-	1.165	5.440	3.700	6.321	67	15.960	3.080	3.864	9.840	-	-	-
Sumba Tengah	376	324	168	249	562	298	-	204	-	190	309	-	574	31	94	148	21	84	-	-	-
Sumba Barat Daya	57	14	1.112	1.649	1.098	9.474	-	2	-	-	421	770	651	205	8.979	594	674	9.002	66	2	-
Nagekeo	545	390	-	1.315	1.716	3.465	-	200	-	-	3.350	200	2.190	24	3.190	2.985	1.423	2.205	-	-	-



Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Manggarai Timur	6.379	8.377	11.139	881	1.764	4.468	5	5.110	75	2.752	9.779	3.704	5.679	103	7.501	3.002	4.826	4.233	181	52	23
Sabu Raijua	3.143	1.631	3.498	665	277	220	-	100	-	250	1.518	-	3.257	16	2.209	1.493	1.016	817	-	-	2
Malaka	2.569	698	110	4.174	7.559	8.719	-	280	-	475	7.735	200	4.457	179	4.941	3.760	1.404	1.540	426	35	-
Kota Kupang	162	418	14	670	395	92	-	377	-	240	2.143	347	2.743	49	2.090	1.493	518	1.440	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	82.540	10.234	114.098	117.361	137.394	122.453	5.295	39.561	4.097	42.507	117.991	34.163	129.882	2.314	133.626	99.496	98.019	105.440	8.683	9.737	5.787



2.1.4.10 Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.37 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Sumba Barat	1.191,93	922,10	922,10	5.106,68	4.787,65	4.787,65	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19.158,65	19.084,76	19.084,76	19.694,98	25.418,21	25.418,21	486,83	-	-	72.549,75	61.366,03	61.366,03
Kupang	41.756,84	43.478,21	43.478,21	61.240,99	60.863,45	60.863,45	3.082,35	-	-	-	531,73	531,73
Timor Tengah Selatan	3.506,89	2.923,41	2.923,41	43.628,19	40.566,57	40.566,57	-	1.807,23	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	54.614,16	53.909,34	53.909,34	14.021,95	12.981,91	12.981,91	-	-	-	298,12	300,78	300,78
Belu	618,59	-	-	953,28	961,80	961,80	-	-	-	-	-	-
Alor	26.625,08	26.699,70	26.699,70	20.084,08	19.341,02	19.341,02	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	599,77	605,12	605,12	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	12.571,28	11.123,86	11.123,86	4.528,59	4.410,55	4.410,55	-	-	-	516,42	521,03	521,03
Sikka	843,96	734,53	734,53	902,56	1.037,12	1.037,12	-	-	-	-	-	-
Ende	405,60	177,75	177,75	35.686,74	29.653,86	29.653,86	-	-	-	1.083,83	932,88	932,88
Ngada	-	-	-	5.355,88	6.330,41	6.330,41	-	-	-	30.332,03	13.438,30	13.438,30
Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,14	1.136,25	1.136,25
Rote Ndao	-	-	-	9.234,74	9.352,55	9.352,55	-	1.418,35	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18.067,00	18.174,15	18.174,15	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	16.045,22	15.189,18	15.189,18	5.111,39	5.157,06	5.157,06	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8.420,48	8.853,18	8.853,18	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9.166,37	9.176,56	9.176,56	9.657,06	9.871,63	9.871,63	-	-	-	-	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	16.159,45	15.583,62	15.583,62	-	-	-	3.138,85	971,67	971,67
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaka	3.056,49	2.984,45	2.984,45	2.539,38	2.547,40	2.547,40	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-	58,98	58,98	-	-	-	5.633,27	1.604,80	1.604,80
Nusa Tenggara Timur	189.561,06	186.403,84	186.403,84	280.993,19	276.556,23	276.556,23	3.569,18	3.225,58	-	114.707,41	80.803,47	80.803,47

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ± 5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas $\pm 51.854,83$ Ha (11 spesies), Terumbu Karang sebanyak ± 160 Jenis). Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, (ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) Pengembangan Komoditas Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Lembata dan Alor.

Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari: Potensi Lestari; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambang, dll); (3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).

Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu); Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng); Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dan Mina Padi seluas 85 Ha.

Potensi Budidaya Rumput Laut; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah *Echeuma CoTonii*, *Eucheuma Sp*, dan Alga Merah (*red algae*). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1.836.847 Ton/tahun.



Tabel 2.38 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019

Wilayah	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)								
	Perikanan Laut			Perairan Umum			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	2.821	7.305	3.009	-	-	-	2.821	7.305	3.009
Sumba Timur	138	16.984	9.159	-	-	-	138	16.984	9.159
Kupang	2.520	8.010	8.410	-	-	-	2.520	8.010	8.410
Timor Tengah Selatan	242	1.876	552	-	-	56	242	1.876	608
Timor Tengah Utara	259	519	748	-	-	-	259	519	748
Belu	1.532	3.561	1.574	-	-	-	1.532	3.561	1.574
Alor	9.298	16.079	16.883	-	-	-	9.298	16.079	16.883
Lembata	7.352	7.540	7.627	-	-	-	7.352	7.540	7.627
Flores Timur	12.750	13.385	14.055	-	-	-	12.750	13.385	14.055
Sikka	6.660	17.959	18.863	-	-	-	6.660	17.959	18.863
Ende	3.696	8.994	8.123	-	-	-	3.696	8.994	8.123
Ngada	378	1.536	274	-	-	-	378	1.536	274
Manggarai	4.074	7.009	-	-	-	-	4.074	7.009	-
Rote Ndao	3.361	3.566	3.696	-	-	-	3.361	3.566	3.696
Manggarai Barat	50.613	5.808	5.331	-	-	-	50.613	5.808	5.331
Sumba Tengah	550	3.015	200	-	-	-	550	3.015	200
Sumba Barat Daya	904	907	556	-	-	-	904	907	556
Nagekeo	1.098	1.115	1.171	-	-	-	1.098	1.115	1.171
Manggarai Timur	4.074	4.060	4.082	-	-	-	4.074	4.060	4.082
Sabu Raijua	318	2.690	2.825	-	-	-	318	2.690	2.825
Malaka	354	1.246	506	-	-	-	354	1.246	506
Kota Kupang	25.274	24.524	16.013	-	-	-	25.274	24.524	16.013
Nusa Tenggara Timur	138.268	157.691	123.658	-	-	56	138.268	157.691	123.714

Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2018

Wilayah														
	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Sumba Barat	192.720,00	192.720,00	6,40	6,00	206,20	206,00	-	-	-	-	-	-	192.932,60	192.932,00
Sumba Timur	123.800,85	123.801,00	-	-	108,78	109,00	0,75	-	-	1,00	-	-	123.910,38	123.911,00
Kupang	1.343.128,00	1.343.128,00	422,71	423,00	154,13	154,00	-	-	-	-	-	-	1.343.704,84	1.343.705,00
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	258,58	259,00	-	-	-	-	-	-	258,58	259,00
Timor Tengah Utara	-	-	1.047,88	1.048,00	230,39	230,00	-	-	-	-	-	-	1.278,27	1.278,00
Belu	-	-	116,60	117,00	26,20	26,00	-	-	-	-	-	-	142,80	143,00
Alor	272,00	272,00	3,06	3,00	26,00	26,00	4,92	-	-	5,00	-	-	305,98	306,00
Lembata	35,90	36,00	0,05	-	1,45	1,00	-	-	-	-	-	-	37,39	37,00
Flores Timur	81.466,19	81.466,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.566,19	81.566,00
Sikka	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Ende	1.968,97	1.969,00	29,66	30,00	31,47	31,00	0,81	-	-	1,00	-	-	2.030,92	2.031,00
Ngada	-	-	-	-	1.396,71	1.397,00	-	-	-	-	-	-	1.396,71	1.397,00
Manggarai	-	-	27,07	27,00	88,46	88,00	-	-	-	-	-	-	115,53	115,00
Rote Ndao	126.212,00	126.212,00	1,65	2,00	3,84	4,00	-	-	-	-	-	-	126.217,49	126.218,00
Manggarai Barat	458,86	459,00	0,83	1,00	21,33	21,00	-	-	-	-	-	-	481,02	481,00
Sumba Tengah	273,47	273,00	-	-	9,27	10,00	-	-	-	-	273,00	-	555,73	283,00
Sumba Barat Daya	2.401,60	2.402,00	-	-	4,30	4,00	-	-	-	-	-	-	2.405,90	2.406,00
Nagekeo	14,98	15,00	48,50	48,00	10,21	10,00	-	-	-	-	-	-	73,69	73,00
Manggarai Timur	74,93	75,00	3,97	4,00	142,33	142,00	0,15	-	-	-	112,59	113,00	333,96	334,00
Sabu Raijua	68.880,00	68.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.880,00	68.880,00
Malaka	-	-	6.714,83	6.715,00	173,96	174,00	-	-	-	-	-	-	6.888,79	6.889,00
Kota Kupang	-	-	7,73	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	7,73	8,00
Nusa Tenggara Timur	1.941.707,74	1.941.708,00	8.530,93	8.523,00	2.893,66	2.901,00	6,63	-	-	16,00	385,59	113,00	1.953.524,54	1.953.261,00



Tabel 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2015-2017

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	160,00	154,70	192.720,00
Sumba Timur	21.546,50	21.546,50	123.800,85
Kupang	1.548.467,00	1.342.582,00	1.343.128,00
Timor Tengah Selatan	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-
Belu	-	-	-
Alor	161.347,60	161.347,60	272,00
Lembata	7.375,00	7.375,00	35,90
Flores Timur	92.849,01	124.526,06	81.466,19
Sikka	20,00	20,00	-
Ende	25,90	25,76	1.968,97
Ngada	35,00	35,00	-
Manggarai	32,41	681,15	-
Rote Ndao	145.840,00	128.595,13	126.212,00
Manggarai Barat	183,88	185,79	458,86
Sumba Tengah	96,19	76,47	273,47
Sumba Barat Daya	280,04	160,37	2.401,60
Nagekeo	9,87	9,87	14,98
Manggarai Timur	2.311,39	1.311,20	74,93
Sabu Raijua	75.571,72	48.214,49	68.880,00
Malaka	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	2.056.151,51	1.836.847,09	1.941.707,74

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.12 Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021
Sumba Barat	1.692	2.400	2.549	-	-	-	13.626	14.811	15.729	6.276	6.903	-
Sumba Timur	54.999	65.693	60.025	5	9	8	40.425	44.007	35.730	33.943	37.338	-
Kupang	239.239	254.759	301.915	-	-	-	1.984	2.297	2.078	8.361	5.292	-
Timor Tengah Selatan	202.000	206.644	223.076	13	13	12	344	357	357	957	975	942
Timor Tengah Utara	132.675	161.889	145.132	-	-	-	803	872	861	1.454	1.599	-
Belu	74.126	80.344	77.320	11	11	11	788	749	699	792	806	780
Alor	5.268	7.574	8.044	-	-	-	-	-	-	116	127	135
Lembata	5.141	6.978	5.350	-	-	-	-	-	-	2.187	2.406	-
Flores Timur	4.965	5.552	5.896	-	-	-	-	-	-	1.365	1.502	-
Sikka	15.274	18.182	19.309	-	-	-	2.135	2.087	2.216	3.610	2.863	-
Ende	38.342	41.875	44.471	-	-	-	2.828	3.074	3.265	3.349	3.684	-
Ngada	43.436	52.968	56.252	-	-	-	15.265	16.594	17.623	7.251	7.976	-
Manggarai	26.825	27.871	29.599	-	-	-	8.448	9.184	9.753	1.299	1.428	-
Rote Ndao	67.736	81.550	86.606	-	-	-	17.735	19.280	20.475	8.019	8.821	-
Manggarai Barat	15.978	16.944	17.995	-	-	-	15.897	17.281	18.352	218	239	254
Sumba Tengah	8.538	8.917	9.470	-	-	-	10.013	10.885	12.295	7.300	8.030	-
Sumba Barat Daya	3.452	4.385	4.657	-	-	-	16.331	17.753	18.854	6.531	7.184	-
Nagekeo	35.917	29.390	31.212	-	-	-	7.187	7.812	8.296	3.931	4.323	-
Manggarai Timur	16.277	17.580	18.670	-	-	-	9.360	10.175	10.806	3.585	3.943	-
Sabu Raijua	5.827	7.356	7.812	-	-	-	11.231	12.208	12.965	8.652	9.517	-
Malaka	82.996	82.512	86.088	-	-	-	471	512	445	75	82	85
Kota Kupang	6.912	7.619	-	-	-	-	32	34	34	84	91	95
Nusa Tenggara Timur	1.087.615	1.188.982	1.248.930	29	33	31	174.903	189.972	190.833	109.355	115.129	-

Sumber: BPS, tahun 2022

Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribuan ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	65.554	76.264	84.501	2.510	2.526	2.683	-	66	73
Sumba Timur	149.640	179.568	70.145	69.335	70.083	68.725	1.280	1.536	9.380
Kupang	501.690	525.445	474.396	45.862	172.229	155.926	214	220	212
Timor Tengah Selatan	224.521	240.887	230.560	30.674	32.453	29.542	-	-	-
Timor Tengah Utara	86.131	103.357	95.660	46.666	46.974	52.529	38	46	49
Belu	69.219	70.399	66.110	19.205	19.386	17.297	-	37	34
Alor	119.459	143.351	158.833	50.984	51.321	54.503	-	-	-
Lembata	54.988	65.985	73.111	49.248	49.573	52.647	624	749	830
Flores Timur	104.465	125.358	138.897	76.000	76.501	81.244	928	1.115	1.235
Sikka	160.149	88.198	97.723	67.571	115.511	122.673	281	337	373
Ende	71.247	85.496	94.730	31.161	31.366	33.311	16	19	21
Ngada	171.033	205.239	227.405	31.404	31.611	33.571	2.603	3.123	3.460
Manggarai	47.316	56.779	62.911	13.554	13.643	14.489	-	-	-
Rote Ndao	56.656	67.987	75.330	59.592	59.985	63.704	25.342	30.410	33.694
Manggarai Barat	44.584	53.500	59.278	7.235	7.283	7.735	-	-	-
Sumba Tengah	42.957	51.548	57.115	11.618	11.734	13.560	-	-	15
Sumba Barat Daya	96.725	116.070	128.606	21.507	21.811	23.163	-	-	-
Nagekeo	105.755	126.906	140.612	51.590	51.930	55.150	8.121	9.822	10.883
Manggarai Timur	74.100	88.920	98.523	35.225	35.457	37.655	-	-	-
Sabu Raijua	40.827	48.992	54.283	65.717	66.151	70.252	26.081	28.973	32.102
Malaka	104.646	125.575	69.301	23.642	23.797	33.996	-	-	-
Kota Kupang	40.839	49.006	-	8.350	8.405	7.989	61	79	66
Nusa Tenggara Timur	2.432.501	2.694.830	2.598.370	818.650	999.730	1.032.344	65.589	76.532	92.427

Berdasarkan Tabel 2.40 dan Tabel 2.41, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.

Tabel 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Tahun 2019-2021

Wilayah	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)								
	Pemerintah			Swasta			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumba Timur	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Kupang	3	3	3	1	1	1	4	4	4
Timor Tengah Selatan	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Timor Tengah Utara	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Belu	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Alor	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Lembata	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Flores Timur	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sikka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ende	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ngada	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Manggarai	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Rote Ndao	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sabu Raijua	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Malaka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Kota Kupang	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	25	27	27	1	1	1	26	28	28

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.13 Pariwisata

Pada triwulan III 2021, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 7,17%. Pariwisata tumbuh karena didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tumbuhnya kredit akumasi, serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar lembaga optimalisasi peran seluruh pihak dan juga keterlibatan pelaku usaha dan UMKM untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah Pemerintah daerah, perusahaan teknologi dan asosiasi bersama-sama mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga meningkatkan

kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata.

Kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada 2020, menyusul dampak covid-19 pada sektor pariwisata berkontraksi hingga 26,92%, melambat dibandingkan 2019 yang tumbuh sebesar 5,99%. Sehingga vaksinasi sebagai *game changer* terhadap pelaku pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah di tengah percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai *prime mover economy*.

Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)								
	Mancanegara			Domestik			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	-	862	946	-	3079	7083	-	3941	8029
Sumba Timur	-	202	87	-	5880	18489	-	6082	18576
Kupang	-	316	0	-	3759	4619	-	4075	4619
Timor Tengah Selatan	-	0	0	-	6927	11038	-	6927	11038
Timor Tengah Utara	-	37	0	-	1250	10980	-	1287	10980
Belu	-	811	34	-	20429	22324	-	21240	22358
Alor	-	12	18	-	1431	2382	-	1443	2400
Lembata	-	0	0	-	1203	1760	-	1203	1760
Flores Timur	-	147	21	-	2685	20156	-	2832	20177
Sikka	-	2159	119	-	12296	21214	-	14455	21333
Ende	-	31	6	-	2145	13053	-	2176	13059
Ngada	-	62	29	-	3841	12384	-	3903	12413
Manggarai	-	116	4	-	2128	10435	-	2244	10439
Rote Ndao	-	490	0	-	983	1890	-	1473	1890
Manggarai Barat	-	15031	6129	-	64917	136836	-	79948	142965
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	4116	172	-	2366	4217	-	6482	4389
Nagekeo	-	0	0	-	2142	5252	-	2142	5252
Manggarai Timur	-	0	0	-	1001	2488	-	1001	2488
Sabu Raijua	-	9	0	-	523	521	-	532	521
Malaka	-	0	0	-	771	622	-	771	622
Kota Kupang	-	20377	1180	-	202532	235898	-	222909	237078
Nusa Tenggara Timur	155900	44778	8745	931967	342288	543641	987867	387066	552386

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.5.1. Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10%, membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02%. Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Lapangan Usaha Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83%. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ekonomi bersumber dari LU utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian.

2.1.5.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp. 44,50 Triliun, atau 86,60% dibandingkan dengan total anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal sebagai counter cyclical dalam perekonomian Provinsi NTT.

2.1.5.3. Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67%, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74%. Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87%. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73%. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66%. Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan

mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5.4. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada tahun 2021 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ROA sebesar 3,83, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan LDR sebesar 114,56%. DPK tercatat tumbuh sebesar 8,25%, didorong oleh perbaikan kinerja simpanan jenis tabungan. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,77%, didorong oleh perbaikan kinerja kredit konsumsi serta kredit UMKM. Tingkat risiko masih terjaga, dengan NPL (*gross*) yang tercatat sebesar 1,37%.

2.1.5.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator sistem pembayaran tunai maupun nontunai pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan III 2021 didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pembatasan sosial pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja transaksi tunai dapat terlihat dari peningkatan kinerja transaksi *inflow* dan *outflow* dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, perbaikan transaksi nontunai dapat dilihat dari perbaikan kinerja transaksi RTGS, SKNBI, dan kartu kredit. Di sisi lain, transaksi elektronik masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan III 2021.

2.1.5.6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat 2,92 juta orang, meningkat 2,48% dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 2,85 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,77% pada Agustus 2021 dari 4,28% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021 tercatat sebesar 20,44%, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21%. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2021 tercatat masih rendah sebesar 95,68 menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 96,27.

2.1.5.7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,72% – 5,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, dan

perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja Lapangan Usaha Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus *omicron* pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “**NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*), 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2021, RKPD 2021 menetapkan tema “**Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah**”. Tema RKPD 2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu : 1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting; 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana; 4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata; 5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi; 6. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan; 7. Reformasi Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2021 dapat dicapai. Pencapaian

indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.45 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pembangunan			
			2018	2019	2020	2021
1	PertumbuhanEkonomi	%	5,11	5,24	-0,83 (c to c) – (pertumbuhankumulatif)	3,10
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,44
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,61 (y on y)	1,67
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,28
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,15
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,69
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,77
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,339

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy).

Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 20,44 persen.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,28 persen. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,85 pada tahun

2019 dan 67,01 pada tahun 2020 menjadi 67,15 ditahun 2021. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 7,63, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 7,69 tahun.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, namun ditahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 3,77 persen.

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan, sedangkan untuk bulan September tahun 2021 berada pada posisi 0,339 menurun 0,017 poin apabila dibandingkan dengan September 2020.

2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemic Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian Kembali berbagai target indicator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL : <http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja>. Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kondisi Laporan yang disampaikan ke Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 31 Desember 2021).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja, dan data dasar. Nomenklatur Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera juga harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Namun demikian, program-program tersebut tetap dijiwai oleh semangat NTT Bangkit menuju Sejahtera. Untuk itu indikator program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya sesuai hasil evaluasi. Pemetaan Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera ke nomenklatur program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdiri dari :

- a. 3 Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- b. Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu :
 1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kelestarian Budaya;
 2. Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
 4. Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
 5. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
 6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Program Pelayanan Sosial;
 8. Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
 9. Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 10. Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan;
 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 12. Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah;
 14. Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
 15. Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana;
 16. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 17. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
 18. Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan;
 19. Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
 20. Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
 21. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 22. Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
 23. Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
 24. Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 25. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
 26. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;

27. Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
 28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
 30. Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;
 31. Program Layanan Pemerintahan Daerah;
 32. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 33. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
 34. Program Peningkatan Pengelolaan Aset;
 35. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 36. Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;
 37. Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
 38. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 39. Program Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 :

Tabel 2.46 Pemetaan Program NTT Bangkit, NTT Sejahtera dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)
Dinas Kesehatan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Program NTT Sejahtera (Bangkit)	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentaseke tersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate
	Program NTT Sejahtera	Persentase rumah tangga menurut air layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	<i>Persentase rumah tangga menurut air layak</i>
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak		<i>Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak</i>
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah kader Champion yang terlibat dalam pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan stunting	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keterlibatan Kader Champion dalam pemenuhan Gizi Balita dalam rangka pencegahan stunting
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program NTT Bangkit	Jumlah BumDes Aktif di Pariwisata Estate	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Bumdes Aktif di Pariwisata Estate
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate



KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
			USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Program NTT Bangkit	Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan pariwisata estate	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek Kawasan konservasi SDA
				Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata
Dinas Perhubungan				
	Program NTT Sejahtera	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate
Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Program NTT Bangkit	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Program NTT Bangkit	Jumlah olah raga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi
		Jumlah olah raga rekreasi yang dibina untuk mendukung pariwisata estate		
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				



KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate
Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Program NTT Bangkit	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di pariwisata estate	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan budidaya di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan tangkap di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola
		Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan usaha di bidang pariwisata yang dikelola masyarakat
		Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilih gender	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
		Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di pariwisata estate	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian, Peternakan di Pariwisata Estate
		Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di pariwisata estate		
		Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate		
Dinas Peternakan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk
	Program NTT	Persentase pertumbuhan populasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase pertumbuhan populasi peternakan

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Bangkit	peternakan di Pariwisata estate	<i>PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</i>	di Pariwisata estate
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral				
	Program NTT Bangkit	Persentase dukungan elektrifikasi di setiap Pariwisata Estate	<i>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</i>	Pengelolaan Potensi EBT di destinasi wisata
	Program NTT Sejahtera	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRI KAN</i>	Rasio elektrifikasi dari non EBT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Perdagangan				
3.06.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan sector perdagangan di Pariwisata Estate	<i>PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</i>	Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi
Perindustrian				
3.07.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate	<i>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</i>	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah diatas, dijabarkan dalam RKPD 2021 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan itu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sector pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sector pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas social ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas kedaerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif,



bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

- MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksanakan oleh 15 Perangkat Daerah;
- MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah
- MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah
- MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah
- MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari 1 (satu) Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan IV:

Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan pangan	79.999.163.032,00	65.527.314.440	81,91
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	43.116.583.297,00	41.736.852.631	96,80
	Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan	63.138.407.170,00	52.846.846.801	83,70
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	13.519.650.516,00	8.972.992.047	66,37
	Program Koordinasi Perekonomian Dan Kerja Sama Daerah	1.702.121.649,00	1.532.249.908	90,02
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah	9.952.631.957,00	9.718.745.106	97,65
	Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.785.932.504,00	27.225.438.351	83,04
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.158.489.269,00	35.255.137.729	87,79
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan	Program Pelayanan Sosial	38.177.592.484,00	29.843.424.045	78,17



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
daerah				
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.006.865.736,00	7.686.591.107	96,00
	Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	18.089.016.393,00	17.114.018.409	94,61
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	1.586.234.357.148,00	1.427.928.168.305	90,02
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	86.940.417.010,00	49.521.261.529	56,96
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	8.597.804.656,00	7.979.622.501	92,81
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)				
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata dengan polapendekatan kawasan	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17.026.256.958,00	9.999.520.711	58,73
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan				
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	1.586.234.357.148,00	1.427.928.168.305	90,02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan	37.510.483.145,00	35.792.503.017	95,42

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya mineral	17.300.435.195,00	16.104.975.123	93,09
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian	2.848.199.421.867,00	1.703.223.254.276	59,80
	Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	17.580.561.602,00	14.672.736.713	83,46
	Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	18.473.717.500,00	18.327.775.132	99,21
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	243.060.747.358,00	24.345.069.811	92,30
	Program Upaya Kesehatan Perseorangan			
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Program Upaya Kesehatan Perseorangan			
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik				
1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	26.124.311.245,00	25.797.757.354	98,75
	Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	23.396.838.387,00	21.487.656.375	91,84

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	746.163.213.312,00	634.686.429.243	85,06
	Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah	118.341.123.828,00	88.045.796.128	74,40
	Program Pengembangan Kepegawaian Dan Kopri	19.139.090.690,00	18.545.778.879	96,90
	Program Peingkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	139.781.979.153,00	127.145.688.238	90,96
	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah	8.361.244.494,00	7.998.366.483	95,66
	Program Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah	1.651.526.070,00	1.592.731.742	96,44
	Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi	1.823.150.122,00	1.748.218.652	95,89
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.125.583.940,00	1.901.547.393	89,46
	Program Peningkatan Kompetensi Pegawai	61.351.282.407,00	49.068.755.669	79,98
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	11.945.941.274,00	11.026.103.796	92,30
	Program Layanan Pemerintahan Daerah	5.768.583.350,00	5.574.758.949	96,64
	Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan	4.314.998.080,00	3.365.698.502	78,00

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Protokol			
	Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional	8.427.142.662,00	7.951.009.102	94,35
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	111.617.829.255,00	101.527.577.490	90,96

Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.46 berikut ini :

Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Non Urusan																			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	5.998.774.962.472	0	0	100,00	1.849.747.114.251	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Meningkatnya sarana dan prasarana	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Pendidikan																	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah	0	5.831.347.615.366	0	0	0	1.864.382.228.124		87.968.073.592		4,72	-	87.968.073.592		1,508537638	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- APS SLB	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	100 (8 Unit)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B	0	2.001.160.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	0,19	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	45,10	0	0	0	29,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	25,10	0	0	0	14,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	0	1.551.106.200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	100,00	0	0	0	49,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	100,00	0	0	0	49,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	100,00	0	0	0	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	100,00	2.340.727.872	0	0	33,33	748.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Kesehatan												-	-				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	692.589.937.748	0	0	0	221.432.927.084	0	8.675.875.637,00	0	3,92	0	8.675.875.637	0	1,252671338		
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	0	0	0	0	75,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	0	0	0	0	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Balita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	0	0	0	0	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Underweight	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Stunting	0	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Kelahiran Total (TFR)	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	0	0	0	0	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kasus HIV yang diobati	0	0	0	0	52,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TB>85%	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	0	0	0	0	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	100,00	77.051.676.317	0	0	47,85	24.634.747.480	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis	0	0	0	0	47,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	0	0	0	0	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG	
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	1.701.434.500	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	0	711.235.000	0	0	72,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	0	0	0	0	45,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	0	555.487.814.130	0	0	10,56	105.361.673.330	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	0		0	0	33,80		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	0		0	0	75,02		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	0		0	0	28,84		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	0		0	0	70,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	0		0	0	86,36		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	83,00	6.550.676.040	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata	0		0	0	77,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	0	1.162.770.000	0	0	66,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	0	3.000.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	0	343.629.453.572	0	0	70,00	109.864.252.409	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	0		0	0	40,91		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	0		0	0	31,82		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	0	2.777.192.325	0	0	2,00	887.916.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	0		0	0	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	0		0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	0	2.215.069.637.157	0	0	100,00	1.218.444.330.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	0		0	0	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	0	9.773.041.915	0	0	68,00	3.124.609.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	0	20.883.730.538	0	0	25,32	6.676.888.198	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	0		0	0	27,27		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												-	-				
		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	0	8.896.860.610	0	0	-	2.246.860.610	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	0	128.869.047.970	0	0	45,00	41.201.653.312	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	0		0	0	77,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	0	41.045.879.528	0	0	33,00	13.123.074.352	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												-	-				
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	10.329.480.207	0	0	100,00	3.302.512.660	14,76	895.882.270	14,76	27,13	14,76	895.882.270		8,673062458	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	100,00		0	0	100,00		-		-		-	-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	0	4.942.726.379	0	0	60,00	1.580.274.720			-	-	-	-		0	BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	0		0	0	-				-		-	-			BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	33,33				-		-	-			BPBD	
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	75,00				-		-	-			BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100,00	562.993.861	0	0	100,00	179.998.830	9,88	8.330.000	9,88	4,63	9,88	8.330.000		1,479589847	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a. Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b. Non Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Sosial												-	-				
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	100,00	12.628.575.621	0	0	80,00	4.037.573.046	0	524.037.750	0	12,98	0	524.037.750	0	4,149618815	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	100,00	767.013.121	0	0	80,00	245.227.300	0	37.490.186	0	15,29	0	37.490.186	0	4,887815473	DINAS SOSIAL	
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100,00	33.460.289.795	0	0	80,00	10.697.830.717	0	2.728.645.322	0	25,51	0	2.728.645.322	0	8,154876538	DINAS SOSIAL	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	100,00	10.249.899.976	0	0	80,00	3.277.069.490	0	456.900.000	0	13,94	0	456.900.000	0	4,457604475	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	100,00	1.808.766.904	0	0	80,00	578.293.920	0	48.460.400	0	8,38	0	48.460.400	0	2,679195417	DINAS SOSIAL	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100,00	228.051.842	0	0	100,00	72.912.100	0	24.213.700	0	33,21	0	24.213.700	0	10,61762967	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Tenaga Kerja						70,00	314.738.430										
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90,00	984.427.531	0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60,00		0	0	45,00	193.237.230	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55,00	604.400.451	0	0	70,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi meningkatnya PMI prosedural	85,00		0	0	45,00	102.191.520	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90,00		0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	85,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	70,00	245.751.433	0	0	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	65,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	100,00	5.534.382.381	0	0	32,00	1.769.437.330	0	122.867.630,00	0	6,94	0	122.867.630	0	2,220078439	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	100,00		0	0	71,79		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	100,00	3.089.418.083	0	0	75,00	987.740.150	0	25.432.550,00	0	2,57	0	25.432.550	0	0,823214901	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	100,00		0	0	75,00		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	100,00	1.457.665.127	0	0	25,00	466.040.637	0	39.772.020	0	8,53	0	39.772.020	0	2,728474412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	100,00		0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	100,00		0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	50,00	563.962.998	0	0	20,00	180.308.680	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	100,00	2.509.157.589	0	0	32,2	802.220.880	0	28.784.020	0	3,59	0	28.784.020	0	1,147158717	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60,00	282.474.497	0	0	5,60	90.311.960	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pangan																	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72	9.843.537.844	0	0	2,87	3.147.148.520	0	586.427.500	0	18,63	0	586.427.500	0	5,957487128	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	8,50	0	0	0	10,20		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	0	390.838.227	0	0	50,00	124.957.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	100,00	997.753.651	0	0	48,84	318.999.020	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Pertanian												-	-				
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	1.062.586.052	0	0	27,27	339.727.055	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		5. Lingkungan Hidup																	
		Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	100,00	3.120.174.793	0	0	56,52	997.573.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66	6.170.070.012	0	0	75,13	1.972.677.610	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	51,33	22.940.453.032	0	0	10,00	7.334.457.789	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	100,00	926.598.928	0	0	58,26	296.249.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	25,00	1.626.714.494	0	0	8,33	520.088.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	50,00	832.822.996	0	0	33,33	266.267.850	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	27,00	1.666.790.315	0	0	24,00	532.901.560	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		9. Komunikasi dan Informatika																	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	95 (Informatif)	3.392.446.875	0	0	80 (Menuju Informatif)	1.084.623.672	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	31,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2,70	9.771.142.136	0	0	2,30	3.124.002.366	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	100,00	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7,00	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	20,00	0	0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100,00	1.552.236.709	0	0	66,00	496.276.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100,00	3.518.485.659	0	0	54,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	78,00	4.297.500.000	0	0	70,00	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	85,00	0	0	0	76,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		11. Penanaman Modal												-	-				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	75,00	1.376.196.674	0	0	25,00	439.993.770	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	100,00	1.798.168.351	0	0	33,33	574.905.380	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100,00	2.392.733.861	0	0	100,00	764.998.210	0	104.735.880	0	13,69	0	104.735.880	0	4,377247369	DPMPTSP	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100,00	1.032.152.299	0	0	100,00	329.996.860	0	62.847.800	0	19,04	0	62.847.800	0	6,089004508	DPMPTSP	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100,00	462.906.945	0	0	100,00	147.999.320	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		12. Kepemudaan dan Olahraga																	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	100,00	9.141.496.970	0	0	75,00	2.922.693.966	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik	0	142.366.813.586	0	0		45.517.121.364	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Medali (200 buah)	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor (13 cabor)	100,00	0	0	0	76,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor tradisional	100,00	0	0	0	85,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor rekreasi	100,00	0	0	0	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	0	0	0	0	(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100,00	3.127.764.000	0	0	31,82	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		13. Statistik												-	-				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	100,00	312.505.536	0	0	100,00	99.913.400	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		14. Persandian												-	-				
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	5 (Sangat Baik)	871.590.911	0	0	3-3,9 (Cukup)	278.662.620	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		15. Kebudayaan																	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	100,00	23.497.863.774	0	0	21,51	7.512.671.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	10,00	7.997.293.758	0	0	6,00	2.556.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	10,00		0	0	6,00		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	40,00	781.941.000	0	0	36,00	250.000.000	0	169.500.000	0	67,80	0	169.500.000	0	21,67682728	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	28,00	7.137.196.348	0	0	24,00	2.281.884.550	0	355.200.000	0	15,57	0	355.200.000	0	4,976744126	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100,00	3.460.883.377	0	0	65,00	1.106.504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		16. Perpustakaan																	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan <i>e-library</i>	100,00	16.073.914.968	0	0	100,00	5.139.107.352	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		17. Kearsipan																	
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100,00	4.254.738.499	0	0	100,00	1.360.313.150		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100,00	938.328.668	0	0	100,00	299.999.830		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Urusan Pemerintahan Pilihan																	
		1. Kelautan dan Perikanan																	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100,00	7.888.539.295	0	0	72,00	2.326.779.322	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	23,70	105.147.538.014	0	0	4,00	52.290.163.014	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	23,70	0	0	0	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	42,80	200.853.998.243	0	0	5,00	167.006.833.430	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	43,00	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported Fishing)	0	12.628.221.166	0	0	30,00	3.830.741.856	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38,46	2.895.939.644	0	0	9,52	932.439.644	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		2. Pariwisata																	
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	56,67	40.312.254.863	0	0	32,38	10.812.254.863	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	56,67	17.243.689.685	0	0	32,38	5.247.798.920	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	10,00	16.638.705.473	0	0	1,50	3.100.976.940	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	100,00	0	0	0	93,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:	0	13.048.081.831	0	0		4.294.951.540	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			a. Tour operator	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b. Guide/Pemandu Wisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c. Pelaku Ekonomi Kreatif	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			d. Restaurant	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			e. Perhotelan	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f. Pramuwisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			g. Transportasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			h. Informasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		3. Pertanian																	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:	0	136.265.465.309	0	0	43.566.415.276	0	521.786.300	0	1,20	-	521.786.300	0	0,382918958		DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Ternak Besar	0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100,00	0	0	0	100,00	0	0	1.528.906.690	0	0	0	1.528.906.690	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi	0	162.401.391.650	0	0	0	151.590.142.770	0	2.933.476.462	0	1,94	0	2.933.476.462	0	1,806312392	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	100,00	0	0	0	71,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marunga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	100,00		0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	100,00		0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	100,00		0	0	0	89,66	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	100,00		0	0	0	87,35	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	100,00		0	0	0	83,61	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	100,00		0	0	0	82,96	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	100,00		0	0	0	78,25	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	100,00		0	0	0	84,86	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	100,00		0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	100,00		0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	100,00		0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	100,00		0	0	0	97,06	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	100,00		0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	100,00		0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	100,00		0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	100,00		0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0		0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	100,00		0	0	0	87,46	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	100,00		0	0	0	87,32	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	100,00		0	0	0	91,19	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06		0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	100,00		0	0	0	83,68	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	100,00		0	0	87,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	100,00		0	0	79,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00		0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023=22.584.988 ekor)	100,00		0	0	89,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	80,00	14.034.534.117	0	0	80,00	4.487.082.183	0	1.557.328.917	0	34,71	-	1.557.328.917	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	25,00		0	0	15,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75,00	2.971.045.008	0	0	70,00	949.894.240	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas		9.920.019.336	0	0		3.171.600.970	0	560.434.618		17,67	-	560.434.618			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	100,00		0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	100,00		0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	100,00		0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	100,00		0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	100,00		0	0	61,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Kehutanan																	
		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30	276.163.277.442	0	0	1,14	176.430.599.445	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	8,47	26.239.058.382	0	0	2,54	8.389.078.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	100,00		0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	33,91	3.973.757.947	0	0	31,59	1.270.478.830	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,25		0	0	9,38		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,30	363.951.154	0	0	0,13	116.361.450	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		5. Energi dan Sumber Daya Mineral																	
		Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	21,05	4.719.643.241	0	0	10,53	1.508.951.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	100,00		0	0	84,75		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	100,00	1.952.013.416	0	0	100,00	624.092.296	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	100/ (103.32)	4.420.654.838	0	0	8.04 / (8.31)	1.413.359.460	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	100/ (47.28)		0	0	8.79/ (4.16)		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	59,58	3.688.791.779	0	0	58,42	1.179.370.240	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		6. Perdagangan																	
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	100,00	609.081.838	0	0	50,00	194.733.950	0	2.490.000	0	1,28	0	2.490.000	-	0,408812058	DISPERINDAG	
		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	100,00	826.999.568	0	0	25,00	264.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	10,00	3.717.029.483	0	0	10,00	1.188.398.320	0	4.552.000	0	0,38	0	4.552.000	0	0,122463382	DISPERINDAG	
			a. Barang Kebutuhan Pokok	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			b. Barang Penting	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	11,11	2.443.421.122	0	0	16,67	781.203.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,70	9.275.464.338	0	0	54,70	2.965.525.640	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	100,00		0	0	NA		0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	90,00	11.404.676.144	0	0	40,00	3.646.271.312	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	90,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		7. Perindustrian																	
		Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	3,36	31.738.463.106			1,12	10.147.333.08	-	166.712.000	-	1,64	-	166.712.000	-		DISPERINDAG	
		Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	90,00	941.271.300	0	0	50,00	300.940.64	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	11,85	631.795.629	0	0	10,00	201.995.94	-	2.844.000	-	1,41	-	2.844.000	-	0,450145564	DISPERINDAG	
		8. Transmigrasi																	
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadanganannya	100,00	179.182.437	0	0	75,00	57.287.710	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100,00	835.070.294	0	0	75,00	266.986.350	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100,00	549.626.104	0	0	75,00	175.724.928	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		1.Sekretariat Daerah																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100,00	412.814.867.836	0	0	100,00	131.984.020.481	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
		Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100,00	12.682.915.153	0	0	84,78	4.054.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI	
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	2.126.240.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100,00	18.740.714.373	0	0	100,00	5.991.729.035	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100,00	10.206.905.451	0	0	100,00	3.263.323.400	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	5.344.058.817	0	0	33,33	1.708.587.610	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
			Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	100,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	100,00	19.507.878.656	0	0	100,00	6.237.004.664	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro PBJ	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100,00	93.831.669	0	0	33,33	29.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
		2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat																	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100,00	226.118.355.660	0	0	100,00	72.293.931.275		15.196.515.169	0	21,02	0	15.196.515.169	0	6,720602193	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penunjang Urusan Pemerintahan																	
		1. Perencanaan																	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100,00	10.504.967.457	0	0	100,00	3.358.618.955	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100,00	21.881.850.925	0	0	100,00	6.996.004.470	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		2. Keuangan																	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100,00	2.437.446.094.008	0	0	100,00	779.293.480.585	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuda	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00	17.886.976.004	0	0	100,00	5.718.774.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
			Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	37,56	131.893.767.372	0	0	32,26	42.168.708.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		3. Kepegawaian																	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100,00	30.482.515.797	0	0	100,00	9.745.785.103	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
			Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
		4. Pendidikan dan Pelatihan																	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	B dan A	149.695.761.481	0	0	Latsar "B"	47.860.312.185	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	85,00	0	0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5. Penelitian dan Pengembangan																	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	100,00	9.795.273.133	0	0	62,86	3.131.717.461	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	100,00	0	0	0	93,10		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	100,00	0	0	0	30,00		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		6. Pengelolaan Perbatasan																	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	100,00	12.467.045.483	0	0	33,00	3.985.929.080	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100,00	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
		7. Pengelolaan Penghubung												-	-				
		Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	100,00	15.939.019.886	0	0	50,00	5.095.979.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan pembinaan kemasayarakatan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan promosi daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
		1. Inspektorat Daerah																	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100,00	41.171.086.151	0	0	100,00	13.163.105.065	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
			OPINI BPK	WTP				WTP										INSPEKTORAT DAERAH	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	100,00	11.687.632.217	0	0	100,00	3.736.737.240	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintahan Umum																	
		1. Kesatuan Bangsa dan Politik																	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	0	857.096.884	0	0	70,21	274.028.630	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	0	10.353.780.807	0	0	80,26	3.310.281.980	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	0	547.014.146	0	0	34,69	174.889.840	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	429.154.994	0	0	100,00	137.208.240	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	0	0	0	0	100,00	544.701.300	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	

2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.3.1 Urusan Pendidikan.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah:

- 1) Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16-18 Tahun)
- 2) Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14-18 Tahun)

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.49 Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	Tahun 2021	100	75,77
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidddikan menengah	Tahun 2021	100	74,65

Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni:

- 1) Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
- 2) Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak.

c. **Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2021 untuk Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) APBD

Tabel 2.50 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021

Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	317.608.546.091	16%
Pengembangan Bahasa dan Sastra	193.907.060	184.460.000	95%
Pengembangan Kebudayaan	1.815.521.400	1.741.106.897	96%
Pengembangan Kesenian Tradisional	1.038.245.737	938.011.837	90%
Pembinaan Sejarah	170.649.860	167.089.600	98%
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.100.504.000	1.099.254.000	100
Pengelolaan Permuseuman	1.894.012.130	1.309.822.030	69
Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	317.608.546.091	16%
TOTAL	2.848.199.421.867		

2) APBN

Pada tahun 2021 tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Sumber Dana Lain Yang Sah

Pada tahun 2021 tidak ada Sumber Dana Lain Yang Sah yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. **Dukungan Personil.**

Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah

seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 228 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------|
| 1) Sekretariat | :117 orang |
| 2) Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah | : 34 orang |
| 3) Bidang Pembinaan PKLK | : 21 orang |
| 4) Bidang Pembinaan Ketenagaan | : 35 orang |
| 5) Bidang Kebudayaan | : 21 orang |

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapat guru mata pelajaran yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- b) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- c) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

2) Solusi

Solusi yang diberikan untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan sertifikat pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang Belum memiliki sertifikat pendidik;
- b) Untuk tahun 2021 masih belum ada uji kompetensi bagi guru karena menyelesaikan kuota guru-guru yang sudah lulus tes PPG namun belum mengikuti Pendidikan profesi guru di Universitas pelaksana;
- c) Berkaitan dengan kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah melakukan tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap.



2.2.3.2 Urusan Kesehatan

I. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal.

Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

- 1) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018–2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing-masing Pelayanan Dasar

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.51 Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

c. Alokasi Anggaran

Untuk anggaran SPM, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggarkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM melalui APBD dan APBN. Adapun alokasi tersebut sebagai berikut:

1) APBD

Tabel 2.52 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan			
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.299.743.870	1.168.388.670.	89,89
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	2.336.138.190	2.240.635.400	95,91

2) APBN

Alokasi anggaran sebesar Rp. 608.729.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 524.186.850,-atau 86,11%.

3) Sumber Dana Lain yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 86 orang yang terdapat pada 2 Bidang Teknis dan Non Teknis:

1) Bidang Pelayanan Kesehatan 29 orang, dengan rincian:

- a) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: 1 orang.
- b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 14 orang.
- c) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan: 7 orang.
- d) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer: 7 orang.

2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 31 orang, dengan rincian:

- a) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: 1 orang.

- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular: 13 orang.
- c) Seksi Surveilans dan Imunisasi: 12 orang.
- d) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa: 5 orang
- 3) Sekretariat
 - a) Sekretaris: 1 orang
 - b) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi: 11 orang
 - c) Sub Bagian Keuangan: 14 orang

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan

Adanya Refocussing anggaran, sehingga kegiatan lanjutan untuk penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencana tidak dilaksanakan sesuai rencana.
- 2) Solusi
 - a) Mengusulkan kegiatan yang di refocusing pada tahun anggaran berikutnya.
 - b) Kolaborasi dan kerjasama yang kontinyu dengan Kabupaten/Kota serta lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan.

II. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

a. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

- 1) Pelayanan Gawat Darurat
- 2) Pelayanan Rawat Jalan
- 3) Pelayanan Rawat Inap
- 4) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

- 5) Pelayanan Bedah Sentral
- 6) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 7) Pelayanan Hemodialisa
- 8) Pelayanan PKRS
- 9) Pelayanan Farmasi
- 10) Pelayanan Radiologi
- 11) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- 12) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomo
- 13) Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTDRS/BDRS)
- 14) Instalasi Pemulasaran Jenasah
- 15) Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Dept/CSSD)
- 16) Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik
- 17) Pelayanan Loundry
- 18) Pelayanan Sanitasi/Pengolahan Limbah
- 19) Pelayanan IPSRS
- 20) Pelayanan Covid-19

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

- 1) Target Pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi 80%.
- 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Tahun 2021

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	2	3		4	
1.	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani <i>lifesaving</i> anak dan Dewasa	1.	100%
		2.	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	2.	24 Jam
		3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3.	100%
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4.	Satu tim
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5.	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
		6.	Kepuasan Pelanggan	6.	≥70%
		7.	Kematian pasien < 24 Jam	7.	≤ dua

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER- MENKES129/2008	
1	2	3		4	
					perseribu (pindah kepelayanan rawat inap setelah 8 jam)
		8.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8.	100%
2.	Rawat jalan	1.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	1.	100 % Dokter Spesialis
		2.	Ketersediaan Pelayanan	2.	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d.Klinik Bedah
		3.	Jambuka pelayanan	3.	08.00s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 -11.00
		4.	Waktu tunggu di rawat jalan	4.	≤ 60 menit
		5.	Kepuasan Pelanggan	5.	≥ 90 %
		6.	Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6.	100%
		7.	a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskop TB	7.	a. ≥ 60%
			b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di RS		b. ≥ 60%
3.	Rawat Inap	1.	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1.	a. Dr. Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3
		2.	Dokter penanggung jawab pasien Rawat inap	2.	100%
		3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3.	a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d. Bedah
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	4.	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
		5.	Kejadian infeksi pasca operasi	5.	≤1,5%
		6.	Kejadian Infeksi Nosokomial	6.	≤1,5%
		7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7.	100%
		8.	Kematian pasien > 48 jam	8.	≤ 0.24%
		9.	Kejadian pulang paksa	9.	≤ 5%
		10.	Kepuasan pelanggan	10.	≥ 90%
		11.	Pasien rawat Inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	11.	100%
		1.2.	Rawat Inap TB	12.	
			a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskopis TB		a. ≥ 60%
			b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit		b. ≥ 60%
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1.	Waktu tunggu operasi elektif	1.	≤ 2 hari
		2.	Kejadian Kematian dimeja operasi	2.	≤ 1%
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3.	100%

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER- MENKES129/2008	
1	2	3		4	
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4.	100%
		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5.	100%
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6.	100%
		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	7.	≤ 6 %
5.	Persalinan, perinatologi	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	1.	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %
		2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	2.	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3.	Tim PONEK yang terlatih
		4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4.	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	5.	100%
		6.	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	6.	≤ 20 %
		7.	Keluarga Berencana	7.	100%
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B; dr.Sp.U, dr.umum terlatih		
			b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih		100%
		8.	Kepuasan Pelanggan	8.	≥ 80%
6.	Intensif	1.	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1.	≤ 3 %
		2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	2.	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani c. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/Setara

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER- MENKES129/2008	
1	2	3		4	
					(D4)
7.	Radiologi	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraxfoto	1.	≤3 jam
		2.	Pelaksana ekspertisi	2.	Dokter Sp.Rad
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3.	Kerusakan foto ≤ 2%
		4.	Kepuasan pelanggan	4.	≥ 80%
8.	Lab. Patologi Klinik	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
		2.	Pelaksana ekspertisi	2.	Dokter Sp.PK
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	3.	100%
		4.	Kepuasan pelanggan	4.	≥ 80%
9.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1.	≤ 50%
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2.	100%
		3.	Kepuasan Pelanggan	3.	≥ 80%
10.	Farmasi	1.	Waktu tunggu pelayanan	1.	
			a.Obat Jadi		a. ≤30 menit
			b.Racikan		b. ≤60 menit
		2.	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2.	100%
		3.	Kepuasan pelanggan	3.	≥80%
		4.	Penulisan resep sesuai formularium	4.	100%
11.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1.	≥90%
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan Oleh pasien	2.	≤20%
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3.	100%
12.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1.	100%
		2.	Kejadian Reaksi transfusi	2.	≤0,01 %
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin		Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1.	100%
14.	RekamMedik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24jam setelah selesai pelayanan	1.	100%
		2.	Kelengkapan <i>Informed Concent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	2.	100%
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3.	≤10menit
		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4.	≤15menit
15.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku mutu limbah cair	1.	a. BOD<30 mg/l b.COD<80mg/l c.TSS<30mg/l d. PH6-9
		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius	2.	100%

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER- MENKES129/2008	
1	2	3		4	
			sesuai dengan aturan		
16.	Administrasidan manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1.	100%
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2.	100%
		3.	Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan pangkat	3.	100%
		4.	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	4.	100%
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minima 120 jam setahun	5.	≥60%
		6.	Cost recovery	6.	≥40%
		7.	Ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan	7.	100%
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat inap	8.	≤2 jam
		9.	Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif)sesuai Kesepakatan waktu	9.	100%
17.	Ambulance dan Kereta/Mobil Jenazah	1.	Waktu pelayanan ambulance	1.	24jam
		2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit	2.	≤30menit
		3.	Waktu pelayanan Mobil Jenazah	3.	24jam
		4.	Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4.	≤30menit
18.	Pemulasaraan Jenazah	1.	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1.	≤ 2 Jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	1.	≥80%
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2.	100%
		3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	3.	100%
20.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1.	100%
		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	2.	100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1.	75%
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	2.	60%
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di rs. (minimal 1 parameter)	3.	75%

c. Realisasi

Pada Tahun 2021 Target sebesar 100% dengan realisasi 80% menunjukkan bahwa capaian kinerja SPM Tahun 2021 sebesar 80%. Standar Pelayanan Minimal yang Tercapai sebanyak 76 indikator dan tidak tercapai sebanyak 19 Standar indikator SPM dari jumlah keseluruhan sebanyak 95 standar indikator SPM. Beberapa indikator yang tidak mencapai standar pelayanan minimal sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative Tindakan persalinan lain. Tenaga/SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib/disiplinnya petugas Administrasi ruang rawat inap untuk menyetor.

Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yang berkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.54 Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Tahun Anggaran 2021

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
1.	Gawat Darurat	Kemampuan 1. menangani <i>life saving</i> anak dan Dewasa	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Jambuka Pelayanan Gawat Darurat	2. 24Jam	100%	100%	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/AL S	3. 100%	86%	86%	Tdk Tercapai
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4. Satutim	100%	100%	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	1.5	100%	Tercapai
		6. Kepuasan Pelanggan	6. ≥70%	84%	100%	Tercapai
		7. Kematian pasien <24 Jam	7. ≤ dua perseribu (pindah kepelayanan rawat inap Setelah 8 jam)	8/1000	-200%	Tdk Tercapai
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8. 100%	100%	100%	Tercapai
2.	Rawat jalan	Dokter pemberi 1. Pelayanan di Poli klinik Spesialis	1. 100 % Dokter Spesialis	100%	100%	Tercapai
		2. Ketersediaan Pelayanan	2. a. Klinik Anak	100%	100%	Tercapai
			b. Klinik Penyakit dalam	100%	100%	
			c. Klinik Kebidanan	100%	100%	
			d. Klinik Bedah	100%	100%	Tercapai
		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 -11.00	100%	100%	
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤60menit	72.31	79%	Tdk Tercapai
		5. Kepuasan Pelanggan	5. ≥90%	80.66	91%	Tdk Tercapai
		6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. a. Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan	7. a.≥60%	87.33	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		Mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b.≥60%	86.33	100%	
3.	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan diRawat Inap	1. a.Dr.Spesialis b. Perawat minimal pendidikanD3	100% 100%	100% 100%	Tercapai
		2. Dokter penanggung jawab Pasien rawat inap	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3. a.Anak b. PenyakitDalam c.Kebidanan d. Bedah	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	Tercapai
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00s/d 14.00 setiap Hari kerja	98.58	100%	Tercapai
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	5. ≤1,5%	0	100%	Tercapai
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	6. ≤1,5%	0.21%	191%	Tercapai
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kematian pasien > 48jam	8. ≤0.24%	4.1%	-79%	Tdk Tercapai
		9. Kejadian pulang paksa	9. ≤5%	1.82%	100%	Tercapai
		10. Kepuasan pelanggan	10. ≥90%	75.18%	84%	Tdk Tercapai
		11. Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	11. 100%	100%	100%	Tercapai
		1. Rawat Inap TB	1. a. ≥60%	92%	100%	Tercapai
		2. a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskopis TB b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB Di Rumah Sakit	b. ≥60%	94%	94%	
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	1. ≤2 hari	98%	98%	Tdk Tercapai
		2. Kejadian Kematian di meja operasi	2. ≤1%	0.11%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian	3. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		Operasi salah sisi				
		4. Tidak adanya kejadian Operasi salah orang	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5. 100%	100%	100%	Tercapai
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotrachealtube	7. ≤6%	100%	100%	Tercapai
5.	Persalinan, perinatologi	1. Kejadian kematian ibu	1. a. Perdarahan ≤1%	0%	100%	Tercapai
		karena persalinan	b.Pre-eklampsia ≤30%	0%	100%	Tercapai
			c.Sepsis ≤0,2 %	0%	100%	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	2. a. DokterSp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100% 100% 100%	100% 100%	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3. Tim PONEK Yang terlatih	59%	100%	Tercapai
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4. a. DokterSp.OG b. Dokter Sp.A c.Dokter Sp.An	100%	100%	Tercapai
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –2500 gr	5. 100%	81%	89%	Tdk Tercapai
		6. Pertolongan persalinan melalui seksiocesaria	6. ≤20%	52%	-30%	Tdk Tercapai
		7. Keluarga Berencana a.Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B;dr.Sp.U,dr.um terlatih	7. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	
		8. Kepuasan Pelanggan	8. ≥80%		100%	Tercapai
6.	Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72jam	1. ≤3%	0.2%	100%	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan UnitIntensif	2. a.Dokter Sp.Anestesian dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b.100% Perawatminimal D3 dengan sertifikat Perawatmahir ICU/Setara	100%	100%	Tercapai
			(D4)			
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto	1. ≤3 jam	36%	36%	Tdk Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.Rad	100%	100%	Tercapai
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3. Kerusakan foto2%	1.5%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥80%	85.25%	100%	Tercapai
8.	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	68.77	100%	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.PK	100%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil Pemeriksaan laboratorium	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥80%	83%	100%	Tercapai
9.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1. ≤50%	20%	100%	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi medik	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Kepuasan Pelanggan	3. ≥80%	85%	100%	Tercapai
10.	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a.ObatJadi b.Racikan	1. a.≤30menit b.≤60menit	7.74 32%	100% 100%	Tercapai
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian	2. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		obat				
		3. Kepuasan pelanggan	3. $\geq 80\%$	61.72	100%	Tercapai
		4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100%	100%	100%	Tercapai
11.	Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. $\geq 90\%$	99%	99%	Tercapai
		2. Sisa makanan yang tidak Termakan oleh pasien	2. $\leq 20\%$	17.26	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100%	100%	100%	Tercapai
12.	Transfusi Darah	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kejadian Reaksi transfusi	2. $\leq 0,01\%$	0.04742	-200%	Tdk Tercapai
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin	Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1. 100%	100%	100%	Tercapai
14.	Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100%	97%	88.3%	Tdk Tercapai
		2. Kelengkapan <i>Informed Concen</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100%	97%	90.3%	Tdk Tercapai
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik Pelayanan rawat jalan	3. ≤ 10 menit	0.7	100%	Tercapai
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤ 15 menit	0.7	100%	Tercapai
15.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30mg/l b.COD < 80 mg/l c.TSS < 30 mg/l d. PH6-9	100%	100%	Tercapai
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100%	84%	84%	Tdk Tercapai
16.	Administrasi dan manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kelengkapan laporan Akuntabilitas kinerja	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		4. Ketepatan Waktu Pengurusan gaji berkala	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minima 120 jam setahun	5. ≥60%	19%	31%	TdkTercapai
		6. <i>Cost recovery</i>	6. ≥40%	55%	100%	Tercapai
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat inap	8. ≤2 jam	100%	100%	Tercapai
		9. Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif) sesuai Kesepakatan waktu	9. 100%	100%	100%	Tercapai
17.	Ambulance dan Kereta/ Mobil Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance	1. 24jam	100%	100%	Tercapai
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit	2. ≤30menit	100%	100%	Tercapai
		3. Waktu pelayanan kereta/Mobil Jenazah	3. 24jam	24jam	100%	Tercapai
		4. Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4. ≤30menit	9.085	100%	Tercapai
18.	Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (respon setime) pelayanan Pemulasaraan jenazah	1. ≤ 2 Jam	0.76	100%	Tercapai
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	1. ≥80%	60.19	0%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu Pemeliharaan alat	2. 100%	52%	52%	Tdk Tercapai
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayan antarkalibrasi tepat waktu sesuai dengan	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		Ketentuan kalibrasi				
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian Linen yang hilang	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk Ruang rawat inap	2. 100%	85%	85%	Tdk Tercapai
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1. 75%	67%	89%	Tdk Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER- MENKES129/2008			
		2. Tersedia APD disetiap instalasi/departemen	2. 60%	75%	100%	Tercapai
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) dirs. (minimal1 parameter)	3. 75%	58%	64%	Tdk Tercapai

d. Alokasi Anggaran

1) APBD

Alokasi anggaran RSUD Prof.Dr. W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 sebesar Rp.313.683.672.965,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.55 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.104.229.175	213.263.436.529	97.33
a Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8.523.500	6.748.750	79.18
b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.048.070.000	109.105.219.054	98.25
c Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.996.986	36.354.600	84.55
d Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.424.638.460	3.190.187.353	93.15
f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	80.300.000	59.467.890	74.06
g Peningkatan Mutu BLUD	104.499.700.769	100.881.537.328	96.54
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.411.739.230	41.312.054.218	52.02
a Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	68.509.537.380	30.473.348.868	44.48
b Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	10.877.840.200	10.832.109.000	99.58

c	Penerbitan Izin Rumah sakit	24.361.650	6.596.350	27.08
	Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	15.167.704.020	10.098.233.785	66.58
a	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.090.319.020	10.084.017.785	66.82
b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	77.385.000	14.216.000	18.37

- e. **Dukungan Personil**
Sumber Daya Manusia.
- f. **Permasalahan dan Solusi:**

1) Permasalahan

Standar pelayanan minimal yang tidak tercapai sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative tindakan persalinan lain. Tenaga /SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat Kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib dan disiplinnya petugas administrasi ruang rawat inap untuk menyeter. Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yangberkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

2) Solusi

Untuk dianggarkan Pelatihan pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS dan pengadaan alat diagnostic canggih yang bersifat emergency.

2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator :

- i. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

- ii. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.56 Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	11,61%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiap Tahun Anggaran, sesuai denganPermendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayananPengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara Yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota	100%	-	Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bidang Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota mengalami refocusing anggaran sehingga dengan keterbatasan dan kemampuan anggaran yang ada maka pelaksanaan kegiatan hanya dapat diarahkan untuk membiayai paket-paket kegiatan Provinsi yang sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk penanganan Tahun 2021, anggaran yang tersedia hanya dapat diarahkan untuk membiayai pelaksanaan 3 paket perencanaan SPAM, yakni:

- a) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Flores (6 lokasi);
- b) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Sumba (3 lokasi); dan
- c) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Timor (4 lokasi) yang keluarannya adalah 3 Dokumen RISPAM.

Kegiatan penyusunan Dokumen RISPAM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota.

2) BLUD SPAM Provinsi NTT

Selain Bidang Cipta Karya, ada juga BLUD SPAM Provinsi yang juga melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya. Pada Tahun Anggaran 2021 BLUD SPAM Provinsi melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota sebanyak 364 Sr dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas

kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Untuk Wilayah Kabupaten Kupang yang terlayani adalah daerah sekitaran Matani dan untuk Wilayah Kota Kupang yang terlayani adalah PDAM Kupang, PT.Angkasa Pura, RS. Siloam, Undana, Politeknik, Politani dan Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Lama.

Sebagai gambaran, pencapaian indikator ini pada Tahun 2020 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUDSPAM Provinsi adalah:

$$\frac{1.642}{20.736} \times 100\% = 7,92\%$$

Formula Pengukurannya :

- $\sum$ Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota $\times 100\%$
- $\sum$ Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi.

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 364 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2021 diperoleh dari kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2021 ditambah dengan jumlah yang terlayani pada tahun sebelumnya dibagi dengan pemenuhan demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan', sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2021 adalah :

$$\frac{2.006}{17.280} \times 100\% = 11,61\%$$

Sumber Data : Data BLUDSPAM NTT

Dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sebanyak 2.006 SR dengan perkiraan 1 SR = 5 jiwa, maka dapat dihitung jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air



Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2021 adalah:

$$2.006 \times 5 = 10.030 \text{ jiwa}$$

Untuk pelayanan dasar Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapandan Pencapaian SPM ini.

c. Alokasi Anggaran

Tabel 2.57 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas	1. Bidang Cipta Karya. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
	Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.850.000.000,- BLUD SPAM Provinsi NTT: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.752.367.000,-

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik kregional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Tidak terdapat kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

d. Dukungan Personil

Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2021, sebagai berikut : Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.

- a) Refocusing anggaran menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota;
- b) Pelaksanaan refocusing anggaran mengakibatkan ketidakpastian pengalokasian anggaran yang

- tercantum dalam DPA. Perubahan DPA berdampak pula pada proses pelelangan kegiatan;
- c) Keterlambatan penerimaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - d) Sering terjadi kerusakan pada pompa sentrifugal (pompa air) karena usia pompa sudah mencapai 21 tahun pemakaian;
 - e) Terjadinya kerusakan pada pipa transmisi air baku dari Bendungan Tilong ke Bak Prasedimentasi akibat longsor saat Badai Seroja;
 - f) Terjadinya kerusakan pada pipa Distribusi Utama di Wilayah Jembatan Naimata akibat dari Badai Seroja;
 - g) Sering terjadi kerusakan pada gardu listrik di Tilong akibat kekurangan tegangan listrik saat memompa air (daya listrik rendah & tegangan listrik tidak stabil) baik di Tilong maupun di Tulun;
 - h) Belum adanya kerjasama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang.
- 2) Solusi
- a) Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bias diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia yakni Penyusunan RISPAM sebagai bagian dari upaya penyediaan dokumen rencana dalam rangka Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota;
 - b) Menunggu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terbaru untuk dilakukan koordinasi lanjutan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Mengejar progress pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa;
 - d) Telah melakukan penggantian pompa sentrifugal di Tilong pada Bulan Desember 2021, namun untuk pompa yang di Tulun belum Dilakukan penggantian;



- e) Telah dilakukan perbaikan dan pemasangan baru pipa transmisi di Tilong oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II pada Bulan Juni – Juli 2021;
- f) Telah dilakukan perbaikan kembali pipa distribusi utama di Jembatan Naimata oleh BLUD SPAM pada Bulan Agustus 2021;
- g) Telah dilakukan relokasi gardu listrik dan penambahan daya listrik di Tilong pada Bulan Desember 2021, sedangkan yang di Tulun masih belum dilakukan penambahan daya listrik;
- h) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor: 001/JB/BLUD-SPAM/I/2021 dan Nomor: 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/I/2021;
- i) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor: 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor: PK.11/PDAM/KAB-KPG/XI/2021.

2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator :

- 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- 2) Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.



b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.58 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket.
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni	100%	-	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang layak huni	100%	-	

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Provinsi.

Bencana alam adalah faktor yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadi sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah Kerusakan rumah akibat bencana.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan:

- a) Pada saat masa pasca bencana;
Bagaimana keadaan atau kondisi pada saat masa pasca bencana.
- b) Surat penetapan bencana dari Gubernur;
Harus ada Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan suatu Bencana sebagai bencana provinsi.
- c) Dampak bencana meliputi lebih dari1(satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota;

Suatu bencana baru dapat ditetapkan sebagai bencana provinsi apabila dampak dari bencana tersebut sudah mencakup 2 s.d 3 Kabupaten.

Terkait pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tidak terdapat Dana Tanggap Darurat atau Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi :

Untuk pelayanan dasar terkait Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

c. Alokasi Anggaran

Tabel 2.59 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Penyediaan dan RehabilitasiRumah yang Layak Huni bagikorbanbencanaProvinsi	Jumlah Warga Negarakorban bencana yangmemperoleh rumahlayak huni	tidak terdapat dana atau kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yang perlu dilaporkan dalam

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Laporan.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat berjumlah 30 orang.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan
 - a) Belum adanya Dana Tanggap Darurat di Bidang Perumahan dan Permukiman. Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.
 - b) Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.
- 2) Solusi
 - a) Koordinasi dengan instansi terkait.
 - b) Akan dimasukkan dalam Usulan Tahun berikutnya.

2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

I. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni:

- 1) Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.60 Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Penganganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi	100	95,71
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100	97,12

c. Alokasi Anggaran

1) APBD

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.253.059.780,- untuk mendukung Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT), dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung :Rp. 18.089.016.393,-
- Belanja Langsung : Rp. 1.164.043.387,-

2) APBN

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Sumber Dana Lain yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 92 orang pada 2 Bidang:

- 1) Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum (TRANTIBUM)
- 2) Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum ada kesadaran masyarakat terkait tempat/sarana prasarana milik pemerintah sehinggasering terjadi penerobosan terhadap hak milik pemerintah.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c) Aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat masih marak terjadi.

2) Solusi

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pendekatan dan sosialisasi atas tanah

milik pemerintah.

- b) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi unjuk rasa dan memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan untuk mencari solusi.

II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Jenis Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.61 Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan informasi rawan bencana	22 kabupaten/Kota	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22 kabupaten/Kota	27,7%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22 kabupaten/Kota	100%

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian SPM Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) Antara lain :

- **Belanja** =Rp. 8.597.804.656,-
 - Belanja Operasi =Rp. 8.397.606.416,-
 - Belanja Modal =Rp. 200.198.240,-

- **Biaya Tak Terduga** =Rp. 3.939.835.600,-
 - Covid-19 =Rp. 778.017.800,-
 - Seroja + Pusdalops =Rp. 1.886.124.300,-
 - Transisi =Rp. 1.275.693.500,-
- **Dana Siap Pakai (DSP)** =Rp. 2.000.000.000,-

1) APBN

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Sumber Dana Lainnya Yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. **Dukungan Personil**

Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam mendukung proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)di Provinsi NTT sebanyak 50 orang ASN pada BPBD Provinsi NTT.

e. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Data dan Informasi: Lambatnya penyampaian data dan informasi korban dan dampak bencana dari Kabupaten/Kota.
- b) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota.
- c) Terbatasnya jumlah pegawai, mengingat PUSDALOPS-PB harus diaktifkan 7 x 24 jam.

2) Solusi

- a) Meningkatkan Manajemen data dan informasi melalui kerjasama dengan SIAP SIAGA di Kabupaten

Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat.

- b) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas perangkat daerah, lintas instansi untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Kabupaten/Kota.
- c) Mengajukan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah untuk penambahan tenaga pegawai (telaahan no. tanggal)

2.2.3.6 Urusan Sosial

a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- 4) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.62 Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2021

No	SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar di dalam panti.	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100	100
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	100

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka pencapaian SPM tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- 1) APBD
- Alokasi dana APBD untuk pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.38.177.592.484,-,terdiridari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.19.971.666.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.205.926.484,-
- 2) APBN
- Alokasi dana APBN untuk pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 9.257.070.000,-, terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.9.257.070.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.0,-
- 3) Sumber Dana Lainnya Yang Sah
- Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial Provinsi yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 186 Orang terdiri dari:

- 1) Sekretariat : 38 orang
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
- 3) Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial : 16 orang
- 5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 19 orang
- 6) UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia : 24 orang
- 7) UPT Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar : 28 orang
- 8) UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Karya Wanita : 37 orang

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
 - b) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- 2) Solusi
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
 - b) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c) Perlu pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam Penanganan PMKS.

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Memperhatikan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu memalukan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu-isu memalukan tersebut dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44% atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,71 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 – 12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 20,0 % persen di Tahun 2021. Ini berarti rata-rata 2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 %, dengan PDRB (ADHB) per kapita mencapai Rp 20,58 juta, Namun, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69% pada tahun lalu serta masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi Covid-19 sebesar 6,12% pada 2019.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penopang terbesar perekonomian NTT dengan kontribusi sebesar 29,17% pada tahun lalu. Diikuti sector administrasi pemerintahan sebesar 13,41%, serta perdagangan besar dan eceran sebesar 11,48%.

Pada tahun 2021 ini, berbagai tantangan dan kendala seperti cuaca yang tidak menentu, penyakit ASF yang menyerang ternak babi, Covid-19 yang menyebabkan arus barang, jasa dan orang dihentikan sementara, termasuk dihentikannya berbagai proyek termasuk proyek pemerintah tentu akan semakin mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat belanja pemerintah yang dikarenakan oleh *refocussing* dan pemotongan dana transfer dari pusat.

4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,69 tahun pada 2021. RLS itu meningkat 1,05% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,55 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,54 tahun pada 2021. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,18 tahun pada 2020. Angkanya meningkat 0,23% dibandingkan pada 2019 yang mencapai 13,15 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Berbeda dengan RLS, HLS di NTT sudah lebih tinggi dari rata-ratanya secara nasional yang sebesar 12,98 tahun.
5. Infrastruktur yang masih belum memadai, karena itu kita akan selesaikan semua jalan provinsi hingga tahun 2023. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.



2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44 % atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 9,71 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target P RPJMD 2018-2023, dimana penduduk di bawah garis kemiskinan berkisar 15-12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyebaran status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah. Ini berarti rata-rata 2 sampai 3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

- a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,69 Tahun 2021. Ini hanya mencapai kelas 1 atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,54 tahun.
- b. Rendahnya Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa pandemik Covid-19 dan tatanan kehidupan baru.
- c. Rendahnya Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.
- d. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
- e. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
- f. Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada jenjang pendidikan dasar.

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
- b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
- c. Rendahnya SDM kesehatan.
- d. Masih tingginya angka stunting.
- e. Masih terjadinya perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
- f. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- g. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
- h. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
- i. Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagai “one stop service”.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya pemanfaatan 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019 (Liman, Wolwal, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di destinasi baru (Kelaba Madja, Fatunausus).

- b. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2021.
- c. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
- d. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
- e. Rendahnya kualitas DAS.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
- b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
- c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.

5. Perhubungan

- a. Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua.
- b. Terbatasnya sarana-prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-purpose.
- c. Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
- b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7. Pertanian dan Peternakan

- a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
- b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
- c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
- d. Belum tersedianya statistic ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8. Perikanan dan Kelautan

- a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata.



- b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.

9. Sosial

Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.

10. Tenaga Kerja

- a. Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata yang didatangkan dari Nusa Tenggara.
- b. Belum optimalnya Keikutsertaan pada program “working holiday”.

11. Kebencanaan

Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya BUMDES.
- b. Masih rendahnya kepemilikan Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha.
- c. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.
- d. Belum optimalnya tenaga pendamping desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
- c. Kurangnya penanganan sampah dan limbah B3.
- d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
- e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- f. Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
- g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
- h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).

14. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
- b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
- c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15. Perbatasan

- a. Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
- b. Rendahnya Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan terkait dengan pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

16. Penunjang

- a. Reformasi Birokrasi
Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender

2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih rendahnya pendapatan masyarakat
Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2021 sebesar 2,51% namun akibat pandemi Covid19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTT .
2. Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Dimana pada tahun 2019, Share Lapangan

Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 0,75%, Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB sebesar 2,20% dan Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB hanya sebesar 12,08%.

3. Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana persentase PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 masih rendah yaitu 23,90%.
4. Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2019 mencapai 64,10%.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2023. Selanjutnya hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan proyeksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lain yang sah, yang pada akhirnya berdampak pada kerangka pendanaan yaitu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2023.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2021.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2023.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 3,10% (yoy), lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan III 2021 hanya sebesar 2,36% (yoy) namun



pertumbuhan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 5,02% (yoy). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin membaik di Tahun 2023 berada di kisaran 3,47% - 4,97%.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian seperti pada Tabel 3.1. Lapangan Usaha Konstruksi di dorong oleh meningkatnya aktivitas konstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatnya investasi di Provinsi NTT dan belanja barang dan jasa. Sedangkan kinerja Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah pada Triwulan IV 2021 mengalami perbaikan setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan III 2021 sebesar 7,79% (yoy). Dengan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan telah mendorong aktivitas pariwisata dan kedatangan penumpang di Bandara El Tari dan Bandara Komodo serta bandara lokal lainnya yang berada di kabupaten lainnya.

Sedangkan, pada Triwulan IV 2021 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi NTT melambat dibandingkan dengan Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,18% (yoy). Hal ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan komoditas mete dan pengeluaran ternak besar khususnya sapi yang mengalami penurunan mencapai -12,04% (yoy) pada Triwulan IV 2021, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III yang tumbuh sebesar 17,63% (yoy).

Untuk akselerasi kinerja pertanian terutama didorong oleh curah hujan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021, telah mendorong produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) pada musim panen Triwulan I dan II dengan jumlah produksi padi tumbuh 64,93% (yoy) secara keseluruhan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkonstraksi sebesar 7,14% (yoy). Hal ini juga didorong oleh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi yaitu Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan) dengan luasan lahan sebesar 9.000 Ha dan pengembangan *food estate* di Kabupaten Sumba Tengah menjadi 9.740 Ha di tahun 2021 yang terdiri dari 5.400 Ha tanaman padi dan 4.340 Ha tanaman jagung.

Dengan demikian, struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 didominasi oleh empat Lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; serta Konstruksi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan struktur ekonomi pada tahun 2021, di mana Konstruksi kembali menggantikan Pendidikan yang menjadi peringkat keempat penyumbang PDRB Provinsi NTT.

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2020				2020	2021				2021	Pangsa Tahun 2021
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	-0,33	0,54	0,95	1,00	10,52	3,54	4,18	2,01	4,92	29,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,18	-12,59	-13,79	-15,70	-13,33	0,12	1,80	1,73	3,93	1,90	1,07
C	Industri Pengolahan	-3,28	-4,18	-7,17	-7,43	-5,54	-0,03	-8,29	-1,33	-1,77	-5,10	1,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,50	11,75	17,18	6,78	12,29	12,35	2,09	3,83	1,63	4,88	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,00	6,58	7,89	11,46	6,04	21,02	6,12	11,05	6,47	11,34	0,06
F	Konstruksi	-0,01	-10,50	-11,34	-15,84	-9,82	-5,91	5,21	15,48	13,06	7,01	18,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,64	-7,97	-10,70	-8,93	-5,06	-3,58	6,97	5,70	6,40	4,27	11,48
H	Transportasi dan Pengudangan	5,56	-23,36	-16,28	-13,43	-12,16	-14,81	16,45	7,35	5,09	2,47	4,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,33	-43,15	-33,62	-19,32	-26,32	-20,72	28,98	7,20	12,35	4,79	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	6,13	15,36	13,55	12,98	11,36	16,41	-8,13	0,65	8,93	2,79	7,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	12,32	7,16	13,15	8,57	11,54	6,47	0,29	-6,89	2,56	4,40
L	Real Estate	0,26	-5,58	-0,89	0,03	-1,54	-0,14	5,01	2,98	3,16	2,07	2,23
M	Jasa Perusahaan	0,87	-52,51	-53,35	-49,90	-39,27	-47,64	9,42	7,44	4,74	-14,67	0,15
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	6,23	5,59	1,66	4,61	-6,43	1,30	-7,79	-0,97	-3,45	13,41
P	Jasa Pendidikan	-0,13	-0,46	3,85	3,93	1,89	-4,89	5,06	-7,71	-1,84	-2,24	9,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,67	5,45	5,08	-0,38	4,38	0,12	5,45	14,65	15,06	9,02	2,98
RSTU	Jasa lainnya	4,63	-21,79	-21,63	-22,13	-15,30	-21,58	4,50	1,76	1,12	-3,34	1,69
PDRB		3,00	-1,97	-1,75	-2,27	-0,83	0,22	4,32	2,36	3,10	2,51	100,00

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Sedangkan kinerja investasi didukung oleh berlanjutnya Proyek Nasional seperti Pengembangan Bandar Udara Komodo, Pembangunan Bendungan Manikin dan Temef dan percepatan pembangunan infrastruktur Desitinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo di Tana Mori (Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya – Pulau Rinca) untuk mendukung kegiatan G-20 dan internasional *ASEAN Summit* pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi NTT, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi melakukan skema pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi nasional) sebesar lebih dari 1 Triliun dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dengan fokus pembangunan antara lain embung dan SPAM, rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT pada Triwulan IV Tahun 2021 terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2021 (*yoy*) berturut-turut adalah konsumsi sebesar 4,88% (*yoy*) dengan faktor pengaruh adalah penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19, penerapan PPKM didominasi Level 1 dan 2 dan permintaan yang meningkat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021/2022 serta kegiatan



vaksinasi menuju terbentuknya *herd immunity* dengan pencapaian Vaksinasi I sebesar 70,04% dan Vaksin II sebesar 35,16% pada kondisi Triwulan IV Tahun 2021.

Kinerja investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi NTT. Kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2021 membaik yang didorong oleh percepatan realisasi belanja barang dan jasa dari Pinjaman PT. SMI dan Bank NTT, percepatan ekspor dan pertumbuhan ekspor ke Vietnam dan Timor Leste yang mencapai 62,10% (yoy) dan 145,04% (yoy) pada ke dua negara tersebut.

Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga yang terakselerasi pada triwulan IV 2021 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan ditopang oleh berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,64% (yoy). Faktor utama pemulihan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat dimana kasus Covid-19 di Provinsi NTT yang semakin terkendali. Dampaknya juga terjadi pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada bulan Agustus 2021 menjadi 3,77%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 sebesar 4,28%. Sedangkan kinerja belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (yoy) dimana realisasi APBD dan APBN pada Triwulan IV 2021 sebesar 26,91% (yoy) meningkat 17,72% (yoy) dari Triwulan III.

Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat.

Untuk Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan



tahun sebelumnya karena tingkat keyakinan masyarakat semakin membaik pasca Covid-19. Negara dengan kontribusi realisasi PMA terbesar sepanjang tahun 2021 adalah Singapura (57,72%) dan Qatar (20,56%).

Berikut Tabel 3.2 tentang Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan pengeluaran. Dimana secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT sebesar 2,51% (yoy) yang bersumber dari perbaikan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2020				2020	2021				2021	Pangsa Tahun 2021	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,41	-4,40	-2,38	-3,88	-1,64	-3,26	3,30	1,53	4,88	1,58	▲	69,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,72	-13,10	1,22	-1,06	-4,04	-1,24	11,79	1,16	14,92	6,61	▲	3,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,28	-11,49	-15,95	-8,13	-9,64	-14,81	12,57	-16,37	2,09	-3,49	▲	24,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,57	-8,33	-9,06	-14,49	-8,37	-4,61	3,64	8,42	10,95	4,79	▲	46,57
5. Perubahan Inventori	17,96	7,01	8,35	5,21	9,31	2,27	-1,23	1,26	1,86	1,02	▼	1,04
6. Ekspor	-13,60	-51,37	-42,93	-27,19	-34,73	-36,06	-19,03	-4,98	-2,49	-15,56	▲	5,46
7. Impor	0,89	-21,79	-19,04	-18,15	-15,59	-18,54	3,93	-3,07	10,30	-1,20	▲	-50,55
8. Net Ekspor	3,16	-16,21	-15,66	-16,86	-12,56	-16,01	6,43	-2,89	11,90	0,49	▲	-45,08
PDRB	3,00	-1,97	-1,75	-2,27	-0,83	0,22	4,32	2,36	3,10	2,51	▲	100,00

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Percepatan pembangunan Infrastruktur juga terjadi melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan fokus utama tahun 2021 adalah pembangunan Embung 22 buah, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan provinsi utama tambahan.

Kemudian, Kinerja net ekspor Provinsi NTT pada triwulan laporan 2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,90% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,89% (yoy). Ekspor luar negeri Provinsi NTT bersumber dari komoditas buah – buahan, komoditas biji-bijian berminyak, dan garam dengan negara tujuan yaitu Timor Leste, Vietnam dan Tiongkok. Sedangkan nilai impor bersumber dari gula dan kembang gula dengan pangsa sebesar 89,14% yang berasal dari India dan Timor Leste.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Administrasi Pemerintah, Perdagangan dan Konstruksi. Kemudian Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh dimana dengan curah hujan yang cukup bagus mendukung produksi padi dan jagung, serta

penanganan Virus *African Swine Fever (ASF)* pada ternak babi yang semakin baik. Untuk sektor pertanian dengan adanya Program Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak dan adanya dukungan pelaksanaan pengembangan *food estate* di Kabupaten Sumba Tengah dan Belu akan berdampak pada kinerja Lapangan Usaha Pertanian pada tahun 2022.

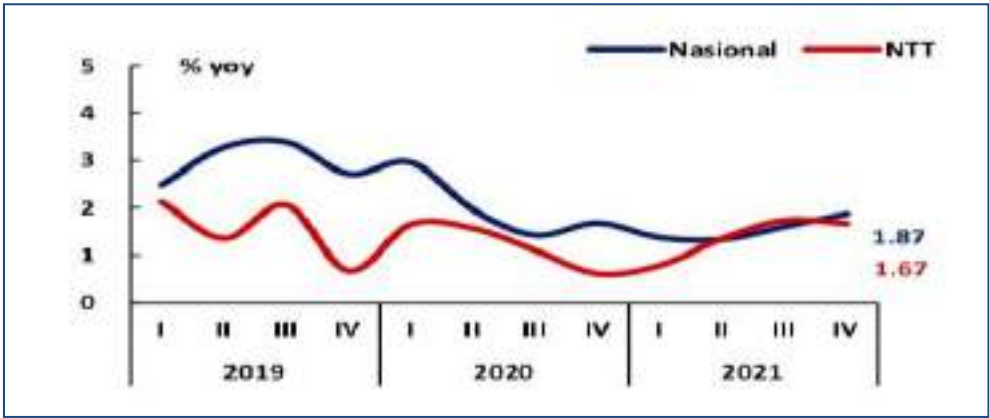
Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Sedangkan untuk target Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % (dalam kondisi moderat), diharapkan melalui konsep penggiatan ekonomi lokal dan pengembangan potensi lokal melalui konsep pemberdayaan dengan mendorong kemandirian UMKM dan mendorong munculnya pelaku usaha baru.

3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan III sebesar 1,74% (yoy) maupun inflasi secara nasional sebesar 1,87% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir sebesar 1,45% (average yoy). Secara spasial, inflasi kota Kupang sebesar 1,86% (yoy), inflasi kota Maumere sebesar 0,55% (yoy), dan inflasi kota Waingapu sebesar 1,28% (yoy) seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provinsi NTT dan Nasional



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Tekanan inflasi Triwulan IV 2021 ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan dalam Kota Kupang, harga daging babi, kenaikan harga minyak dan kenaikan tarif angkutan udara karena mobilitas masyarakat, jasa rawat jalan seperti tariff bidan dan biaya KB, normalisasi harga obat-obatan pasca Covid-19 dan tarif dokter spesialis, upah asisten rumah tangga, kenaikan harga sabun cuci/piring dan furniture akibat daya beli masyarakat semakin membaik pasca Covid-19.

Adapun, kelompok komoditas yang sangat berkontribusi mempengaruhi inflasi antara lain transportasi (4,16% yoy); penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,91% yoy); kesehatan (1,77% yoy); makanan, minuman dan tembakau (1,73% yoy); perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT (1,38% yoy); dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar (1,30% yoy) seperti pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas	(% mtn)			(% yoy)			Andil (% yoy)
	Okt '21	Nov '21	Des '21	Tw IV '20	Tw III '21	Tw IV '21	Tw IV '21
Inflasi Umum	-0.13	0.49	0.89	0.61	1.74	1.67	1.67
Makanan, Minuman & Tembakau	-0.29	0.72	0.79	2.87	4.45	1.73	0.58
Pakaian & Alas Kaki	0.04	0.17	0.05	-0.47	-1.43	-0.39	-0.02
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0.07	0.00	0.21	-0.27	1.24	1.30	0.23
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0.12	0.24	0.32	0.60	1.07	1.38	0.07
Kesehatan	0.04	0.45	1.16	6.39	1.44	1.77	0.03
Transportasi	0.03	1.37	3.32	-4.66	0.40	4.16	0.55
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.08	0.01	-0.15	-2.04	-0.05	0.45	0.02
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0.09	0.01	0.51	-0.12	0.56	0.63	0.01
Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.62	0.93	0.67	0.02
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0.00	0.00	1.47	1.60	0.52	1.91	0.11
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-0.34	0.67	0.43	4.06	-0.80	0.92	0.06

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Adapun pengendalian dilakukan khususnya pada komoditas – komoditas bahan makanan penyumbang terjadi inflasi seperti minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula pasir, Lombok, telur dan ayam. Selain itu juga mendorong supply kebutuhan pokok dengan komoditi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dari supply luar daerah. Sehingga laju inflasi dan target pada Tahun 2023 dapat mendekati sekitar 3 - 3.2 %.



3.1.3 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 20,44% atau sejumlah 1,146 juta orang, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21% (1,173 juta orang). Di tingkat Nasional kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,71% (26,50 juta orang) dari sebelumnya 10,19% (27,55 juta orang) pada September 2020.

Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (27,38%) dan Papua Barat (21,82%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir tren penurunan kemiskinan di Provinsi NTT sangat terlihat jelas, akan tetapi dengan adanya pandemic Covid-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 92.941,- (21,24 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan.

Untuk Target Tahun 2023, pengurangan angka kemiskinan diharapkan minimal sekitar 19,75-16,66 % (target moderat) dan 15-12% (kondisi optimis). Target penurunan ini didasarkan pada kondisi tren tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir dan diakibatkan dengan kondisi pandemic covid. Namun tetap diarahkan untuk dapat mencapai target akhir periode RPJMD Perubahan yaitu sebesar 15-12%. Upaya pengentasan kemiskinan di dorong untuk memprioritaskan lokasi kantong-kantong kemiskinan melalui pelaksanaan program kolaboratif berupa pemberdayaan ekonomi berbasis sector unggulan daerah, selain itu juga mengurangi beban pengeluaran, penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor pemerintah daerah dan swasta lokal.



3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT pada Agustus 2021 sebesar 3,77%, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan TPT terendah (3,77%) tercatat lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Penduduk Provinsi NTT yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 50% dari total penduduk yang bekerja. Dengan mayoritas pekerja di Provinsi NTT merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Dimana, pekerjaan di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja yang mendominasi lima tahun terakhir. Pada Agustus 2021, tercatat sebanyak 2,13 juta orang atau 75,97% dari total penduduk yang bekerja pada kegiatan informal. Jumlah ini menurun sebesar 0,13% dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 2,07 juta orang atau 76,10%.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76%. Karena penduduk yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua di Kabupaten Belu sebesar 5,35%. Sedangkan, tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Nagekeo yang sebesar 0,97%.

Berikut perbandingan TPT per kabupaten/kota se NTT seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Grafik Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Proyeksi TPT Tahu 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % (kondisi optimis) dengan arah penanganan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk angkatan kerja untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan.

3.1.5 Ratio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT membaik, dimana rasio gini tercatat 0,339 pada September 2021, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,356. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional dengan rasio gini sebesar 0,381.

Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer pemerintah pusat.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 yang memperlihatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN	97,37	96,28	92,84	90,32
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,44	93,54	79,59	74,04
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	104,62	95,08	89,60	72,14
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	100,27	86,92	33,56	68,42
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98,57	85,93	46,02	100,39
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	79,90	91,97	75,44	79,96
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	96,87	97,46	97,61	96,99
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	96,87	97,46	97,61	96,99
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,78	66,04	83,22	87,23
4.3.1.	Pendapatan Hibah	26,58	66,04	83,22	87,23

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 4.781.089.962.593,22 dengan tingkat prosentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 atau 92,84 dan pada tahun 2021 realisasi Pendapatan menjadi Rp. 5.312.446.872.608,51 atau hanya sebesar 90,32%.

3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsiasumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:



Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2017	4.700.213.492.589,51	
2018	4.781.089.962.593,22	1,72
2019	5.354.092.405.679,30	11,98
2020	5.419.935.156.637,49	1,23
2021	5.312.446.872.608,51	-1,98
Rata-Rata Pertumbuhan		3,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan sangat mempengaruhi perhitungan rata-rata ini, namun perlu dilihat lagi dengan kondisi pandemic dan proses pemulihan ekonomi serta kondisi ekonomi daerah. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,51	1.047.491.567.026,51	22,29
2018	4.781.089.962.593,22	1.095.269.978.577,22	22,91
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,51
2020	5.419.935.156.637,49	1.166.570.596.936,49	21,52
2021	5.312.446.872.608,51	1.238.032.648.888,51	23,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Dilihat dari tabel di atas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proporsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sedikit meningkat di Tahun 2021. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.7 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,51	
2018	1.095.269.978.577,22	4,56
2019	1.258.958.953.288,30	14,95
2020	1.166.570.596.936,49	-7,34
2021	1.238.032.648.888,51	6,13
Rata-Rata Pertumbuhan		4,57

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Untuk Belanja Daerah pada tahun 2021 realisasinya mencapai 80,06% atau sebesar Rp. 5.508.767.906.132,69.- dimana belanja operasi memiliki porsi paling besar. Realisasi belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja operasi dan modal relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang sinkron dengan penganggaran khususnya standar harga dan pagu indikatif. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8, Proporsi Belanja pada Tabel 3.9 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.10.



Tabel 3.8 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018 – 2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	93,38	91,47	90,69	80,06
5.1.	BELANJA OPERASI	94,17	93,88	93,36	92,39
5.1.1.	Belanja Pegawai	97,80	94,36	91,85	96,10
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	91,90	89,28	96,40	89,79
5.1.3.	Belanja Bunga				58,28
5.1.5.	Belanja Hibah	92,67	97,89	92,92	90,93
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	99,75	99,33	87,32	99,47
5.2.	BELANJA MODAL	92,77	80,37	83,44	48,62
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	72,78	100,00	0,00	14,58
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,61	86,44	96,48	91,41
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93,57	95,92	97,95	60,54
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,41	83,36	75,52	40,31
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86,37	47,79	83,01	94,34
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	3,43	11,74	85,26	88,45
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	3,43	11,74	85,26	88,45
5.4	TRANSFER	88,10	94,75	88,66	86,29
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	88,01	94,73	88,55	86,08
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	100,00	99,69	100,00	95,69

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.

Tabel 3.9 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018 - 2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	100	100	100	100
5.1.	BELANJA OPERASI	80,17	75,02	69,89	73,74
5.1.1.	Belanja Pegawai	26,82	27,34	25,10	29,20
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19,67	22,64	21,23	19,57
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,10	0,32
KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.1.5.	Belanja Hibah	33,24	24,47	23,10	24,46
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,44	0,56	0,36	0,19
5.2.	BELANJA MODAL	10,93	15,13	17,84	16,40
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,02	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,21	2,21	3,51	3,37
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,41	2,64	3,09	2,46
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,21	8,95	8,77	10,39
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,09	1,33	2,46	0,17
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,03	4,19	2,46
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,03	4,19	2,46
5.4	TRANSFER	8,90	9,83	8,08	7,40
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	8,82	9,78	8,00	7,22
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	0,08	0,05	0,09	0,18

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.



Tabel 3.10 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2021

Tahun Anggaran	Belanja Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2018	4.846.839.267.377,67	
2019	5.277.064.650.987,30	8,88
2020	5.755.258.016.193,64	9,06
2021	5.508.767.906.132,69	-4,28
Rata-Rata Pertumbuhan		3,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic Covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid 19, dan akselelerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % (dalam kondisi moderat).
2. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. menurun jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,28%. Jumlah angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dari Agustus Tahun 2020 yang hanya 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penamnanan jumlah penduduk dimana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 Juta orang. Berdasarkan jenis kelamin ternyata angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % (kondisi optimis).
3. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika



dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.

4. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020 serta 23,30 pada TA. 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 4,920 Trilyun lebih, berkurang Rp. 142 Miliar lebih atau -2,82% dari anggaran induk tahun 2022 sebesar Rp. 5,063 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD diprediksi menjadi sebesar Rp. 1,702 Triliun lebih, turun Rp. 221,490 Milyar lebih atau -11,52 %. Kenaikan terjadi dari komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 68,250 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 25,166 Milyar lebih atau 58,41 % dari anggaran tahun 2022, Lain-lain PAD yang sah ditargetkan 220,693 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 10.332 Milyar lebih atau 4,91%. Sedangkan Pajak Daerah turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,486 Triliun lebih menjadi 1,333 Triliun lebih. Retribusi Daerah juga turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 184,327 Milyar menjadi Rp 80,199 Milyar lebih.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diprediksikan naik sebesar Rp 78,343 Milyar lebih atau 2,5% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3,133 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 3,212 Triliun lebih.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah diprediksi naik sebesar Rp 154 Juta lebih, atau 2,50% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6,196 Milyar lebih menjadi Rp 6,351 milyar lebih.



Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PENDAPATAN	4.507.833.810.597	5.354.092.405.679	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609	5.063.892.995.871	5.985.525.009.868	5.171.608.213.821
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.092.895.995.481	1.258.958.953.288	1.166.570.596.936	1.238.032.648.889	1.923.953.268.545	2.531.591.309.810	1.872.709.037.800
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	866.157.779.773	908.207.117.663	924.189.837.048	925.862.559.388	1.486.181.102.224	1.932.035.432.917	1.466.651.437.466
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.570.244.733	60.831.986.435	34.959.171.078	69.890.857.732	184.327.767.233	258.058.874.126	88.219.602.715
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.415.455.930	70.662.452.308	65.135.467.630	64.982.172.050	43.083.127.863	60.316.379.008	75.075.000.000
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	126.752.515.045	219.257.396.882	142.286.121.181	177.297.059.718	210.361.271.225	281.180.623.758	242.762.997.619
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.171.362.593.723	4.000.655.446.445	3.133.743.302.000	3.447.117.632.200	3.292.389.056.664
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445	3.133.743.302.000	3.447.117.632.200	3.292.389.056.664
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			19.323.366.000		-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275	6.196.425.326	6.816.067.859	6.510.119.358
3.1	Pendapatan Hibah	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275	6.196.425.326	6.816.067.859	6.510.119.358

Sumber : Badan Keuangan Daerah



Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3 Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4 Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah.
- 5 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- 6 Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 7 Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
- 8 Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
- 9 Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 10 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
- 11 Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
- 12 Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023:

- 1 Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 2 Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
- 3 Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya.
- 4 Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.
- 5 Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah.
- 6 Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.



Belanja Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023;
 - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - e. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f. Kerjasama antar pemerintah daerah;
 - g. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2023;
 - h. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian- penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.



Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Belanja Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Target 2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
5.	BELANJA	4.846.839.267.378	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133	5.595.612.615.524	5.593.190.664.883	4.777.292.091.487
5.1.	BELANJA OPERASI	3.885.700.364.571	3.958.664.698.490	4.022.397.290.093	4.061.962.995.626	3.618.530.670.704	3.954.759.889.805	3.618.530.670.704
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.299.772.084.613	1.442.966.171.685	1.444.646.968.075	1.608.464.234.033	1.736.539.785.862	1.892.828.366.590	1.736.539.785.862
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.324.710.208	1.194.831.892.392	1.221.574.013.528	1.078.288.386.249	1.517.136.645.797	1.668.850.310.377	1.517.136.645.797
5.1.3.	Belanja Bunga			5.875.483.690	17.483.698.422	82.584.501.105	82.584.501.105	82.584.501.105
5.1.5.	Belanja Hibah	1.611.082.006.586	1.291.513.467.414	1.329.334.450.800	1.347.483.386.922	239.507.389.940	263.458.128.934	239.507.389.940
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.521.563.164	29.353.167.000	20.966.374.000	10.243.290.000	42.762.348.000	47.038.582.800	42.762.348.000
5.2.	BELANJA MODAL	529.761.034.603	798.224.255.845	1.026.785.278.415	903.257.622.800	1.324.558.691.975	947.805.603.287	468.199.298.776
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	852.255.000	30.000.000		147.952.000	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.493.090.879	116.636.579.503	202.160.307.478	185.901.613.833	139.502.962.647	118.577.518.250	34.955.796.293
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.802.530.521	139.208.422.686	177.836.474.130	135.344.543.385	194.663.982.540	165.464.385.159	145.997.986.905
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.448.197.953	472.361.496.339	504.964.198.116	572.412.496.697	989.516.835.788	662.976.279.978	287.158.024.478
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.164.960.250	69.987.757.317	141.824.298.691	9.451.016.885	874.911.000	787.419.900	87.491.100
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685	32.355.619.337	32.418.669.121	32.355.619.337
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685	32.355.619.337	32.418.669.121	32.355.619.337
5.4	TRANSFER	431.252.682.900	518.685.087.892	465.136.531.812	407.772.251.022	620.167.633.508	658.206.502.670	658.206.502.670
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	427.541.748.500	515.982.681.892	460.136.531.812	397.772.251.022	602.238.993.608	640.277.862.770	640.277.862.770
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	3.710.934.400	2.702.406.000	5.000.000.000	10.000.000.000	17.928.639.900	17.928.639.900	17.928.639.900

Sumber : Badan Keuangan Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SIPLA tahun berjalan diproyeksikan nol.
- b. Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/ Lembaga/Bank Daerah lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pembayaran kembali pinjaman daerah

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2023 dengan menggunakan skema pinjaman daerah.

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Penerimaan Pembiayaan	277.894.564.023	216.350.973.250	430.706.217.941	503.023.089.715
Pengeluaran Pembiayaan	-	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564
Pembiayaan Netto	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(61.110.892.757)	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2021, diolah



**Tabel 3.14. Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2022-2024**

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
6	PEMBIAYAAN			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.226.807.790	35,402,287,820	35,402,287,820
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	135.237.297.415	31,242,555,821	31,242,555,821
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	752.829.778.376	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4,159,731,999	4.159.731.999
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	427,736,632,805	427,736,632,805
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	121,010,778,472	121,010,778,472	121,010,778,472
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41.020.555.352	108,250,000,000	108,250,000,000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198,475,854,333	198,475,854,333
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	531.719.619.633	(392,334,344,985)	(392,334,344,985)
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan juga implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 untuk tahun rencana 2023.

4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN P-RPJMD 2018-2023

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

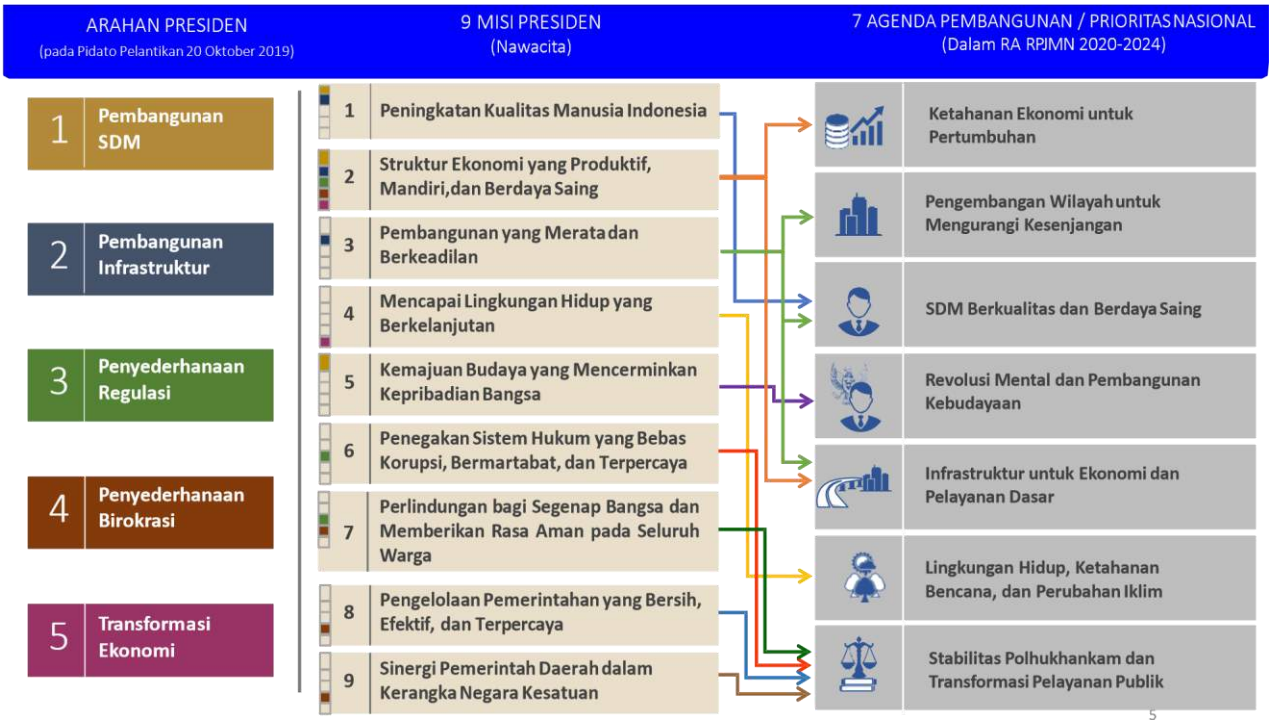
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/>

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN (2022)	RPJMD-P (2022)	RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RKP 2023	RKPD 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5,7-6,0	6,7-7,3	5,4-5,9	3,47-4,97	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan	Persen	16,15	19,35-16,15	7,0-7,5	15-12	15,56-16,50	19,75-16,66	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,6	2,5 - 1,9	4,0-4,6	1,9-1,5	2,92-3,30	3,03	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	80,94	-	80,94	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 -0,378	0,34-0,33	0,374-0,377	0,34-0,32	-	0,345	0,360-0,374
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,44 -73,48	67,35- 69,00	74,77	70-71	-	65,73	75,54
Penurunan Emisi GRK	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829 (tCO2eq)	26,80	17.248.829 (tCO2eq)	-	17.248.829 (tCO2eq)	27,3

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri pangan dan tembaka.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1 Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
 - a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
 - c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
 - d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
 - e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.

- 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:
 - a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
 - c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
 - d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
 - e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
 - f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
 - g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - h. pengembangan kawasan perkotaan;
 - i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
 - k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
 - c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.

- 4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:
 - a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
 - b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
 - c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
 - e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 1

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2021

4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Visi dimaksud dalam arahan periode ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan untuk penuntasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.

Arahan RPJPD untuk periode ke-empat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

- 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera



Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT

Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.634.144	1.634.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135



INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Indikator	Capaian NTT		Target RPJMD -P NTT		
	2020 (Baseline)	2021	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,83	5,87 - 6,50	6,33 - 6,90	6,7 - 7,3
PDRB per Kapita (Rp.juta)	19,5	12,41 (ADHK) 19,22 (ADHB)	20 - 23	23 - 25	25 - 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,19	65,54 - 67,00	67,35 - 69,00	70 - 71
Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21,21	21 - 19,63	19,35 -16,15	15 - 12
Inflasi (%)	0,67	0,61	3 - 3,4	3 - 3,2	3 - 3,2
Tingkat Stunting (%)	27,9	24,1 (agust, 2020)	21,8	16,7	12-10
Indeks Gini (poin)	0,355	0,356	0,35 - 0,34	0,34 - 0,33	0,34 - 0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,2 - 2,6	2,5 - 1,9	1,9 - 1,5
Rasio PAD (%)	23,9	21,52	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	10.048.289	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	60,37	65	69	71

Sumber : Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V dan Olahan.

Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023.

Tabel 4.6 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil				
Mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	6,7 - 7,3
		Inflasi	%	3 - 3,2
		PDRB per Kapita	Rp. Juta	25 - 27
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	%	15 -12
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,85
		Indeks kedalaman kemiskinan	Poin	3,40
	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,9-1,5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,76
		Produktivitas Total Daerah	Rp. juta	50,360
		Cakupan pekerja tanpa upah dibandingkan penduduk yang bekerja	%	21,02
Mewujudkan NTT yang Maju dan Mandiri	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	% PAD terhadap pendapatan daerah	%	39,74
	Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional	Rasio ekspor-impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	63,10
	Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat	Rasio ketegantungan	%	62,08
Mewujudkan NTT yang Berkeadilan Sosial	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	71
	Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	Indeks Gini	Poin	0,34 - 0,32
	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	poin	95
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	74,76
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	100
		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi 2 : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Pintu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)				
Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A dengan pendekatan kawasan	Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,78
		Share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,45
		Share lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	12,23
		Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah Wisata	%	8
		Lama tinggal wisatawan	hari	4
		Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.634.144
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan				
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	100
		Dwelling Time Pelabuhan	hari	3
		Cakupan pelayanan angkutan darat	%	74,81
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunnya jaringan irigasi bagi petani	%	78,46
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Penambahan rumah layak huni	Unit	9.238
Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan	Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	100
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	100
		Rasio elektrifikasi	%	85
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75
	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Jumlah emisi gas rumah kaca	Ton CO2	17.248.829
	Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	%	100
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks resiko bencana	Poin	135

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan Berdaya Saing	Angka melek huruf	%	100
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,5
		Harapan lama sekolah	Tahun	15
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia harapan hidup	Tahun	69
		Prevalensi stunting	%	10-12
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dan keolahragaan	%	80
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Mewujudkan birokrasi yang profesionalisme dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks reformasi birokrasi pemerintah	Poin	71
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,7
		Tingkat keterbukaan informasi publik	%	75
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	90
		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	83

Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V Tabel 5.5

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. Tema Pembangunan 2023

4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

RKP 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. Akan tetapi pandemi virus covid-19 yang masih terus berlangsung maka tetap menitikberatkan pada pemulihan Kesehatan dan ekonomi yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Namun kembali bangkit Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario *business as usual (BAU)*, pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca Covid-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang.

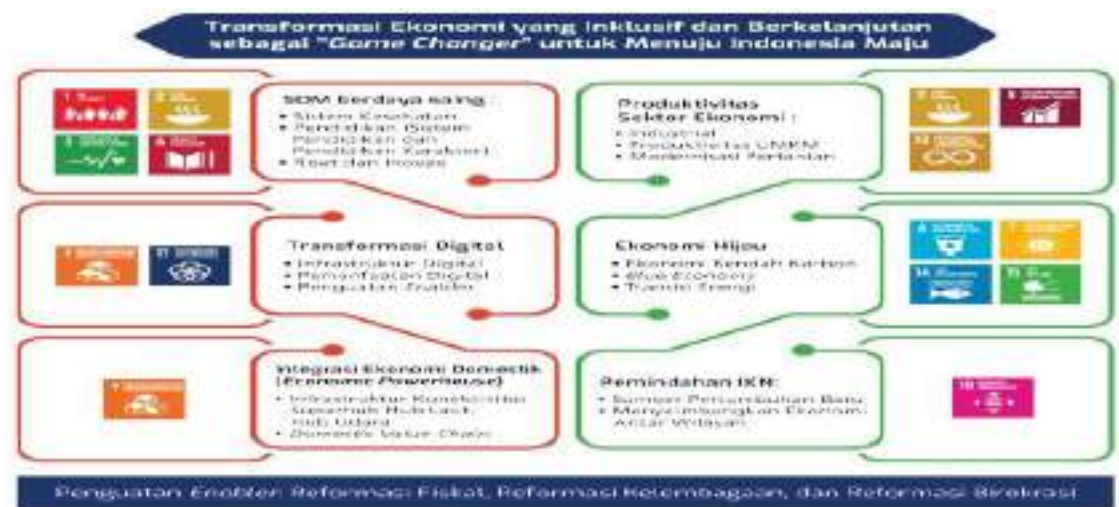
Pasca pandemi Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelligence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, pemerintah melalui kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk melakukan transformasi utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level minimal sama dengan kondisi sebelum pandemi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas ekonomi tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 4.4 Tansformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar 4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.6 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan Strategi tahun 2023, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2023
 - a Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b Peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan;
 - c Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;

- d Mendorong pemulihan dunia usaha;
- e Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- f Pembangunan Rendah karbon dan transisi ekonomi (respon terhadap perubahan iklim);
- g Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
- h Pengembangan Ibu Kota Negara.

2. Strategi Pembangunan Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Gambar 4.7 Strategi Pembangunan Tahun 2023



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

3. Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN. 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
- PN. 7 Transformasi Pelayanan Publik

4. Sasaran Prioritas Nasional 2023

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

a Sasaran PN 1

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, dan (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

b Sasaran PN 2

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 - 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) Indeks Pembangunan Manusia di KBI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
- c Sasaran PN 3
- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains) (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah.
 - 4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

d Sasaran PN 4

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

e Sasaran PN 5

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

f Sasaran PN 6

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) ;

- 2) Berkurangnya kerugian akibat bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

g Sasaran PN 7

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional; dan
- 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Pencapaian tujuh PN di atas di dukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh) proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni:

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
2. Pengelolaan Terpadu UMKM;
3. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
4. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
5. Destinasi Pariwisata Prioritas;

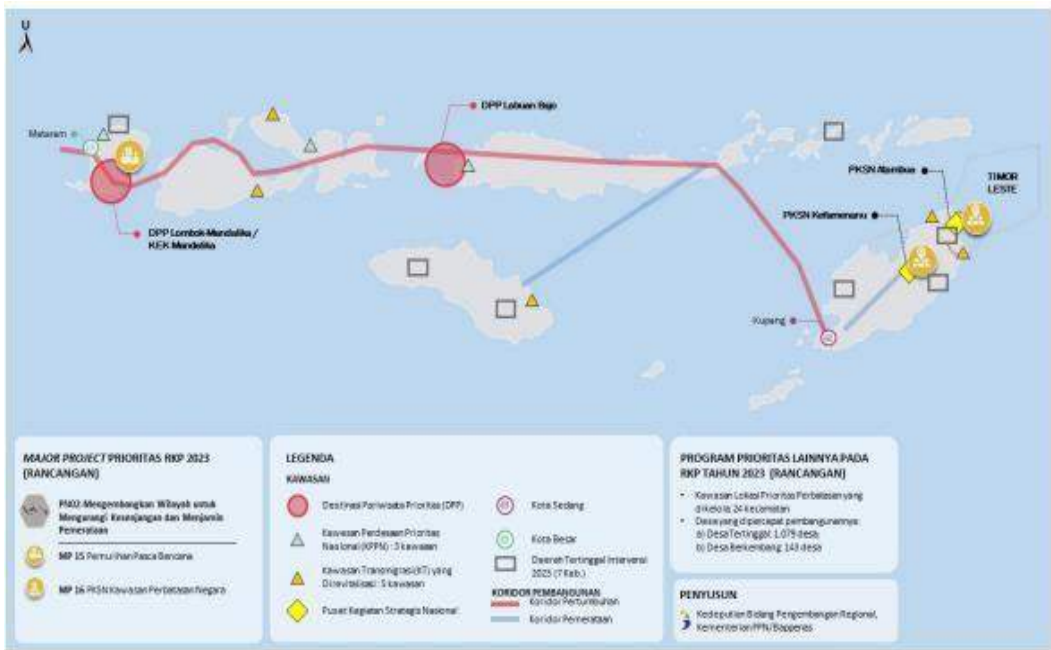
- 6. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
- 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- 9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- 10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
- 11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
- 12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
- 13. Transformasi Digital; dan
- 14. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Wilayah Nusa Tenggara Timur .

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Peta pembangunan wilayah Nusa Tenggara



Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan di dukung dengan lima KP sebagai berikut:

- 1 Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada **DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2 Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas **kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya** yang berlokasi di **Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pengembangan **perikanan tangkap** yang berlokasi di **Provinsi Nusa Tenggara Timur**;
- 3 Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan **Kota Sedang (Kupang)**;
- 4 Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya **PKSN Atambua di Kabupaten Belu** dan **PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara**, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan **3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur)**; 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, **KPPN Manggarai Barat**, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 (tujuh) kabupaten di tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Daerah tertinggal di kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*
Nusa Tenggara Timur	Malaka*, Sumba Timur*, Lembata*, Kupang*, Belu*, Sumba Barat*, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.
Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

- 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Sedangkan, Tujuh Prioritas Nasional dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 :

Tabel 4.8 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT

INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET 2021	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,83	5,01 - 6,13	5,67 - 6,34
Angka Kemiskinan (%)	21,21% (sept 2020)	21	20,16
Tingkat Pengangguran (%)	4,28%	5	3,41 - 4,14

4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2023 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021 serta memperhatikan RKP 2023.

Gambar 4.9 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD



Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema **“Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows funtion*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada

dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.

Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2023

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD).

Enam prioritas daerah untuk tahun 2023, yaitu :

Prioritas Pertama	:	Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat;
Prioritas Kedua	:	Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
Prioritas Ketiga	:	Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
Prioritas Keempat	:	Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
Prioritas Kelima	:	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi;
Prioritas Keenam	:	Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.



Enam Prioritas Daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut :

1. PD 1 : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat :
 - a. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata dan peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).
2. PD 2 : Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif :
 - a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
 - b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).
 - c. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).
 - d. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).

3. PD 3 : Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
 - a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Indikator yang di dukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah dan peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata).
 - b. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan penurunan desa rawan pangan).
 - c. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
4. PD 4 : Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
 - a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
 - b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).
 - c. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan

- kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).
- d. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).
5. PD 5 : Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi, mendukung Prioritas Nasional (PN):
 - a. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).
 - b. PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).
 6. PD 6 : Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana, mendukung Prioritas Nasional (PN):

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

Dalam rangka mendukung pencapaian target P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya pada Tahun 2023, maka analisis mengenai fakta, isu strategis dan rekomendasi yang akan mendukung pencapaian target Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta

- a. Potensi besar pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya namun belum dikembangkan secara optimal;
- b. Merupakan daerah berciri kepulauan dengan infrastruktur/ transportasi publik dan konektivitas yang belum optimal;
- c. Memiliki Potensi sumber energi panas bumi, panas matahari, angin, dan arus laut;
- d. Sebagian kabupaten merupakan daerah tertinggal, pemenuhan SPM masih rendah, dengan tingkat kemiskinan dan stunting masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrim;
- e. Perekonomian masih bergantung dari luar NTT dan tingkat konsumsi tinggi, Kurang memproduksi produk akhir, ICOR masih tinggi; dan
- f. Kapasitas SDM dan kelembagaan research belum optimal.

2. Isu Strategis/Masalah

- a. Pengembangan rantai nilai pariwisata dan 5 peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata melalui hilirisasi komoditas unggulan;
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana perasarana Pendidikan serta Kesehatan untuk peningkatan SDM lokal serta pengentasan kemiskinan dan stunting;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi;
- d. Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- e. Masih tingginya tingkat kerawanan pangan akses terhadap pangan termasuk pengembangan sistem pangan;
- f. Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, serangan hama dan virus (tanaman dan hewan), serta tsunami, dan gempa bumi); dan
- g. Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.

3. Rekomendasi

- a. Mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber EBT khususnya di Pulau Sumba melalui dukungan dari Pemerintah Pusat;

- c. Menjaga kualitas jalan Provinsi, Peningkatan Infrastruktur SDA, bandara, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan yang potensial untuk mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi;
- d. Meningkatkan Kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) melalui penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas;
- e. Mengembangkan kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi, untuk dapat memenuhi ke butuhan antar daerah dari dalam wilayah NTT sendiri;
- f. Meningkatkan Ketahanan Bencana, mitigasi perubahan iklim dan Gas Rumah Kaca.

Dengan demikian, sesuai dengan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada Tahun 2023, sebagaimana yang tertuang di dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2008 - 2023 dapat terlihat pada Tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Indikator per Misi	Target P-RPJMD Tahun 2023
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,7- 7,3
Inflasi (%)	3,0 - 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	15 - 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	25 - 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 - 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
Rasio Elektrifikasi (%)	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ²)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	135

Indikator per Misi	Target P-RPJMD Tahun 2023
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Angka Melek Huruf (%)	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69
Prevelensi Stunting (%)	10 - 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	71
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	83

Sumber: Bab VIII P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Tabel 8.1 Hal.VIII-2

Dengan target pencapaian Indikator Makro Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10 Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKP Tahun 2023		Target Provinsi NTT Tahun 2023	
			Wilayah Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 - 5,7	5,4 - 5,9	6,7 - 7,3	3,47 - 4,97
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,8 - 13,8	16,50 - 15,56	15 - 12	19,75 - 16,66
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,1 - 2,7	3,30 - 2,92	1,9 - 1,5	3,03
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,63 - 69,58	66,63 - 66,66	70 - 71	65,73
5	Rasio Gini	Poin	0,335 - 0,379	0,336 - 0,335	0,34 - 0,32	0,345
6	Prevelensi Stunting	%	-	-	10 - 12	10 - 12
7	PDRB per Kapita	RP Juta	-	-	25 - 27	25 - 27
8	Inflasi	%	-	-	3 - 3,2	3 - 3,2
9	Indeks Pembangunan Gender	Poin	-	-	95	95
10	Rasio PAD	%	-	-	39,74	39,74
11	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2 ^{eq}	-	-	17.248.829	17.248.829
12	Kebutuhan Investasi	Rp Triliun	-	-	80,94	80,94
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	-	71	71

4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah

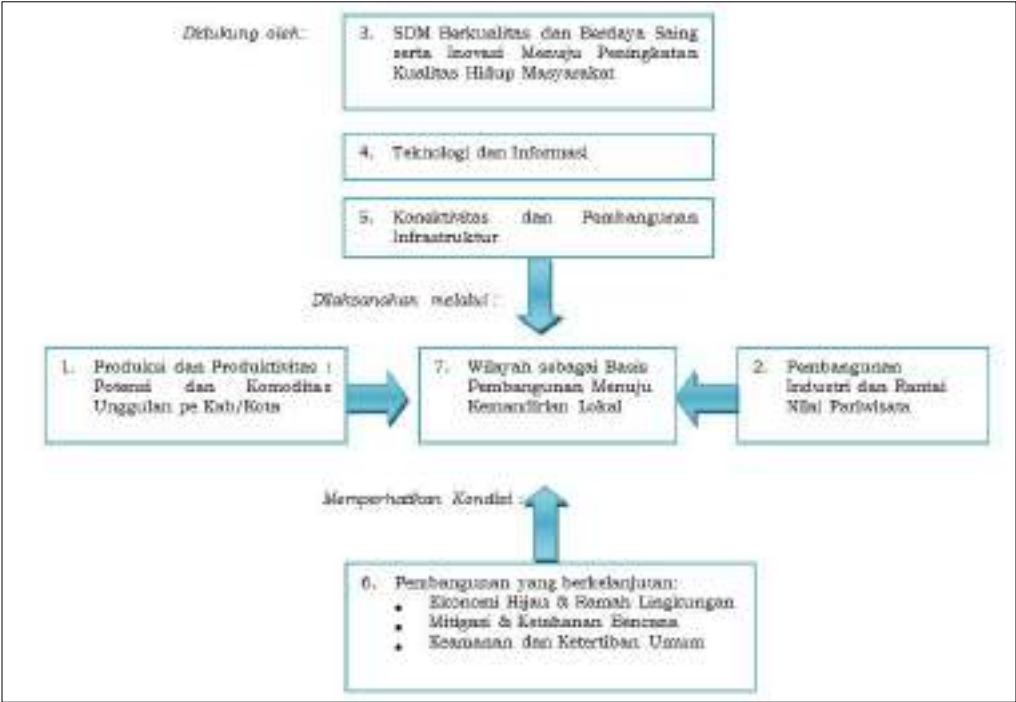
Fokus pembangunan Tahun 2023 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut.

Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

1. Konektivitas Wilayah;
2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga.

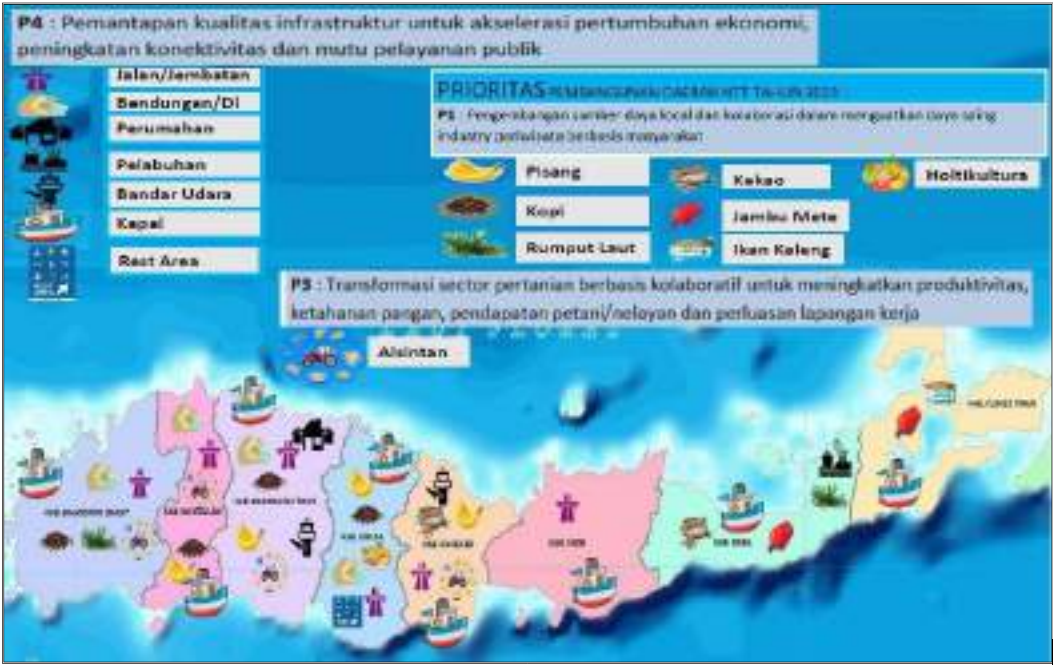
Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana serta keamanan dan ketertiban umum yang kondusif seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini

Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023



Dengan peta sebaran lokasi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 pada 22 Kabupaten/Kota dapat di lihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores), Gambar 4.12 (Wilayah Timor dan Alor) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba, Sabu Rajiua, Rote Ndao) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini:

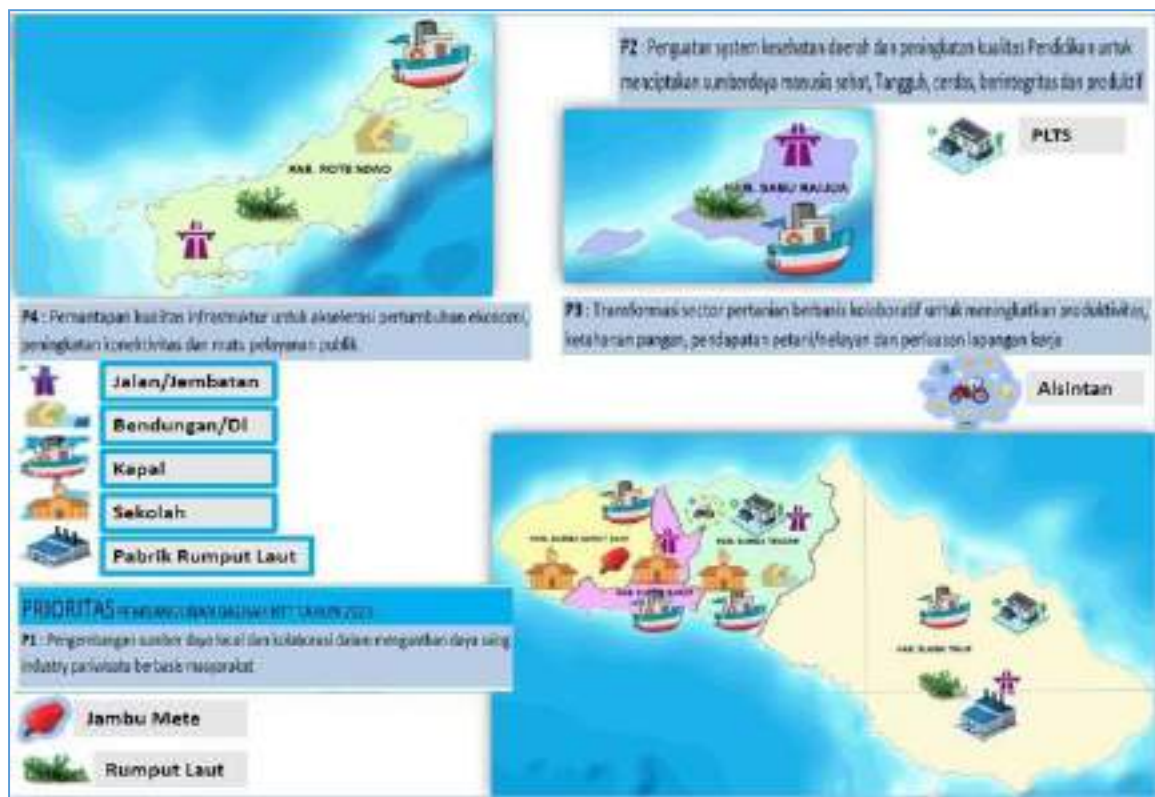
Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores



Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor dan Alor



Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao



4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam

Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain :

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang

- mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
 3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IGA ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IGA menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IGA menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil IGA ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2021 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2019/2020 dan 2020/2021). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT terus dimonitor dari tahun ke tahun.



Tabel. 4.11 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah Video
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	243	296
2	Kabupaten Rote Ndao	104	53
3	Kabupaten Manggarai Timur	29	17
4	Kabupaten Betu	19	21
5	Kabupaten Manggarai	17	13
6	Kota Kupang	17	16
7	Kabupaten Sikka	13	11
8	Kabupaten Sumba Timur	12	12
9	Kabupaten Timor Tengah Utara	10	5
10	Kabupaten Sumba Barat Daya	9	11

Sumber: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard> (Akses tanggal 1 Desember 2021)

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ada 243 bentuk inovasi di perangkat daerah yang didaftarkan ke dalam sistem (Tabel 4.12). Namun dari jumlah ini, hanya 216 inovasi yang dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel. 4.12 Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Jenis Inovasi	Total Disetujui	Total Keseluruhan
1	Digital	31	89
2	Non Digital	25	127

Sumber: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard> (Akses tanggal 1 Desember 2021)

Dari jumlah itu, ada 127 inovasi yang masuk kategori non digital dan ada 89 inovasi yang masuk kategori digital. Dari jumlah itu, terdapat 1 (satu) inovasi yang merupakan inisiatif dari kelompok inklusif dan diikuti dalam ajang ini.

Ada 7 (tujuh) aspek penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif (Gambar 4. 14). Ketujuh aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.

Gambar 4.14 Aspek Penilaian Indeks Inovasi



Source: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard>
(Akses tanggal 1 Desember 2021)

Dari data yang ada, pemerintah provinsi NTT menunjukkan laku inovasi yang cukup kuat sekurang-kurangnya pada 6 (enam) aspek dengan skor di atas 60, namun masih rendah pada pada 1 (satu) aspek yaitu aspek kecanggihan produk inovatif. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2020 dimana pemerintah provinsi NTT hanya menunjukkan laku inovasi yang kuat pada 2 (dua) aspek saja dengan skor di atas 60 yaitu aspek institusi dan SDM dan Penelitian.

Pada RKPD Tahun 2023, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dengan rincian masing – masing sebagai berikut:

4.4.1 TANAM JAGUNG PANEN SAPI POLA KEMITRAAN (TJPS-PK)

1. Input

a. Regulasi

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya, tanggal 19 November 2021. Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi.

b. Anggaran

Sumber anggaran berasal dari Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT setiap Tahun Anggaran untuk dukungan Manajemen pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan:

- 1) Kemitraan Bank NTT (Skin Kredit Mikro Merdeka)
- 2) Kredit Usaha Rakyat dari Himpunan Bank Negara (Himbara)
- 3) Offtaker untuk pembelian hasil produksi jagung

c. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah :

- 1) Petani sebagai Wirausaha Mandiri
- 2) Pendamping Lapangan (PL) TJPS-PK
- 3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Kabupaten
- 5) Tim Ahli TJPS dan Tim Sekretariat TJPS
- 6) Tim Pelaksana TJPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Pelaksana.

d. Institusi

4 (empat) Pilar utama yang mendukung Gerakan TJPS Pola Kemitraan yaitu : Akademisi (Tim Ahli), Bussines (Offtaker), Community (Petani/Wirausaha Mandiri), Government/Pemerintah (Pendamping Lapangan (PL), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bidang Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten. Didukung stakeholders terkait.

e. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang mendukung dalam Gerakan TJPS Pola Kemitraan adalah Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul), Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk Hayati Padat/Cair, Herbisida (Kontak dan Selektif), Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW)), Bahan dan peralatan (karung dan terpal), dan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen).



2. Proses

- a. Proses pengawalan dan pendampingan pada setiap musim tanam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi dan identifikasi;
 - 2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS;
 - 3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat;
 - 4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskan proses ke Bank;
 - 5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan;
 - 6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan dan Offtaker;
 - 7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman;
 - 8) Penyediaan dan distribusi Saprodi oleh Offtaker;
 - 9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri;
 - 10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri;
 - 11) Pendebetan penjaminan kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank;
 - 12) Informasi pendapatan/sisa uang di rekening Wiman;
 - 13) Petani/Wiman menggunakan sebagian pendapatan untuk integrasi/membeli ternak dan juga untuk memenuhi kebutuhannya dengan pola pemeliharaan : paket 1 (ternak sapi 1 ekor); paket 2 (ternak babi 3 s/d 5 ekor + ternak ayam 25 ekor); paket 3 (ternak kambing 3 s/d 5 ekor ditambah ayam 25 ekor); dan
 - 14) PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodik perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas, produksi, penjualan dan pembelian/integrasi ternak sesuai form pelaporan.



3. Masalah

Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan adalah Kolaborasi berbagai stakeholders terkait dalam suatu ekosisten masih memerlukan proses bersama/ belum berjalan optimal. Merubah petani/wirausahawan mandiri yang sudah terbiasa menerima bantuan sarana produksi dari pemerintah ke bantuan permodalan usaha berbasis kredit butuh proses dan waktu. Tahapan proses yang masih terkendala pada SOP masing-masing stakeholder dalam suatu luasan usaha tani jagung berskala ekonomi.

4. Output

Adapun output dari kegiatan ini adalah tercapainya pengembangan areal tanam jaging TJPS Pola Kemitraan Tahun 2022 seluas 105.000 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya produktivitas jagung hibrida dengan target produktivitas minimal 7 Ton/Ha.

4.4.2 REVITALISASI BALAI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NOELBAKI

1. Input

a. Regulasi

- 1) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/ 2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- 4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari
- 5) Kotoran Ternak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;
- 6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2021 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
- 7) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- 8) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421.5/SMK.2/239/VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1/90/DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.

b. Anggaran

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/ DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Proses dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018- 2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki

Kegiatan	Tahun dan Anggaran (Rupiah)							
	Sebelum Inovasi				Tahun Rencana Inovasi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengembangan Inovasi	38.530.000	227.261.000	200.629.000	163.486.618	200.000.000	330.000.000	300.000.000	300.000.000
Peralatan TTG								
Pelatihan dan Pemasangan Sarana Alternatif Biogas	65.250.000	198.420.000	129.695.000	115.233.976	145.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Pendangunan gedung	-	-	-	1.199.999.970	28.530.000.000	-	-	-
Pengadaan Meubeler	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan Kerja untuk Bengkel	-	-	-	-	-	3.500.000.000	-	-
Pengadaan Kendaraan Operasional Balai	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-
Total	103.750.000	425.681.000	330.324.000	1.478.714.624	28.875.000.000	5.950.000.000	450.000.000	450.000.000

- c. Sumber Daya Manusia
- Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari:
- 1) Pengarah : 1 orang

2) Penanggung Jawab : 1 orang

3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum : 2 orang

4) Kepala Unit : 4 orang

5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang

6) PTT: 1 Orang
- d. Institusi
- Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain:
- 1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);

- 2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungjawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);
 - 3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang); dan
 - 4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).
- e. Sarana Prasarana
- Bengkel Peralatan TTG, Asrama dan Aula. Lahan Persawahan, Gedung Display, Kolam Pemancingan dan Sarana Publik Lainnya.

2. Proses

- a. Proses yang dilakukan
- Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Tahun 2021:
 - Pembangunan Gedung Display;
 - Penandatanganan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik;
 - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; dan
 - Produksi Peralatan TTG skala kecil.
 - 2) Tahun 2022:
 - Pembangunan Gedung Kantor dan Aula;
 - Pembangunan Gedung Asrama;
 - Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu;
 - Pembangunan Gedung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

- Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung;
 - Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu;
 - Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama -
 - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.
- 3) Tahun 2023-2025:
- Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar);
 - Penjualan Peralatan TTG;
 - Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT;
 - Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama;
 - Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner;
 - Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 - Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3. Masalah

Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modern untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.

4. Output

Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut:

- a Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG;
- b Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang

- dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial;
- c Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT;
 - d Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat;
 - e Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel TTG;
 - f Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu;
 - g Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai pihak seperti desa (APBDes), BUMN (CSR);
 - h Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT; dan
 - i Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Outcome

Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya.

4.4.3 PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN BAMBU

1. Input

- a. Regulasi
 - 1) PKS dan MOU dengan PMD
 - 2) PKS dan MOU dengan DLHK
- b. Anggaran

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
- c. Sumber Daya Manusia

Yayasan Bambu Lestari (Staf Bali, Korkab, Fastek, Fasdes), dan Mama Bambu
- d. Institusi

Gubernur, Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, dan PKK
- e. Sarana Prasarana
 - 1) HP (Handphone) dibagikan ke 350 mama bambu untuk kebutuhan digitalisasi input data dan untuk media pembelajaran.
 - 2) Polybag
 - 3) Paranet/naungan

2. Proses

Proses yang dilakukan:

- a. Pengajuan Proposal dan anggaran tahun 2021
- b. Teknis Lapangan
 - 1) Survey & assessment
 - 2) Sekolah Lapang
 - 3) Pembibitan Keluarga

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini, telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh Kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pembibitan dan

penyemaian termaksud sinergis dengan program penguatan KPH dan percepatan perhutanan sosial.

4) Monev Lapangan

c. Laporan Pelaksanaan Program 2021

3. Masalah

Tantangan yang dihadapi lebih pada siklus pencairan anggaran, perubahan musim, sebaran dan kapasitas sumber bibit, serta dinamika kelompok yang kemudian membutuhkan penyesuaian target bibit yang diproduksi baik dari sisi jumlah maupun jenis.

4. Output

Tersedianya 2,5 juta bibit bambu sehat dan siap tanam dengan berbagai jenis (Petung, Pering & Aur) di 7 Kabupaten.

5. Outcome

- a. Komitmen lintas stakeholder yaitu Gubernur, Bupati, DPMD, DLHK, KPH, PKK) dalam pelaksanaan program desa wanatani bambu.
- b. Komitmen mama bambu dalam implementasi pelaksanaan program (Pembibitan, pemantauan dan konteks digitalisasi)
- c. Memberikan sumber pendapatan alternatif baru bagi mama bambu dan keluarga dari kegiatan pembibitan
- d. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mama bambu dalam budidaya bamboo
- e. Peningkatan peran mama bambu dalam musyawarah pembangunan tingkat desa.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Tema pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah **“PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut:

- Prioritas Pertama : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat;
- Prioritas Kedua : Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
- Prioritas Ketiga : Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
- Prioritas Keempat : Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
- Prioritas Kelima : Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi;
- Prioritas Keenam : Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Pemerintah menetapkan tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut :

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN. 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2023, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan makro daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,9%, Penurunan Kemiskinan 16,50-15,56%, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30-2,92%, Indeks Pembangunan Manusia 66,63-66,66 poin dan Rasio Gini menjadi 0,336-0,335 poin.

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka pada tahun rencana 2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | : 3,47-4,97% |
| 2. PDRB perkapita | : Rp. 25 – 27 Juta pertahun |
| 3. IPM | : 65,73 Poin |
| 4. Tingkat Kemiskinan | : 19,75-16,66% |
| 5. Prevelensi Stunting | : 10 – 12% |
| 6. Indeks Gini | : 0,345 Poin |
| 7. Indeks Pembangunan Gender | : 95 Poin |
| 8. Tingkat Pengangguran terbuka | : 3,03% |
| 9. Rasio PAD | : 39,74% |
| 10. Emisi Gas Rumah Kaca | : 17.248.829 tCO ² eq |
| 11. Kebutuhan Investasi | : Rp. 80,94 T |
| 12. Indeks Reformasi Birokrasi | : 71 Poin |

Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RKP 2022, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.

5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur mengalami kontraksi sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi akibat meluasnya pandemi Covid-19. Trend Laju Pertumbuhan selama triwulan I 2020 sampai triwulan I 2022, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh cukup berfluktuatif dengan catatan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2021 sebesar 4,32 %.

Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022



Sumber :BeritaResmiStatistik, BPS, 09 Mei 2022

Pelambatan ekonomi daerah mulai terjadi pada triwulan II tahun 2020. Output ekonomi NTT terlihat menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awal triwulanI 2020, yang hanya dapat tumbuh pada angka 2,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). Sepanjang triwulan II-IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh di angka -1,97%, -1,75%, dan -2,28% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). Pertumbuhan Ekonomi kemudian mendapatkan kembali titik balik positifnya sehingga terlihat terjadi ekspansi pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0.22% (*y on y*) yang kemudian merangkak naik sebesar 4,32% (*y on y*). Pada triwulan III tahun 2021 terjadi kontraksi namun masih positif yaitu angka pertumbuhan ekonomi berada di 2,36% (*y on y*) yang kemudian bergerak naik menjadi 3,10% (*y on y*) pada triwulan IV tahun 2021. Pada Triwulan I tahun 2022, Ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh 1,62% (*y on y*), hal ini disumbangkan dari pertumbuhan positif yang terjadi pada 15 dari 17 kategori lapangan usaha (*y on y*).

Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2020-2022, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2023, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 3,09% (terendah) sampai 4.11% (tertinggi). Tabel 5.1 menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023.

Tabel 5.1 Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	Nilai Riil PDRB (Rp.Milyar)		Laju Pertumbuhan	
	Prediksi 2022	2023	Prediksi 2022	2023
Sumba Barat	1.540,06	1.582,40	6,93%	3,27%
Sumba Timur	4.259,99	4.389,50	6,63%	3,32%
Sumba Tengah	804,03	825,01	7,08%	3,19%
Sumba Barat Daya	2.464,49	2.528,78	7,08%	3,21%
Lembata	1.246,21	1.280,76	6,90%	3,27%
Flores Timur	3.759,23	3.838,63	7,60%	3,12%
Sikka	3.525,51	3.641,52	6,31%	3,21%
Nagekeo	1.471,52	1.506,11	7,34%	3,09%
Ende	4.367,97	4.511,13	6,38%	3,29%
Ngada	2.477,07	2.543,39	7,00%	3,29%
Manggarai Timur	2.191,87	2.241,57	7.43%	3.37%
Manggarai Barat	2.396,85	2.466,64	6,76%	3,21%
Manggarai	3.211,08	3.308,24	6.64%	3.32%
Alor	2.137,15	2.201,70	6.65%	3.20%
Sabu Raijua	841,32	865,13	6,84%	3,33%
Rote Ndao	2.063,39	2.126,34	6.62%	3.37%
Belu	3.205,28	3.291,01	7.01%	3.63%
Malaka	2.013,94	2.058,59	7,49%	3,35%
Timor Tengah Utara	3.084,94	3.177,19	6,68%	3,18%
Timor Tengah Selatan	5.070,76	5.220,41	6,72%	3,15%
Kupang	5.139,35	5.292,59	6,69%	3,29%
Kota Kupang	17.867,16	18.600,43	5,54%	4,11%
Nusa Tenggara Timur	75.137,14	77.497,06	6,52%	3,47%

Sumber :Bappelitbangda Prov.NTT,2022

Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2023 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, namun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah masing-masing. *Rebound* ekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer.

Momentum pemulihan dampak pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu di dorong untuk tumbuh kembali. Namun di atas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. *Pertama*: sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalam ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan *kedua*: meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi Covid-19, karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang.

5.2 PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin sepanjang 2012 sampai 2021, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki trend yang konstan, tidak signifikan meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTT adalah dari sektor pengangguran terselubung yaitu sektor pekerja tanpa upah (angka pengangguran tidak naik karena pekerja tetap bekerja akan tetapi tidak diupah, sehingga berkontribusi pada angka kemiskinan). Dengan demikian, data pada September 2012, terdapat 998 ribu jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini setara dengan 20,41% dari total Penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun tersebut. Sepanjang periode September 2012 sampai dengan September 2014

terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret 2015. Jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.160 ribu jiwa, atau setara dengan 22,61% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2012-2021 sedangkan pada periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di Nusa Tenggara Timur tertinggi sepanjang 2012-2021. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1,161 ribu jiwa, meskipun secara persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya 22,58%.

Gambar 5.2 Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 17 Januari 2022

Sepanjang periode Maret 2016 sampai dengan September 2019, terlihat trend penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur, walaupun bila ditinjau dari jumlah penduduk miskin masih terdapat penurunan pada periode maret 2017, 2018 dan 2019. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% dan pada September 2020 menjadi 21,21%. Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh -2,27% (*y on y*). Berkurangnya output ekonomi daerah ini mencerminkan menurunnya permintaan (tergambar dari terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 sebesar 2,38% *y on y*) dan penawaran yang berarti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga mata pencahariannya. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat paling rentan

yang berada dekat dengan ambang batas garis kemiskinan kemudian masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Berbeda dengan keadaan pada Maret 2020 dan September 2020, terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timurpada periode Maret 2021 dan September 2021.

Jumlah Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, turun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan turun 27,3 ribu orang terhadap September 2020. Sedangkan secara persentase, Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 20,44%, turun 0,55% poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,77% poin terhadap September 2020. Dengan memperhatikan performa pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2023, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. di bawah ini,

Tabel 5.2 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	2022 (%)	2023 (%)
Sumba Barat	27.22	26.84
Sumba Timur	27.14	26.61
Sumba Tengah	34.66	34.66
Sumba Barat Daya	27.67	27.54
Lembata	23.88	23.60
Flores Timur	8.30	7.98
Sikka	12.45	12.13
Nagekeo	12.73	12.71
Ende	24.36	24.57
Ngada	12.29	12.19
Manggarai Timur	27.41	27.41
Manggarai Barat	16.71	16.26
Manggarai	20.50	20.34
Alor	20.31	19.95

Wilayah	2022 (%)	2023 (%)
Sabu Raijua	28.71	28.71
Rote Ndao	29.18	27.94
Belu	14.84	14.84
Malaka	15.33	15.03
Timor Tengah Utara	24.42	21.03
Timor Tengah Selatan	25.44	21.81
Kupang	19.54	18.27
Kota Kupang	9.36	9.32
Nusa Tenggara Timur	20.09	19.75

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Tantangan terbesar Provinsi NTT adalah menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk ke dalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi, serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk mencegah bertambahnya orang miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak dari resesi ekonomi. Pilihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca resesi.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara kolaboratif melalui 3 (tiga) pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu: Pilar 1 : Komitmen Pemerintah, Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran, Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi seperti pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3 Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pilar 1: Komitmen Pemerintah	Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran		Pilar 3: Pemanfaatan dan Evaluasi
	Tingkat Pusat	Tingkat Daerah	
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem Akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP 2022-2024 – BAPPENAS Penetapan regulasi tentang prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan lokasi wilayah lokasi prioritas – Kemenko PMK, KSP, TNP2K	Penetapan SPM dan STPD untuk urusan wajib – Seluruh KL Pengalokasian APBN (DAK, Transfer ke Daerah, dana desa, dan Dana Insetif Daerah) – Kemenkeu Pedoman penyusunan RKPD dan APBD- Kemendagri Pedoman Penyusunan RKPD dan APBD – Kemendagri Pedoman penggunaan Dana Desa – Kemendesa PDTT Pemuktahiran DTKS untuk penetapan sasaran – Kemensos Pelaksanaan program perlindungan sosial afirmasi: lansia, penyandang disabilitas dan program tambahan – Kemensos, Bappenas, Kemenkeu Mendorong pelibatan sektor non pemerintah - KemenBUMN, KADIN Edukasi masyarakat – kemenkominfo Akses pelayanan dasar kesehatan Akses pelayanan dasar pendidikan – Kemendikbud, Kemenag	- Dukungan pemda terhadap program nasional terkait cakupan penerima volume bantuan dan manajemen pelaksanaan – Bappeda - Kreasi program komplementer/ inisiatif daerah terkait penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah – lintas OPD - Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait – Bappeda - Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor non pemerintah dan swasta lokal – BUMD, KADIN	Penetapan indikator/rujukan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem – BPS Menyusun mekanisme pemantauan yang akan dilaksanakan secara berkala – KSP, Setwanpres Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten - Kemendagri

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2021

5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok Provinsi dengan tingkat pengangguranterbuka yang rendah. Apabila di pilah per Kabupaten, terlihat variasi yang meskipun menunjukkan trend penurunan, masih menggambarkan naik dan turunnya angka TPT per tahun pada Kabupaten/Kota tertentu. Terdapat Kabupaten dengan TPT yang tinggi pada tahun tertentu dan mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya, sementara terdapat Kabupaten dengan pola sebaliknya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka memiliki karakter dominan di perkotaan (*urban*), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (*rural*) cenderung mencatat TPT yang rendah. Sepanjang 2017-2021, kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi relatif dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 5.4 Angka TPT Kab/Kota se-NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	2021	2020	2019	2018	2017
Sumba Barat	1.74	3.96	3.15	4.06	3.83
Sumba Timur	3.35	3.49	2.13	1.42	2.9
Kupang	3.99	4.9	4.48	2.71	3.52
Timor Tengah Selatan	2.57	2.63	1.94	1.01	1.7
Timor Tengah Utara	3.88	4.26	1.22	0.85	0.6
Belu	5.35	7.42	7.19	5.26	2.47
Alor	2.59	3.11	3.03	4.09	1.86
Lembata	4.94	4.88	4.31	5.4	4.18
Flores Timur	3.81	3.16	3.09	4.01	5.45
Sikka	4.54	4	3.56	2.43	2.5
Ende	2.61	2.95	2.98	2.89	3.66
Ngada	2.99	4.69	3.38	2.11	3.23
Manggarai	3.7	4.09	3.11	3.21	4.09
Rote Ndao	3.67	4.9	2.73	2.11	2.52
Manggarai Barat	4.94	3.72	2.42	1.19	1.3
Sumba Tengah	1.45	4.02	3.43	3.57	4.26
Sumba Barat Daya	2.04	2.36	1.25	1.01	1.61
Nagekeo	0.97	3.09	2.76	1.88	3.6
Manggarai Timur	1.96	2.1	0.95	1.57	0.5
Sabu Raijua	1.25	3.08	2.89	2.12	2.75
Malaka	3.43	3.63	2.34	3.79	1.07
Kota Kupang	9.76	10.9	9.78	10.17	12.5
Nusa Tenggara Timur	3.77	4.28	3.35	3.01	3.27

Sumber :BPS,2022

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 (*y on y*) yang sebesar 3,35%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi Covid-19. Sebaliknya pada era *new normal* dari masa pandemi covid-19, di tahun 2021 terjadi penurunan angka TPT sebesar 0.51 poin menjadi 3,77% (*y on y*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Februari 2021 – Februari 2022.

Pada tahun rencana 2022, pemerintah dalam RKP 2022 menargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 3,2-4,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 terhadap angka pengangguran. Upaya *recovery* ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran sebesar 3,03% pada tahun rencana 2023 jika dibandingkan dengan target RKP tahun rencana 2023 untuk NTT sebesar 3,30-2,92%.

Dengan memperhatikan perkembangan kinerja angka pengangguran terbuka dalam beberapa tahun dan dengan menggunakan proyeksi RKP 2023, maka target TPT Pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 5.5. berikut ini.

Tabel 5.5 Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun Rencana 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023		
						Forecast	Lower CB	Upper CB	Forecast	Lower CB	Upper CB
Sumba Barat	3,83	4,06	3,15	3,96	1,74	2,97	2,16	3,78	1,82	1,01	2,64
Sumba Timur	2,90	1,42	2,13	3,49	3,35	2,91	0,93	4,89	2,82	0,61	5,03
Kupang	3,52	2,71	4,48	4,90	3,99	4,54	2,43	6,66	3,47	0,82	6,12
Timor Tengah Selatan	1,70	1,01	1,94	2,63	2,57	2,60	1,00	4,20	2,63	0,47	4,79
Timor Tengah Utara	0,60	0,85	1,22	4,26	3,88	3,20	0,68	5,73	3,17	0,34	5,99
Belu	2,47	5,26	7,19	7,42	5,35	6,64	4,30	8,97	8,49	6,15	10,83
Alor	1,86	4,09	3,03	3,11	2,59	3,57	1,85	5,30	3,50	1,72	5,28
Lembata	4,18	5,40	4,31	4,88	4,94	5,31	3,09	7,54	5,46	3,22	7,70
Flores Timur	5,45	4,01	3,09	3,16	3,81	2,75	0,29	5,20	2,60	0,07	5,13
Sikka	2,50	2,43	3,56	4,00	4,54	3,62	1,23	6,01	3,64	1,25	6,03
Ende	3,66	2,89	2,98	2,95	2,61	2,75	1,63	3,88	2,80	1,67	3,93
Ngada	3,23	2,11	3,38	4,69	2,99	4,75	2,31	7,19	6,16	3,70	8,62
Manggarai	4,09	3,21	3,11	4,09	3,70	4,39	2,48	6,29	4,56	2,64	6,48
Rote Ndao	2,52	2,11	2,73	4,90	3,67	3,00	0,34	5,66	2,88	0,14	5,62
Manggarai Barat	1,30	1,19	2,42	3,72	4,94	3,35	1,31	5,39	3,43	1,32	5,53
Sumba Tengah	4,26	3,57	3,43	4,02	1,45	2,80	1,20	4,39	2,27	0,67	3,86
Sumba Barat Daya	1,61	1,01	1,25	2,36	2,04	1,59	0,13	3,06	1,52	0,04	2,99
Nagekeo	3,60	1,88	2,76	3,09	0,97	2,51	1,28	3,74	2,94	1,67	4,21
Manggarai Timur	0,50	1,57	0,95	2,10	1,96	2,93	2,63	3,23	2,44	2,14	2,74
Sabu Raijua	2,75	2,12	2,89	3,08	1,25	1,51	0,28	2,74	1,27	0,04	2,50
Malaka	1,07	3,79	2,34	3,63	3,43	3,39	0,88	5,90	3,44	0,63	6,24
Kota Kupang	12,50	10,17	9,78	10,90	9,76	9,71	4,44	14,97	9,65	2,21	17,09
Nusa Tenggara Timur	3,27	3,01	3,35	4,28	3,77	3,10	1,86	4,33	3,03	1,79	4,28

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Trend pengangguran yang tinggi pada wilayah urban masih akan terjadi pada tahun rencana 2023. Pada wilayah-wilayah dengan karakteristik rural yang dominan, angka pengangguran diperkirakan tidak akan terlalu tinggi mengingat lapangan usaha pertanian yang digeluti tidak terdampak sebesar sektor perdagangan dan jasa oleh resesi akibat pandemi Covid-19. Hal berbeda terjadi pada wilayah dengan karakteristik urban seperti kota Kupang. Usaha-usaha jasa dan perdagangan yang banyak tutup mengakibatkan lonjakan pengangguran. Namun demikian, upaya pemulihan ekonomi pada tahun rencana 2023 akan bertumpu dan berfokus pada upaya untuk pemulihan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan dengan demikian akan menekan angka pengangguran di daerah ini untuk bergerak turun.

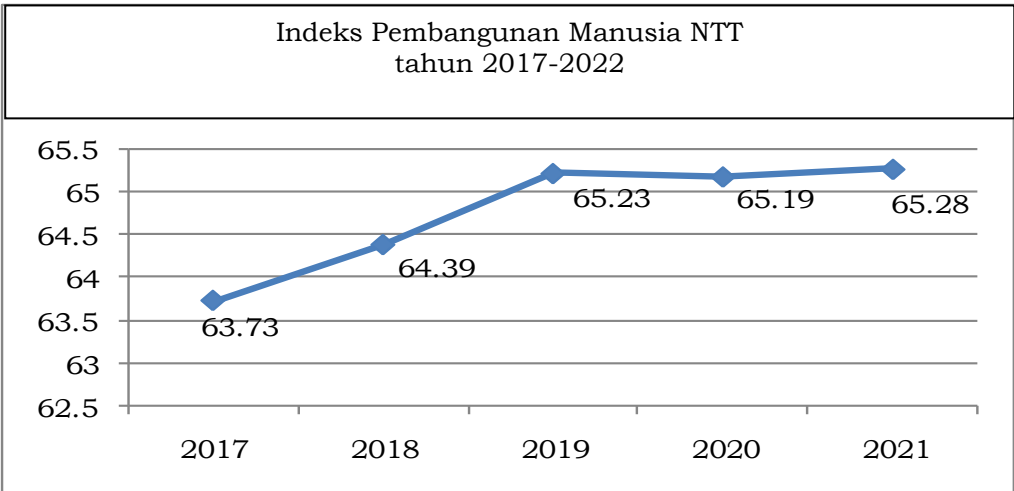
Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebijakan strategis untuk dapat kembali menekan angka pengangguran lewat momentum *recovery* ekonomi pasca pelambatan ekonomi daerah dengan, misalnya, memberikan stimulus berupa permodalan, penangguhan pajak atau kemudahan berinvestasi. Langkah antisipasi perlu diambil bukan saja untuk menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang menganggur menjadi rentan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, namun juga menjamin bahwa momentum pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat memberikan manfaat bagi upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

5.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perbandingan usia harapan hidup, melek huruf, derajat pendidikan dan standard hidup yang digunakan di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah dapat dikatakan maju, berkembang atau terbelakang. IPM dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sepanjang tahun 2017-2021, IPM Nusa Tenggara Timur memiliki trend peningkatan. Pada tahun 2017, IPM Nusa Tenggara Timur adalah 63.73 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,39. Hanya pada tahun 2020 IPM NTT mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4 poin menjadi 65,19. Penurunan yang disebabkan oleh meluasnya pandemi yang berefek panjang pada aspek-aspek lain selain kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Meski demikian, pada tahun berikutnya IPM Nusa Tenggara Timur kembali bergerak naik ke angka 65,28 Poin. Dalam satu dekade terakhir pun IPM Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan lebih dari 6 poin. Ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan juga memberi indikasi bahwa kerja-kerja pembangunan manusia NTT telah berada pada jalur yang benar.

Gambar 5.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun



Sumber : BPS NTT, 22 Desember 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, IPM NTT termasuk dalam kelompok yang paling rendah. Pada tahun 2020, rerata IPM Indonesia telah mencapai 71,94, hal yang mengindikasikan bahwa pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan standard hidup, masyarakat NTT masih tertinggal dibandingkan saudara-saudara lainnya di Indonesia, dan hal

ini memberikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan standard hidup.

Jika dipilah per Kabupaten, terlihat bahwa rata-rata Kabupaten di NTT berbagi skor IPM yang cenderung sama. Hanya Kota Kupang yang tercatat memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Skor IPM kota Kupang bahkan lebih tinggi belasan poin dibandingkan skor IPM Kabupaten tertinggi lainnya di NTT. Pada tahun 2020, IPM Kota Kupang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rerata IPM Indonesia.

Dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target capaian IPM 70-71 Poin pada tahun 2023. Ini merupakan target besar mengingat dengan mempertimbangkan capaian tahun 2020 dan hasil evaluasi tahun 2021 maka target IPM pada RKPD tahun 2023 adalah 65,73 Poin. Arahkan provinsi bagi Kabupaten/Kota beserta target capaian IPM adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022

Wilayah	Target	
	2022	2023
Sumba Barat	64,09	64,35
Sumba Timur	66,69	67,26
Kupang	64,98	65,51
Timor Tengah Selatan	62,48	62,50
Timor Tengah Utara	63,88	64,00
Belu	62,92	63,00
Alor	62,36	62,93
Lembata	65,03	65,10
Flores Timur	65,73	66,42
Sikka	66,24	66,84
Ende	67,52	67,75
Ngada	68,61	69,17
Manggarai	66,10	66,80
Rote Ndao	63,74	64,50
Manggarai Barat	64,90	65,58
Sumba Tengah	62,27	62,74
Sumba Barat Daya	62,85	63,40
Nagekeo	67,02	67,57
Manggarai Timur	61,96	62,55
Sabu Raijua	57,59	58,10
Malaka	60,67	60,91
Kota Kupang	80,21	80,64
Nusa Tenggara Timur	65,6	65,73

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Kota Kupang diprediksi masih akan menjadi “pendorong” utama terhadap peningkatan IPM NTT. Pada tahun 2022, IPM Kota Kupang diperkirakan akan meningkat menjadi 80,21 poin pada tahun berjalan 2022 sedangkan berada di angka 80.64 pada tahun rencana 2023. Posisi Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis memberikan keuntungan tersendiri. Dari sisi *demand*, sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya. Dari sisi *supply*, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kota Kupang tidak lagi menjadi “monopoli” pemerintah namun juga telah menjadi urusan dari masyarakat dan dunia usaha. Tersedianya pilihan atas layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat memiliki akses dan pilihan yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu luas wilayah yang tidak begitu besar turut andil dalam hal ini.

Wilayah yang relatif kecil memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM pada kota Kupang menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur.

Bagi Kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur memiliki skor IPM yang relatif rendah karena sebagian besar Kabupaten di NTT berciri rural, dimana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan upah yang relatif rendah dan pada akhirnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi *supply*, terdapat kecenderungan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang “undersupply”, akibat keterbatasan finansial daerah, luas wilayah dan topografi yang ekstrim.

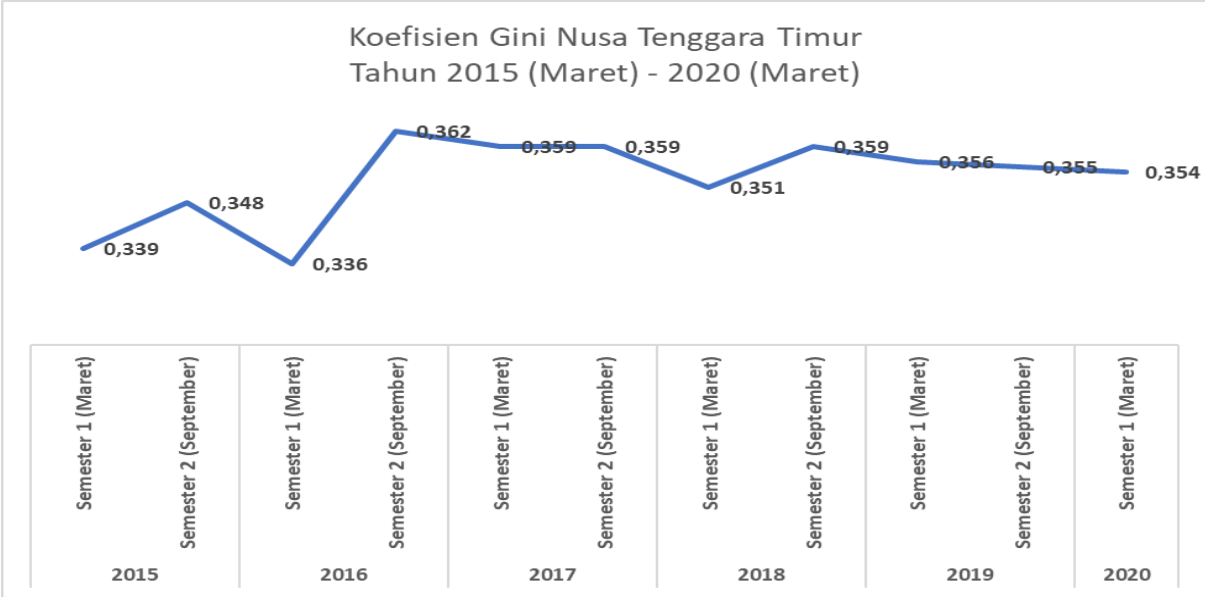
Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, target peningkatan IPM pada tahun rencana 2023 bukan pekerjaan yang mustahil, sebagaimana seperti yang telah diperlihatkan pada tahun-tahun belakangan ini. Target tersebut akan dapat dicapai dengan memperkuat fokus pembangunan pada aspek-aspek kunci pembangunan manusia yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Untuk tujuan ini, pengalokasian sumberdaya yang terukur pada fokus-fokus tersebut akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur.

5.5 GINI RASIO

Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan gini ratio dapat digambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi gini ratio semakin besar terjadi ketimpangan. Nilai gini ratio mendekati nol menandakan ketimpangan yang rendah sementara nilai gini ratio mendekati 1 menggambarkan ketimpangan yang tinggi.

Pada semester I, 2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,354 yang merupakan koefisien terkecil dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur berada dibawah rerata Nasional yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381.

Gambar 5.4 Koefisien Gini NTT Tahun 2015-2020



Sumber : BPS NTT, 2021

Salah satu fokus dalam rancangan RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 mengamanatkan upaya pengurangan ketimpangan di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan fokus RKP 2023, dan merujuk kepada amanat RPJMD-P NTT 2018-2023, maka arahan kepada Kabupaten/Kota se-NTT dalam mengupayakan pengurangan ketimpangan diukur pencapaian Gini ratio Provinsi NTT sebesar 0,34-0,32 untuk RKPD 2023 diarahkan target rasio gini provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,345 poin.

Apabila menilik data ketimpangan nasional yang didorong oleh tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan perkotaan, maka diperlukan *treatment* yang berbeda antara apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perkotaan yang aktivitas ekonominya di dominasi oleh perdagangan dan jasa, dengan apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perdesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan distribusi pendapatan yang lebih adil lewat instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi maupun kewenangannya untuk membuat regulasi, agar aktivitas ekonomi tidak menjadi sumber ketimpangan yang ada di daerah ini.

5.6 FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2023

5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata

Arahan umum untuk kabupaten kota dalam rangka mendukung pengembangan rantai nilai pariwisata adalah pengembangan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil. Fokusnya adalah penguatan terhadap pariwisata estate untuk Tahun 2023 adalah dukungan amenitas, penguatan promosi untuk 22 kabupaten/kota, pameran ekonomi kreatif dan festival. Untuk komoditas unggulan pertanian dan peternakan, agar kabupaten/kota mendukung program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan areal tanam jagung dan meningkatkan produktivitas jagung.

5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sistem kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui :

- (1) Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak,
- (4) Peningkatan status gizi anak
- (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan,
- (6) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit,
- (7) Peningkatan

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

5.6.3 Penanganan Kemiskinan Dan Eradikasi Stunting

Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan di daerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah:

1. Paradigma hidup sehat: Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protokol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).
2. Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada FKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak).
3. Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang utama untuk ditangani pada tahun 2023, disamping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi-destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5 berikut.

Gambar 5.5 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting



Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Sedangkan, strategi dan aksi nyata penanggulangan kemiskinannya itu menggunakan 4 (empat) strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mendorong pengembangan UMKM, dan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga melalui program – program seperti pada Gambar 5.6 di bawah ini.

Gambar 5.6 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulangan Kemiskinan



Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 29 (dua puluh sembilan) indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya, dengan adanya upaya inovasi konvergensi stunting sebagaimana pada Gambar 5.7.

Tabel 5.8
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN			JUMLAH KELUARGA GA	JUMLAH KELUARGA SASARAN			SASARAN		KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUAR GA PRA SEJAHTERA	PENAPISAN FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT				PUS 4 TERLALU				
								PUNTA ANAK	PUS			PUS HAMIL	TIDAK ADA ANGGOT A KELUAR GA MENILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENU HI KEBUTU HAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOT A KELUAR GA MAKAN AN BERAGA N PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUAR GA TIDAK MEMPUH TAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUAR GA TIDAK MEMPUH TAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUAR GA TIDAK MEMPUH TAI RUMAH LAYAK HUNI	PENDIDI KAN TERAKHI R IBU DI BAWAH SLTP	TERLALU MUDA (UMUR < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANTAK (> 3 ANAK)	
										BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)														
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	KOTA SOE			6,852		3,878	643	1,160	3,732	133	3,636	242	136	153	302	156	677	662	1,390	2,640	508	3	2,334	247	1,326
02	MOLLO SELATAN			4,164		2,371	501	778	2,320	81	2,258	113	73	65	517	324	1,270	343	351	1,525	800	17	1,322	132	1,156
03	MOLLO UTARA			5,817		2,974	675	1,114	2,853	160	2,306	68	174	253	1,348	124	1,563	645	1,538	2,563	1,737	32	1,645	200	1,553
04	AMANUBAN TIMUR			1,716		857	117	252	823	18	848	3	50	71	336	43	414	364	524	803	525	4	431	62	354
05	AMANUBAN TENGAH			2,421		1,211	243	430	1,160	48	1,186	25	30	34	575	33	652	233	774	1,054	680	6	686	57	570
06	AMANUBAN SELATAN			6,187		3,238	566	375	3,138	67	3,215	23	217	393	1,271	357	1,714	883	2,857	3,105	1,877	23	1,736	140	1,076
07	AMANUBAN BARAT			5,603		3,426	760	1,140	3,328	155	3,323	37	146	30	1,104	113	1,273	1,135	2,643	3,035	1,218	26	1,774	144	1,507
08	AMANATUN SELATAN			2,575		1,205	275	425	1,171	74	1,197	8	86	56	553	43	634	423	633	1,103	740	11	674	77	645
09	AMANATUN UTARA			2,011		340	141	221	306	32	334	6	62	163	420	186	547	483	712	830	531	13	519	38	406
10	KI'E			2,132		1,033	133	328	331	27	1,015	24	85	50	473	84	552	383	467	830	610	18	578	44	473
11	KUANFATU			3,311		1,358	407	703	1,864	77	1,348	10	108	236	1,003	301	1,255	333	1,263	1,807	1,074	21	1,057	132	1,041
12	FATUMNASI			1,222		631	114	135	532	26	623	8	33	11	226	38	263	85	383	583	385	12	330	25	218
13	POLEN			3,713		1,342	423	653	1,842	111	1,331	11	37	214	738	246	1,083	312	1,503	1,846	1,245	18	1,010	37	881
14	BATU PUTIH			2,838		1,857	408	683	1,734	53	1,845	12	131	23	737	25	833	650	1,558	1,740	1,066	17	1,008	34	336
15	BOKING			333		163	17	38	166	2	169	0	12	64	84	43	111	17	102	148	100	3	84	11	35
16	TOIANAS			3,453		1,881	365	611	1,800	62	1,868	13	173	302	733	66	1,006	1,046	1,539	1,808	1,223	42	382	103	805
17	NUNKOLO			2,653		1,200	271	427	1,135	40	1,184	16	110	36	503	50	633	400	737	1,034	837	7	668	63	683
18	OENINO			2,431		1,130	238	415	1,133	63	1,188	2	32	31	617	246	780	687	343	1,162	773	10	644	47	533
19	KOLBANO			5,403		2,536	486	883	2,443	118	2,430	46	124	85	306	138	1,076	356	1,563	2,212	1,532	13	1,432	124	1,407
20	KOT OLIN			3,171		1,657	333	483	1,537	71	1,638	13	172	264	520	223	836	188	850	1,487	1,101	25	310	73	833
21	KUALIN			3,385		2,354	464	747	2,282	30	2,333	21	221	676	353	233	1,503	334	1,244	2,111	1,325	14	1,275	120	1,301
22	MOLLO BARAT			483		263	42	84	255	13	262	1	24	76	163	3	133	137	240	260	214	3	136	10	31
23	KOK BAUN			341		487	114	181	443	23	483	4	42	155	208	60	308	118	268	451	233	4	264	15	231
24	NOEBANA			641		266	37	55	252	5	260	6	12	63	140	33	161	35	186	223	170	0	138	7	68
25	SANTIAN			32		11	0	4	10	0	11	0	0	3	3	3	10	7	1	11	3	0	7	0	2
26	NOEBEBA			2,643		1,161	127	206	1,130	20	1,143	12	17	32	385	11	408	132	832	381	623	11	655	35	163
27	KUATNANA			2,386		1,501	365	557	1,454	72	1,476	25	110	27	768	431	333	588	1,027	1,360	326	16	840	85	845
28	FAUTMOLO			808		416	34	176	334	13	406	10	20	21	224	25	245	141	153	353	301	3	233	18	215
29	FATUKOPA			432		274	31	82	266	25	274	0	11	22	165	0	182	134	247	273	123	1	153	7	105
30	MOLLO TENGAH			1,362		1,010	135	320	364	47	1,011	-1	54	176	414	628	733	247	310	330	643	7	541	67	483
31	TOBU			67		27	1	5	26	1	25	2	0	10	1	3	10	4	10	14	22	0	20	2	6
32	NUNBENA			1,334		730	160	252	713	31	721	3	21	22	365	15	333	322	345	671	467	3	383	42	233
JUMLAH				85,166		44,660	8,818	14,601	43,061	1,782	43,813	841	2,763	4,075	16,833	5,022	22,455	14,071	23,131	33,211	23,630	383	24,721	2,330	20,325

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT



Tabel 5.9
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SAKIT	DATA RAS				KATEGORI KELUARGA BERESIKO STUNTING		FENOMENA													
				PENYAKIT		PUNYAI	TUNYAI	BERESIKO	TIDAK BERESIKO	INDIKATOR PRA-ELIMINASI				KEPERAWATAN PRA-ELIMINASI	FAKSIKAL LINGKUNGAN TERAKSI TERBAT			PENGENDALAN TERAKSI PRA-ELIMINASI SLP	RISIKO & TERAKSI				
				DIAGNOSA (1-2 TAHUN)	DIAGNOSA (3-4 TAHUN)					AKSI RAS RAS TERAKSI	TIDAK AKSI RAS RAS TERAKSI	TIDAK AKSI RAS RAS TERAKSI	TIDAK AKSI RAS RAS TERAKSI		KEPERAWATAN TERAKSI RAS RAS TERAKSI	KEPERAWATAN TERAKSI RAS RAS TERAKSI	KEPERAWATAN TERAKSI RAS RAS TERAKSI		TERAKSI RAS RAS TERAKSI (1-2 TAHUN)	TERAKSI RAS RAS TERAKSI (3-4 TAHUN)	TERAKSI RAS RAS TERAKSI (1-2 TAHUN)	TERAKSI RAS RAS TERAKSI (3-4 TAHUN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
31	ROTE BARAT DAYA	5.304	3.168	733	1.879	3.814	165	3.061	28	793	288	915	685	1.243	885	2.731	2.880	1.060	38	1.315	183	1.898	
32	ROTE BARAT LAUT	5.896	3.587	808	1.272	3.495	184	3.418	157	224	168	265	311	784	1.544	2.265	2.881	1.912	30	1.772	227	1.968	
33	LOBALAN	6.499	4.041	675	1.197	3.995	148	3.875	688	143	268	191	184	634	284	968	1.522	1.434	14	2.226	204	1.784	
34	ROTE TENGAH	1.802	1.224	248	348	1.280	78	1.068	130	30	0	168	0	288	130	238	270	314	0	874	78	568	
35	KAMTA BARU	3.451	1.932	275	584	1.881	87	1.743	178	88	168	268	170	542	262	512	1.080	301	14	1.843	104	823	
36	ROTE THUR	2.505	1.583	287	481	1.475	72	1.414	88	82	21	112	85	223	173	903	1.835	771	21	783	121	728	
37	ROTE BARAT	1.818	1.151	228	317	1.129	28	965	198	53	82	43	183	272	85	308	435	583	18	531	58	377	
38	ROTE SELATAN	1.195	927	135	311	916	48	818	81	52	22	31	89	117	270	378	570	489	0	498	68	473	
39	SDAO RUSE	495	413	84	127	497	5	386	27	24	23	21	85	88	95	233	390	238	0	238	14	158	
10	LAMDU LERO	999	798	153	223	697	42	658	59	27	88	88	120	212	219	174	381	415	0	338	38	354	
Jumlah		32.838	19.553	2.714	6.828	16.165	307	17.145	1.838	368	1.343	1.704	1.732	6.315	3.694	8.818	11.794	2.884	148	9.422	1.891	8.968	

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT



Tabel 5.10
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sikka
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN												
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI	KELUARGA TIDAK MEMPUNYA 1 SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK RUMI	TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)		TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	PAGA	3,912	2,046	347	604	1,380	56	1,792	254	112	14	245	5	356	34	461	904	1,160	16	1,037	35	686
02	MEGO	1,065	653	144	203	633	26	649	4	70	37	220	100	319	289	232	626	410	10	312	41	248
03	LELA	2,374	1,384	215	382	1,354	58	1,328	56	57	26	137	88	283	291	511	1,169	699	13	824	45	469
04	NITA	5,362	2,319	464	816	2,868	127	2,745	174	91	168	511	295	866	672	780	2,143	1,363	26	1,646	38	1,023
05	ALOK	7,211	4,319	716	1,184	4,246	157	3,765	554	147	129	115	62	397	206	564	2,172	1,553	50	2,240	171	1,618
06	PALUE	657	228	42	75	213	12	228	0	11	31	81	24	109	202	186	228	153	0	145	5	34
07	NELLE	1,557	849	145	221	837	35	768	81	21	13	46	3	77	245	182	550	366	18	447	35	239
08	TALIBURA	5,419	3,826	658	1,067	3,745	176	3,680	146	217	88	830	239	1,137	566	1,138	3,054	2,429	83	1,813	126	1,319
09	W/AIGETE	3,478	2,130	403	683	2,089	86	2,060	70	123	377	586	407	1,116	460	937	1,703	1,244	30	1,036	84	802
10	KEWAPANTE	3,554	1,869	328	583	1,813	52	1,716	153	35	46	192	97	322	667	576	1,381	782	28	932	72	608
11	BOLA	2,765	1,228	200	374	1,204	54	1,188	40	47	153	228	19	387	720	347	1,079	653	12	666	35	405
12	MAGEPANDA	1,721	1,197	182	325	1,179	49	1,148	49	58	51	167	253	423	55	664	948	739	24	581	54	415
13	W/AIBLAMA	1,798	1,146	178	324	1,112	15	1,106	40	73	111	254	150	409	137	650	397	838	19	551	48	387
14	ALOK BARAT	4,778	3,152	580	960	3,090	131	2,914	238	169	103	239	44	501	113	394	1,346	1,528	47	1,567	158	1,261
15	ALOK TIMUR	7,682	4,574	796	1,221	4,461	193	4,013	555	148	180	121	158	561	432	866	2,521	1,435	38	2,438	193	1,587
16	KOTING	1,028	566	35	158	562	44	512	54	7	8	64	0	78	35	42	350	239	10	289	16	148
17	TANA WAWO	1,745	838	65	271	776	25	823	15	69	27	255	76	345	303	588	770	640	7	396	40	374
18	HEWOKLOANG	2,195	1,213	229	378	1,194	63	1,213	0	38	16	396	68	461	1,187	746	1,210	619	16	605	61	456
19	KANGAE	4,559	2,462	354	702	2,417	91	2,316	146	77	32	336	255	653	1,229	506	1,905	1,019	20	1,301	95	776
20	DORENG	2,283	1,439	269	478	1,412	67	1,402	37	69	203	564	261	729	781	722	1,288	855	29	728	56	620
21	MAPITARA	1,359	877	157	271	853	28	868	9	31	24	438	92	482	205	582	833	620	15	465	41	358
JUMLAH		66,502	38,915	6,567	11,280	38,038	1,551	36,240	2,675	1,670	1,903	6,025	2,636	10,011	8,829	12,334	27,777	19,344	511	20,139	1,575	14,093

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.11
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ngada
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERESIKO STUNTING		Pemeriksaan													
				PUS & ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PUS STUNTING					KELUARGA PUS STUNTING	FASILITAS LINGKUNGAN TERDEKAT			Pemeriksaan BERESIKO STUNTING	PUS & TOLAK			
										BABITA (0-23 BULAN)	BALITA (24-59 BULAN)	ADA ANAK 0-17 TAHUN YANG BERESIKO	Tidak ADA ANGGOTA KELUARGA BERESIKO STUNTING (UNTUK MENOLAK SERTIFIKASI PUSDIK PERI BULAN)	JANG LANTAI TANGGA		Tidak Setiap ANGGOTA KELUARGA MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERESIKO STUNTING & TERDAFTAR PADA KEMAS 2 (SALU SALL BERUK)	KELUARGA TERDEKAT BERESIKO STUNTING	KELUARGA TERDEKAT BERESIKO STUNTING		KELUARGA TERDEKAT BERESIKO STUNTING	TERDAFTAR BERESIKO STUNTING	TERDAFTAR BERESIKO STUNTING	TERDAFTAR BERESIKO STUNTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	ANERE	2.170	1.323	262	362	1.311	49	1.360	23	43	37	217	229	490	58	962	1.123	619	0	762	81	829	
02	GOLEWA	3.291	1.768	251	529	1.704	117	1.736	24	133	268	236	196	627	559	1.274	1.534	909	1	1.153	183	992	
06	BAJAWA	7.930	4.937	728	1.396	4.554	178	4.354	283	194	318	229	338	979	1.278	1.785	3.181	1.447	16	2.902	239	2.210	
07	SIDA	2.796	1.731	228	494	1.999	41	1.958	81	75	367	195	194	900	98	1.191	1.258	948	2	1.398	72	971	
08	MURTI	3.520	1.994	287	537	1.958	78	1.938	64	112	98	439	93	830	137	1.262	1.858	928	2	1.225	84	947	
12	JERESU	1.793	803	181	241	848	49	845	37	46	24	53	22	118	33	541	1.112	479	8	908	37	412	
14	MURU BARAT	1.955	1.306	199	395	1.205	46	1.288	28	94	165	354	190	544	403	997	1.265	711	2	705	58	602	
15	BAJAWA UTARA	2.194	1.411	237	383	1.308	37	1.319	52	86	163	126	83	387	188	395	685	348	5	731	48	849	
16	WOLOMEZE	1.336	819	145	200	903	24	771	44	29	25	142	21	620	2	318	589	422	1	601	32	490	
18	GOLEWA SELATAN	2.719	1.466	232	376	1.448	66	1.448	18	57	66	120	80	261	666	1.156	1.381	775	0	963	88	882	
19	GOLEWA BARAT	3.844	1.298	207	451	1.323	97	1.211	38	88	224	90	338	855	738	914	1.133	918	6	713	49	869	
20	BERE	1.931	908	148	247	855	48	871	28	35	58	65	198	261	47	577	1.147	648	2	528	53	495	
Jumlah		14.955	18.974	3.189	5.839	19.154	823	19.916	768	985	1.758	2.294	1.859	8.357	4.189	11.139	15.277	9.052	59	11.991	899	9.434	

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.12
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Lembata
Tahun 2022

[illegible]

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.13
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Belu
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KEJAWARA TERAKSI	DATA RAS				KATEGORI KELUARGA BERESIKO STUNTING		INDIKATOR RAS STUNTING				KELUARGA RAS STUNTING	FASILITAS LINGKUNGAN TERAKSESTAS				PENGIRAN TERAKSI RAS STUNTING	RISIKO TERAKSI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				PUNTA RAS		RIS	RIS KAMU			RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS		RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS		RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				WAKITA (1-10 TAHUN)	WAKITA (11-15 TAHUN)			RIS RAS	RIS RAS					RIS RAS					RIS RAS								RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS	RIS RAS

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT



Lokus Resiko Stunting Kabupaten Malaka Tahun 2022

[illegible]

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.15
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ende
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN												
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL	RISIKO	TIDAK BERISIKO	INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKH IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)					ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA HEMILKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUHAH LAYAK RUMI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	NANGAPANDA	4,354	2,833	449	829	2,780	94	2,716	117	93	314	163	249	664	847	1,468	2,144	1,225	7	1,728	112	1,196
02	PULAU ENDE	1,848	1,001	137	286	973	28	880	121	58	41	2	31	115	133	130	363	561	3	594	53	420
03	ENDE	3,466	2,025	365	603	1,983	63	1,981	44	98	157	258	212	589	783	1,007	1,675	1,177	28	1,130	81	748
04	ENDE SELATAN	5,270	3,003	369	768	2,360	120	2,763	240	134	158	12	62	335	303	1,074	1,828	321	12	1,850	177	1,139
05	NDONA	2,367	1,553	217	415	1,535	37	1,455	98	103	97	142	35	330	264	635	1,118	606	2	357	69	563
06	DETUSOKO	2,351	1,660	279	487	1,641	48	1,610	50	79	113	249	74	435	612	579	1,319	774	5	969	83	684
07	WEWARIA	3,242	2,325	347	656	2,300	63	2,242	83	112	182	480	236	791	486	1,448	1,845	1,183	16	1,250	137	1,028
08	WOLOWARU	3,602	1,838	323	564	1,814	66	1,741	97	81	136	319	130	547	459	801	1,370	791	16	1,015	115	792
09	WOLOJITA	1,526	728	124	197	720	39	716	12	31	68	69	27	167	125	412	646	276	5	437	29	289
10	MAUROLE	1,944	1,491	263	460	1,476	51	1,467	24	81	84	254	84	419	177	896	1,356	576	17	786	94	680
11	MAUKARO	1,521	1,097	199	307	1,084	52	1,060	37	51	212	124	36	371	138	438	896	544	9	569	67	470
12	LIO TIMUR	1,535	915	172	287	904	32	896	19	34	16	231	3	260	461	471	779	504	5	473	59	427
13	KOTA BARU	1,976	1,456	267	519	1,426	59	1,383	73	68	22	363	31	442	269	816	1,177	887	14	684	81	700
14	KELIMUTU	1,305	904	185	311	891	52	863	41	32	2	133	8	170	109	335	674	390	9	467	45	393
15	DETUKELI	1,206	823	168	272	812	34	794	29	59	12	228	3	274	219	420	694	409	12	396	60	407
16	NDONA TIMUR	1,028	668	141	213	651	30	660	8	33	35	199	32	254	414	517	635	374	3	374	38	346
17	NDORI	1,273	691	115	211	672	36	682	9	27	65	109	261	372	113	520	626	353	6	386	28	305
18	ENDE UTARA	4,248	2,105	340	609	2,063	64	2,015	90	93	55	75	89	275	533	1,393	1,733	758	12	1,227	107	807
19	ENDE TENGAH	4,892	2,484	299	542	2,436	40	2,078	406	129	107	17	56	276	20	357	959	270	4	1,544	135	837
20	ENDE TIMUR	3,788	2,152	331	584	2,120	54	1,901	251	74	18	59	155	283	332	448	1,109	467	4	1,309	117	809
21	LEPEMBUSU KELISOKE	1,016	733	154	265	721	27	714	19	25	6	311	28	354	122	549	665	483	14	353	64	356
JUMLAH		54,958	32,485	5,244	9,385	31,962	1,089	30,617	1,868	1,495	1,900	3,797	1,962	7,723	6,919	14,714	23,611	13,529	203	18,498	1,751	13,396

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.16
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Nagekeo
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SAKITANAN	TAKUPAN				KATEGORI KELUARGA BERESIKO RESIKO STUNTING		Pemeriksaan												
				Punya Anak		PUS	PUS NANG			INERATEN PRA DEAKTERA				KELUARGA PRA DEAKTERA	FASILITAS UKURAN TIDAK ZERAT				Pemberian TDAKOR ISU DE BAWAR CTP	PUS 4 TERLALU		
				BABITA (0-29 TAHUN)	BALITA (24 - 59 TAHUN)			ADA ANAK T-PI TARIK TERAK ZEDALAK	TIDAK ADA ANGSDA KELANHA MEMLOI DUMBOI PERHAGALAN UNTUK MEMORON KESLUTERAN POKOR PER DILAK	JENE LANTAI TARKA	TIDAK SETAP ANKADOTA KELUARGA BUKAR "MAGUNAN BERADAM" PAINGI SERTIT 2 (DUA) KALI DEKAW	KELUARGA TERAK MEMUNTAT DUMBOI ADI BERUM LITAMA YANG LATAK	KELUARGA TIDAK MEMUNTAT JARDAN YANG LATAK		KELUARGA TERAK MEMUNTAT BUKANALATAK WUN	TERLALU MUDA (UMUR 10TH < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR 10TH > 35 TAHUN)	TERLALU BEKAT (1-2 TAHUN)		TERLALU BANYAK (> 2 ANAK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	AESESA	9.589	5.814	1.018	1.888	5.078	252	5.474	343	268	296	629	378	1.241	597	1.977	4.183	2.304	28	3.241	234	2.536
02	NANGARORO	4.581	2.457	424	790	2.362	118	2.453	14	113	331	388	328	891	908	2.285	2.487	1.168	6	1.488	75	1.163
03	BOWIAE	7.885	4.445	785	1.427	4.363	159	4.264	181	348	295	884	484	1.529	1.348	1.449	3.028	2.215	11	2.707	188	2.363
04	BAUPONGGO	4.990	2.552	372	791	2.522	103	2.513	89	131	77	187	287	531	991	1.819	2.165	1.368	3	1.858	107	1.368
05	WOLOWAE	1.245	758	138	240	745	48	731	29	38	14	83	225	298	74	320	688	328	3	441	14	345
06	KEO TEVSAH	3.454	1.791	283	551	1.723	72	1.718	43	108	311	113	443	683	728	828	1.475	847	3	1.874	55	369
07	AESESA SELATAN	1.599	1.852	281	367	1.036	64	1.034	18	58	41	219	284	481	578	445	878	547	3	519	36	517
JUMLAH		33.513	18.831	3.298	5.977	18.381	806	18.167	684	948	1.275	2.383	2.438	5.641	4.971	8.121	14.728	8.196	57	11.127	708	9.121

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT



Tabel 5.17
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	Jumlah keluarga	Jumlah keluarga terancam	SALAH				KATEGORI KELUARGA BERESIKO REJES STARTING		PENGARIFAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA DEJAKTERA				KEWARGA PRA DEJAKTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK DEJAT				PENGUNJUKAN TERANCING KOR DEJAKTERA KOR	RISIKO TERJALU	
				BALITA (0-59 BULAN)	BALITA (60-59 BULAN)			ADA ANAK 1-10 TAKUT TIDAK TIDAK	TIDAK ADA ANAK 1-10 TAKUT TIDAK TIDAK	PENGUNJUKAN UNTIL MEMBERI KERTAHAN PUSKES PUSKES	JERUMBAH TAKUT TIDAK	TIDAK SETAP ANAK KOR K									

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.18
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERSTUNTING RENDAH		PENYEBAB													
				UMUR ANAK		PDR	PDR BANGUN			INDIKATOR PRA-SCOUTING				KELUARGA PRA-REKREASI	FAKILITAS LINGKUNGAN TERAKSIK				PENDAPATAN TERAKSIK DI KAWAS CDP	PDR 4 TERAKSIK			
				0-23 BULAN	24-59 BULAN			AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK		TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK		TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK	TERAKSIK AKSI AKSI P-TE TARIK TERAKSIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	WAE RI	5.830	4.340	821	1.396	4.290	256	4.088	251	198		446	468	793	1.431	788	1.544	2.692	2.746	78	1.956	96	2.164
02	BUTUNG	8.706	8.214	1.140	1.907	6.114	327	5.088	312	302		258	411	307	991	1.268	2.343	2.683	3.404	76	2.947	274	3.221
03	SATAR NESE	6.508	5.671	976	1.655	5.617	258	4.771	303	223		638	581	1.284	2.017	908	2.198	2.989	3.257	63	3.201	172	2.337
04	DEAL	5.844	4.282	939	1.301	4.220	248	4.077	211	141		493	688	316	1.612	1.368	2.037	3.242	2.802	108	1.947	86	1.958
11	BECK	4.838	2.980	575	856	2.918	148	2.788	194	98		312	245	375	782	701	1.425	2.038	1.500	48	1.425	84	1.331
12	LANGKE REMBONG	12.806	8.881	1.655	2.876	8.729	384	7.253	1.326	302		434	318	816	1.473	89	1.598	2.882	2.804	68	4.396	305	3.818
13	SATAR NESE BARAT	4.625	2.780	573	852	2.847	115	2.782	58	98		408	258	625	1.077	844	1.358	2.386	1.905	48	1.301	107	1.283
14	BAHONG UTARA	4.712	3.540	722	1.653	3.488	187	3.428	128	173		309	458	624	1.218	564	1.708	2.738	2.542	65	1.555	123	1.783
15	LELAH	2.778	2.089	354	573	2.994	73	2.887	22	88		1.118	188	1.832	1.418	1.138	943	1.284	1.414	38	940	70	895
16	BECK BARAT	2.854	2.283	434	713	2.270	117	2.227	68	123		198	184	308	656	966	1.219	1.883	1.533	32	1.871	48	1.067
17	DEAL BARAT	3.222	2.335	445	796	2.193	146	2.288	36	91		38	218	37	402	377	1.063	2.066	1.546	53	972	44	1.018
18	SATAR NESE UTARA	3.457	2.432	523	741	2.389	171	2.328	103	89		501	249	595	938	538	1.348	1.748	1.879	38	1.827	58	1.083
Jumlah		84.871	67.333	9.187	14.812	46.498	2.432	41.718	3.501	1.388		5.148	4.788	7.432	14.038	10.483	18.602	29.981	26.238	758	21.781	1.490	21.863

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.19
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Gaksiak	TAKSIKAM				KATEGORI KELUARGA BERESIKO STUNTING		PENYEBAB												
				PANTAI BARAT		PUS	PUS BARAT			INDIKATOR RISK SCORING					KELUARGA RIA TERJATARA	FAKTOR LINGKUNGAN LOKAL				PENERIKAN TERAKHIR RPA DI KAWAS RPA	RUS 4 TERLALU	
				BALITA (0-59 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RABID	TIDAK BERESIKO	ADA ANAK 1-10 TAHUN TIDAK BERESIKO	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MENDIRI SUMBER PENDAPATAN UTAMA MEMILIKI PENDAPATAN ROKA ROK BAKAR	JENIS LAYAN TARIK	TIDAK SETIAH ANGGOTA KELUARGA MENDIRI SUMBER PENDAPATAN ROKA ROK BAKAR	KELUARGA RIA TERJATARA		KELUARGA RIA TERJATARA	KELUARGA RIA TERJATARA	KELUARGA RIA TERJATARA	TERLALU RUS (RUS 1-10 TAHUN)		TERLALU RUS (RUS 11-15 TAHUN)	TERLALU RUS (RUS 16-20 TAHUN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	WACANO PACAR	1.570	976	155	124	1.551	40	553	23	40	182	38	254	423	244	683	833	581	18	427	24	482
02	KUMUD	3.444	2.908	393	640	2.031	102	1.089	50	73	156	441	240	754	713	808	1.072	1.140	27	1.815	62	1.831
03	LEMBOR	5.984	5.237	1.842	1.688	5.214	282	4.640	257	283	662	848	516	1.540	1.177	2.178	3.687	3.314	88	2.288	159	2.586
04	SANG RIGORANG	3.386	2.248	395	689	2.221	103	2.086	162	38	116	298	202	516	484	687	1.538	1.229	17	1.111	57	1.813
05	KOMODO	8.946	7.958	1.318	2.184	6.585	371	5.984	1.154	224	224	241	238	857	781	1.438	2.985	2.752	58	2.113	231	2.841
06	BOLING	4.585	3.148	538	974	3.088	159	3.115	34	95	222	218	804	1.185	1.985	1.488	2.848	1.827	47	1.421	116	1.423
07	WELAK	4.958	3.388	640	1.688	3.333	197	3.325	95	92	1.122	388	1.837	1.785	1.684	1.758	2.842	2.294	68	1.532	86	1.782
08	NDOSO	4.319	2.881	516	876	2.682	147	2.788	85	120	661	528	855	1.583	1.681	1.054	2.213	1.579	57	1.423	85	1.586
09	LENGOR SELATAN	6.314	3.793	597	984	3.789	144	3.688	184	130	683	848	888	1.278	484	1.887	2.738	2.588	52	1.877	129	1.889
10	HEBILANG	3.285	2.198	338	651	2.184	109	1.538	188	45	211	224	270	583	438	574	1.291	1.830	18	1.894	48	957
11	PACAR	3.883	2.148	408	127	2.117	146	2.181	38	71	303	308	416	859	974	918	1.838	1.288	38	838	58	1.143
12	KUMUD BARAT	2.487	1.517	275	481	1.488	95	1.481	88	53	128	198	81	482	571	786	1.327	874	15	737	41	831
Jumlah		61.321	36.578	6.598	11.122	36.155	1.888	34.227	2.343	1.188	4.688	4.938	5.458	11.488	11.234	14.144	25.847	21.888	672	17.848	1.682	17.844

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.20
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	Jumlah KELUARGA	Jumlah KELUARGA KAWAN	SASARAN				KATEGORI BERBAHAHA BERHENTI DIBERI STUNTING		INDIKATOR PRA KEJANTARAN										PUS 4 TERALIH			
				PUSYA ANAK		PUS PADA	PUS PADA			INDIKATOR PRA KEJANTARAN				KELUARGA PRA KEJANTARAN	FASILITAS LINGKUNGAN TERAKSEKUT			PENCERMINAN TERHADAP STP	PUS 4 TERALIH				
				BAKATA (0-14 BULAN)	BAKATA (15-59 BULAN)			ADA ANAK 0-14 TAHUN TIDAK DEKAT	TIDAK ADA ANGGARA KEJANTARAN DIBERI PENGHASILAN UNTUK KEJANTARAN PUS 4 TERALIH	ADA ANAK 0-14 TAHUN TIDAK DEKAT	TIDAK ADA ANGGARA KEJANTARAN DIBERI PENGHASILAN UNTUK KEJANTARAN PUS 4 TERALIH	BERBAHAHA TIDAK DEKAT PUS 4 TERALIH	BERBAHAHA TIDAK DEKAT PUS 4 TERALIH		BERBAHAHA TIDAK DEKAT PUS 4 TERALIH	TERALIH MUDA (0-14 BULAN)	TERALIH TUA (15-59 BULAN)		TERALIH KEKAT (1-2 TAHUN)	TERALIH DARI (3-4 TAHUN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	LOURA	3,821	2,480	429	888	2,371	108	2,276	128	167	138	213	47	488	859	1,436	1,819	1,158	18	1,282	132	1,265	
02	WEWEWA ITARA	2,286	1,588	389	623	1,531	116	1,559	9	79	391	184	553	817	1,322	753	1,430	893	14	796	72	807	
03	WEWEWA TIMUR	4,847	3,334	686	1,239	3,262	384	3,306	28	195	352	385	182	863	2,898	2,468	2,139	1,826	28	1,885	221	1,557	
04	WEWEWA BARAT	5,482	4,188	621	1,383	4,181	122	4,195	21	356	745	532	1,082	1,914	2,852	1,850	4,060	2,825	32	1,980	312	1,913	
05	WEWEWA SELATAN	4,380	2,749	427	815	2,681	82	2,741	2	199	491	223	1,038	1,388	2,857	2,123	2,738	1,686	33	1,419	186	1,508	
06	KODIBANGDIO	4,847	3,852	619	1,662	3,761	268	3,846	3	271	498	659	271	1,548	3,166	3,234	3,803	2,604	81	1,543	289	1,955	
07	KODI	5,322	4,172	889	1,715	4,181	304	4,131	41	396	556	911	329	1,475	2,779	3,421	4,895	2,853	55	1,726	257	1,988	
08	KODI UTARA	11,376	8,211	1,619	3,234	7,983	625	8,191	88	627	2,381	2,079	1,082	4,327	4,850	7,386	8,844	5,884	143	3,510	681	4,222	
09	KOTA TAMBOLAKA	5,489	4,180	735	1,588	3,988	227	3,871	223	332	395	289	147	825	925	1,830	2,863	1,451	25	2,866	286	2,123	
10	WEWEWA TENGAH	4,970	3,780	741	1,482	3,796	223	3,731	43	315	732	353	396	1,292	2,843	2,825	3,433	1,941	23	1,852	282	2,143	
11	KODIBALAHAR	2,384	1,976	527	945	1,943	277	1,874	2	156	352	228	81	728	1,844	1,757	1,971	1,358	48	723	142	1,336	
JUMLAH		54,234	48,325	8,173	15,483	39,456	2,902	38,836	538	2,972	8,881	6,278	5,188	15,752	37,235	28,290	37,823	22,591	494	18,852	2,753	28,587	

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.21
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		INDIKATOR PRA SEJANTERA				KELUARGA PRA SEJANTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT				PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLIP	PUS 4 TERLALU			
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MENILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAMAK "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MENPUNTAI SUMBER AIR MINUM UTAMA TANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MENPUNTAI JAMBAH TANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MENPUNTAI RUMAH LAYAK HUNI	TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)		TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (≥ 3 ANAK)	
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	MIOMAFO TIMUR	2,819	1,354	304	516	1,319	51	1,277	77	75	58	198	243	442	170	246	788	656	5	776	37	801	
02	MIOMAFO BARAT	3,584	1,689	374	570	1,611	82	1,572	117	86	54	446	120	531	202	613	1,081	800	15	367	64	738	
03	BIBOKI SELATAN	2,146	1,136	278	423	1,071	52	1,106	30	74	141	468	56	564	138	444	343	675	5	615	40	568	
04	NOEMUTI	2,352	1,313	223	350	1,280	48	1,200	113	57	70	143	105	317	256	260	670	672	10	712	23	459	
05	KOTA KEFAMENANU	10,052	5,384	1,073	1,880	5,818	235	5,410	574	333	165	609	310	1,201	390	1,362	3,279	1,409	15	3,469	273	2,789	
06	BIBOKI UTARA	2,336	1,450	288	537	1,396	79	1,391	59	34	116	236	109	456	33	678	1,076	784	17	733	60	737	
07	BIBOKI ANLEU	3,391	2,017	300	636	1,958	76	1,379	38	143	144	1,023	133	1,200	535	885	1,724	1,310	13	1,072	33	1,065	
08	INSANA	4,588	2,469	453	824	2,342	101	2,369	100	152	133	565	116	815	612	1,047	1,306	1,271	23	1,337	33	1,305	
09	INSANA UTARA	2,138	1,376	288	527	1,339	51	1,230	86	81	53	241	30	387	170	240	363	764	6	705	62	771	
10	NOEMUTI TIMUR	333	512	84	210	431	28	507	5	48	36	175	24	239	192	334	479	265	3	267	22	264	
11	MIOMAFFO TENGAH	1,389	752	144	244	736	45	739	13	35	10	176	16	220	385	148	652	401	4	431	24	383	
12	MUSI	1,127	579	117	216	558	31	538	41	22	47	156	5	201	3	206	383	321	2	322	18	287	
13	MUTIS	1,474	886	173	231	860	34	868	18	34	102	514	252	651	151	345	684	643	13	444	47	456	
14	BIKOMI SELATAN	2,280	1,347	233	460	1,318	40	1,260	87	38	25	188	64	318	346	306	821	731	17	737	50	634	
15	BIKOMI TENGAH	1,735	939	153	293	906	34	916	23	40	41	384	105	484	154	425	713	630	8	514	40	437	
16	BIKOMI NILULAT	1,075	538	79	176	521	26	531	7	32	16	129	8	163	219	267	423	372	5	306	13	264	
17	BIKOMI UTARA	1,417	672	128	236	655	28	644	28	42	39	168	21	237	171	106	475	389	4	403	16	386	
18	NAIBENU	1,136	593	121	225	571	27	566	27	42	43	144	13	203	41	227	442	338	3	360	21	370	
19	INSANA FAFINESU	1,372	767	134	243	755	51	706	61	35	4	203	118	307	53	152	332	436	5	427	17	436	
20	INSANA BARAT	2,427	1,291	268	439	1,243	64	1,257	34	42	27	347	37	441	216	730	1,104	635	12	634	48	639	
21	INSANA TENGAH	2,392	1,407	255	453	1,366	80	1,372	35	61	31	280	142	446	364	636	1,160	827	13	764	43	727	
22	BIBOKI TAN PAH	1,262	743	125	283	728	36	729	14	46	71	222	16	302	85	362	654	415	5	360	23	369	
23	BIBOKI MOENLEU	1,567	346	169	331	327	34	312	34	54	54	353	3	413	105	150	701	575	9	514	43	544	
24	BIBOKI FEOTLEU	842	439	112	188	489	23	487	12	20	2	220	27	232	66	133	421	331	4	232	11	308	
JUMLAH		56,440	31,259	5,900	10,623	30,264	1,356	29,626	1,633	1,752	1,482	7,660	2,259	10,830	5,717	10,428	21,940	15,836	216	17,341	1,193	16,037	

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.22
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	TAKSIK				KATEGORI KEJANGGARAN BERDASARKAN PERIKERSTUNTING		PERAWATAN												
				POTENSI ANAK		PIE	POK KEMAS			INDIKATOR PRA KEAWTUK				KEJANGGARAN PRA KEAWTUK	FASILITAS LINGKUNGAN TERDEKAT				PENGHAKIMAN TERPADU BERDASARKAN RUPA	PUS 4 TERLUAS		
				KADITA (9-23 BULAN)	KADITA (24-59 BULAN)			ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KEJANGGARAN MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKER PER ORANG	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK TERJADI ANGGOTA KEJANGGARAN MELAKUKAKAN "MAKARAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 3 (DUA) KALI TAHUN	KEJANGGARAN TIDAK MEMILIKI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KEJANGGARAN TIDAK MEMILIKI JANGKAR YANG LAYAK		KEJANGGARAN TIDAK MEMILIKI RUMAH LAYAK SAKIT	TERLUAS MELAKUKAKAN (UMUM DITINGGI 1-25 TAHUN)	TERLUAS TIDAK (UMUM DITINGGI 1-25 TAHUN)	TERLUAS DEKAT (1-2 TAHUN)		TERLUAS JAUH (2-3 ANAK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	SABU BARAT	6.896	3.711	662	1.434	3.961	171	3.499	212	308	856	548	758	1.702	552	1.118	2.844	1.517	24	1.793	271	1.994
02	SABU TENGAH	2.896	1.087	265	461	1.817	84	1.843	24	36	163	73	88	316	173	623	960	515	8	491	51	621
03	SABU TIMUR	2.116	1.029	298	398	885	60	968	61	38	88	48	135	215	189	188	753	488	4	471	58	552
04	SABU LAM	1.833	1.077	255	391	1.306	31	1.839	38	71	176	118	172	415	186	325	828	583	9	540	77	811
05	SAWU REHARA	3.243	1.888	465	678	1.743	59	1.757	49	168	145	69	429	648	269	598	1.548	1.263	10	841	103	1.973
06	RAIJEBA	2.173	1.074	288	426	1.815	42	1.855	19	91	275	222	444	624	215	623	880	741	5	538	58	588
Jumlah		18.178	9.784	2.243	3.703	9.307	447	9.381	453	731	1.783	1.158	2.018	3.961	1.364	3.467	8.889	5.114	53	4.774	519	1.439

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.23
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	Jumlah Keluarga Beres	CACAKAN				KAPASITAS KELUARGA BERFUNGSI SEBAGAI		INDIKATOR PER KEKAWATAN				PENYERAPAN					PILIHAN TINGKAP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				PILIHAN		PAC	PAC RARE			INDIKATOR PER KEKAWATAN				FAKULTAS LINGKUNGAN HIDUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				BERAKSI (P-20 BULAN)	BERAKSI (24 - 59 BULAN)			AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH	AKSI AKSI TUMBUH

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.24
Lokus Resiko Stunting Kota Kupang
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	Jumlah keluarga	Jumlah Rumah Satisfaksi	SATISFAKSI				KATEGORI KELUARGA KEPERLUAN DESAK STUNTING		PEMBANGUNAN												
				PUTRA ANAK		PDR	PDR BAKAR			INDIKATOR PRA SELAKTERA				KELUARGA PRA SELAKTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT				PERBEDAAN TERPADAS BDI DI BAWAH STP	PER 4 TERPADU		
				RAKITA (0-12 TAHUN)	RAJITA (13 - 19 TAHUN)			ADA ANAK 0- 11 TAHUN TERAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANAK/TA KELUARGA MENEMUKI SUMBER PENYASIKAN UNTUK MEMORIS EKSTERNAL PDR FOR DALAM	JANG LAMAI TANPA	TIDAK SETIAH ANAK/TA KELUARGA MURAH "MAKARAN BUDIDAYA" PALING SEDIKIT 2 (TUA) KALI BAWA	SEKITA TIDAK MENEMUKI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MENEMUKI JALAN YANG LAYAK		KELUARGA TIDAK MEMILIKI RUANG LAYAK RUMI	TERPADAS BUSI (JANG LAMAI 2-25 TAHUN)	TERPADAS TUA (JANG LAMAI 1-25 TAHUN)	TERPADAS SOKAT (1-2 TAHUN)		TERPADAS BANYAK (0-5 ANAK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	ALAK	10,082	9,889	1,581	2,767	8,615	280	8,804	1,065	512	431	345	644	1,877	902	2,759	4,812	1,984	24	4,909	508	2,891
02	BAILABA	16,081	16,572	1,885	3,266	10,282	389	9,213	1,359	483	437	457	418	1,506	1,385	1,083	4,786	1,828	17	6,942	573	4,341
03	KILAPA LIMA	11,182	8,234	178	1,521	6,066	267	5,516	766	369	301	187	238	575	765	1,428	3,447	1,218	18	3,508	367	2,591
04	OEBORO	12,015	8,262	684	1,470	6,119	132	5,350	912	486	298	113	354	897	307	588	2,496	925	12	3,979	353	2,550
05	KOTA RAJA	8,146	4,247	637	1,148	4,065	189	3,898	548	165	247	134	118	572	481	615	1,891	325	9	2,572	258	1,888
06	KOTA LAMA	5,489	2,712	337	746	2,608	82	2,379	333	127	132	48	238	404	378	568	1,306	307	3	1,837	148	895
Jumlah		66,756	39,839	6,688	10,918	37,865	1,189	34,783	4,863	2,042	1,348	1,269	2,003	8,136	6,398	7,029	18,737	6,701	54	22,898	2,168	16,847

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT



BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai tahun akhir pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan yang diturunkan pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun Lembaga donor/mitra.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Perencanaan dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 dengan jumlah total Rp. 5,593,190,664,883 yang dididtribusikan ke 39 (tiga puluh sembilan) perangkat daerah se Provinsi NTT.

Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,881,287,330,999
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313,990,164,719
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258,099,749,021
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	958,781,204,902
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15,875,038,248
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,246,918,590
7	Dinas Sosial	42,950,782,492

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,494,026,384
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	127,436,220,021
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91,237,713,746
11	Dinas Perhubungan	57,631,551,599
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,729,020,352
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30,839,818,286
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,585,555,579
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33,451,351,426
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,807,565,078
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	56,058,354,884
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43,919,841,112
19	Dinas Peternakan	47,273,226,775
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68,863,150,954
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20,733,812,951
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41,130,647,232
23	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	128,042,930,346
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170,261,084,336
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29,866,661,853
26	Badan Keuangan Daerah	876,910,007,501
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118,951,964,986
28	Badan Kepegawaian Daerah	14,674,381,084
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49,735,470,294
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7,322,844,242
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	8,696,850,000
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19,366,126,757
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,939,298,134
	TOTAL	5,593,190,664,883

Kemudian alokasi pagu per program per urusan dengan rinciannya dimana untuk jumlah pagu indikatif non urusan (program penunjang urusan pemerintahan daerah pada 39 perangkat daerah sebesar Rp. 2,087,200,979,176. Sedangkan untuk jumlah pagu indikatif urusan sebesar Rp. 3,505,989,685,707, seperti pada Tabel 6.2. dibawah ini :

Tabel 6.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah per Program Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Non Urusan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	2.087.200.979.176	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	%	100		
	Tercapainya Penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100		
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah			887.230.885.280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	100		
	- APS SLB	%	100		
	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	75		
Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B			1.168.776.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	13%		
	2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	35,0		
	3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	19,0		
	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun			0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	74,97		
	2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	74,86		
	3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	74,78		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	66,67	209.502.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				240.895.421.916	
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	%	84,9		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%	71,4		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Bayi	Kasus	0		
	Kasus Kematian Balita	Kasus	0		
	Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	%	7,5		
	Underweight	%	15,4		
	Prevalensi Stunting	%	16,0		
	Angka Kelahiran Total (TFR)	Poin	2,8		
	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	53		
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	%	66,7		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kasus HIV yang diobati	%	54		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	%	77,3		
	Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	%	77,3		
	Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	%	95,5		
	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
	Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	%	50		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	%	74,16	53.049.277.337	DINAS KESEHATAN
	Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	%	73,58		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	81,00		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100,00		RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100,0	0	DINAS KESEHATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	86,4	0	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	%	72,7		DINAS KESEHATAN
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target	%	33,10	221.038.746.174	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	pembangunan 142 embung)				
	Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	66,90		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	%	76.74		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	%	64,42		Dinas PUPR
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	%	80		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	95.45		Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	85	19.350.000.000	Dinas PUPR
	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	80		Dinas PUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	64	3.450.000.000	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	72	4.250.000.000	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	0	6.750.000.000	Dinas PUPR
Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	%	90	88.107.574.000	Dinas PUPR
	Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	70		Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	%	63,64		Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	%	3	3.510.000.164	Dinas PUPR
	Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	%	60	-	Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	66	300.000.000	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	%	100	486.479.057.932	Dinas PUPR
	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	100		Dinas PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waktu, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	84	745.274.820	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	42,2	6.937.287.709	Dinas PUPR
	Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	14,3		Dinas PUPR
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	67	6.457.208.900	Dinas PUPR
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	72	40.307.582.192	Dinas PUPR
	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	80		Dinas PUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	78	12.720.895.050	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	1.404.298.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	%	80	5.605.216.790	BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	80		BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	66,6		BPBD
	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	%	87,5		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	43.535.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	85		
	Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:				
	a. Kebakaran	%	85		
	b. Non Kebakaran	%	85		
6. Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	%	90	2.980.219.450	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%	90	261.008.900	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%	90	10.121.567.042	DINAS SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	90	4.057.162.900	DINAS SOSIAL

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	90	713.283.800	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	%	100	84.000.000	DINAS SOSIAL
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Tenaga Kerja					
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	80	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	55		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	50	600.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi meningkatnya PMI prosedural	%	75		
Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	70	250.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	80		
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	%	55	150.000.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	%	55		
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	%	50,7	307.780.140	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	%	90		
Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	%	80	782.989.599	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	%	80		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	%	50	233.592.410	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	80		ANAK
	Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	%	62,5		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	40	124.695.060	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	%	75,6	431.882.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	%	55,2	302.430.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. Pangan					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	%	2,79	1.184.937.760	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	%	9,30		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	%	25,07	206.419.680	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	%	74,42	382.098.400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
4. Pertanahan					
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	54,55	111.089.600	Dinas PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	54,55	87.703.600	Dinas PUPR
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	127.311.600	Dinas PUPR
Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	994.489.400	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	121.486.600	Dinas PUPR
Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	0	Dinas PUPR
5. Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	78,26	576.452.600	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,42	1.324.280.692	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%	27,33	3.141.513.580	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%	79,09	383.374.600	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	16,67	104.666.000	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	41,67	174.664.300	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	26	955.077.100	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	97	2.418.201.000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	80		DINAS KESEHATAN
	Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	90		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	%	76,9		DINAS KESEHATAN
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	%	100	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Peningkatanan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	%	68,2	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	66,7	2.342.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat			78.570.218.246	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	%	88,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	%	91,73		
	Adat (Target 2023= 132 Unit)	%	66,67		
	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PKK Aktif	%	80		
	Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	%	88		
8. Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	30	4.590.588.653	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	30	34.457.954.034	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	60		DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	100	0	DINAS PERHUBUNGAN
9. Komunikasi dan Informatika					
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	Skor	85 (Menuju Informatif)	1.482.914.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	68,2		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	2,5	1.648.079.860	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	96	2.255.674.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	5		
	Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	15		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	83	1.164.290.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	68		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	74		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	82		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	25	175.000.000	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	66.66	195.000.000	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	576.219.491	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	150.000.000	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	150.000.000	DPMPTSP
	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100		DPMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
12. Kepemudaan dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%	90,0	2.800.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik			15.251.351.426	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Medali (200 buah)	%	75,0		
	Cabor (13 cabor)	%	92,3		
	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Cabor tradisional	%	100,0		
	Cabor rekreasi	%	100,0		
	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	Medali/%	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	%	65,2	700.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13. Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	%	100	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	%	100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14. Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	4-4,9 (Baik)	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
15. Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	49,46	1.762.997.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	8	3.352.976.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	8		
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	38	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	26	1.342.994.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80	4.015.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16. Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan <i>e-library</i>	%	100	1.823.052.800	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	75,0		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	%	45,5	70.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	45,5		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
17. Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,0	770.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,0	103.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1. Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	%	94	1.340.000.000	DKP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	6	29.854.523.274	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	6		DKP
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	10	855.000.000	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	10		DKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	20	1.705.000.000	DKP
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	8,70	440.000.000	DKP
2. Pariwisata					
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	42,27	13.515.445.299	DISPAREKRAF
	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	79,17		
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	42,27	10.748.474.569	DISPAREKRAF
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	5,00	3.843.312.200	DISPAREKRAF
	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	93,75		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut			2.964.829.200	DISPAREKRAF

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Ekonomi Kreatif	jenis keahliannya:				
	a. Tour operator	%	79,17		
	b. Guide/Pemandu Wisata	%	79,17		
	c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	79,17		
	d. Restourant	%	79,17		
	e. Perhotelan	%	79,17		
	f. Pramuwisata	%	79,17		
	g. Transportasi	%	79,17		
	h. Informasi	%	79,17		
	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	79,17		DISPAREKRAF
3. Pertanian					
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:			35.000.614.690	DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
	Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting				
	a. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	Ekor	21.306.593		
	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate				
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi			5.233.178.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	%	95,24		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	%	76,09		
	Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	%	95,23		
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	%	95		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi				
	Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	%	100		
	Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	%	100		
	Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	%	95		
	Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	%	93		
	Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	%	90		
	Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	%	90		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	%	87		
	Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	%	91		
	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	98,52		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	99		
	Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	99		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	99		
	Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	99		
	Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	97		
	Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	97		
	Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	100		DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	93		
	- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	93		
	- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	95		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	91		PETERNAKAN
	- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	94		
	- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	89		
	c. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	94		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	%	80	2.360.778.441	DINAS PETERNAKAN
	Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	20		DINAS PETERNAKAN
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	75	740.616.480	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas			2.200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	%	60		
	Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	%	50		
	Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	%	50		
	Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	%	66,67		
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	%	80,77		
4. Kehutanan					
Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22	18.707.175.473	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	4,2	926.758.620	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	75		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	32,75	1.485.267.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	10,32		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	%	0,25	435.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5. Energi dan Sumber Daya Mineral					
Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	15,79	1.443.762.710	Dinas ESDM
	Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	91,53		Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	%	100	519.854.580	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	17.28/ (17.85)	1.994.172.460	Dinas ESDM
	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	18.88/ (8,93)		Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	59	2.018.467.900	Dinas ESDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	%	33		Dinas ESDM
6. Perdagangan					
Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	75	449.357.600	DISPERINDAG
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	%	50	75.000.000	DISPERINDAG
Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	1.078.296.440	DISPERINDAG
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10		DISPERINDAG
	b. Barang Penting	%	10		DISPERINDAG
Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	28,57	899.195.300	DISPERINDAG
Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	55,7	1.683.698.500	DISPERINDAG
	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	44,12		DISPERINDAG
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	70	10.833.595.800	DISPERINDAG
	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	70		DISPERINDAG
7. Perindustrian					
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	2,24	12.831.797.970	DISPERINDAG
Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	70	89.325.740	DISPERINDAG
Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	%	11,42	309.765.000	DISPERINDAG
8. Transmigrasi					
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	85	225.000.000	Dinas Koperasi, Nakertrans

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	85	300.000.000	Dinas Koperasi, Nakertrans
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%	85	475.000.000	Dinas Koperasi, Nakertrans
Pendukung Urusan Pemerintahan					
1.Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	(disatukan nilainya ke Non Urusan)	BIRO UMUM
Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	92.98	1.340.199.720	BIRO ORGANISASI
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	1.076.503.000	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	%	100	13.046.546.100	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Fasilitasi dan Koordinasi	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah	%	100	1.336.802.700	BIRO HUKUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Hukum	yang diselesaikan setiap tahun				
	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	100		BIRO HUKUM
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67	925.899.724	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
	Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67		
	Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	%	66,67		
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	100	6.950.360.700	Biro PBJ
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	600.472.326	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100	78.007.942.210	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
Penunjang Urusan Pemerintahan					
1. Perencanaan					
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi Daerah	%	100	2.737.238.638	BAPPELITBANG DA
	Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	%	100		BAPPELITBANG DA
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	7.605.560.300	BAPPELITBANG DA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	100		BAPPELITBANG DA
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	%	100		BAPPELITBANG DA
2. Keuangan					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	857.826.055.981	Badan Keuda
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	5.581.000.000	BAPENDA
	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100		BAPENDA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	34,04	20.415.000.000	BAPENDA
3. Kepegawaian					
Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	100	3.492.859.700	BKD
	Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	%	100		BKD
4. Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	Akreditasi	Kepemimpinan "A"	32.459.107.970	BPSDM
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	%	100		BPSDM
	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	%	100		BPSDM
	Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan	%	80		BPSDM



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	pelatihan				
5. Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	82,86	2.116.530.314	BAPPELITBANG DA
	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	96,55		BAPPELITBANG DA
	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	%	60,00		BAPPELITBANG DA
6. Pengelolaan Perbatasan					
Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	67	804.999.600	BADAN PERBATASAN DAERAH
	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	67		BADAN PERBATASAN DAERAH
7. Pengelolaan Penghubung					
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	%	75	741.365.000	BADAN PENGHUBUNG
	Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	%	100		
	Meningkatnya cakupan promosi daerah	%	100		
Pengawasan Urusan Pemerintahan					
1. Inspektorat Daerah					



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	5.009.347.800	INSPEKTORAT DAERAH
	OPINI BPK	Opini	WTP		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	%	100	1.601.575.901	INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintahan Umum					
1. Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%	85,1	400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	%	90,6	3.242.430.050	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	65,3	140.234.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	401.291.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%	100	5.783.365.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Total Non Urusan				2.087.200.979.176	
Total Urusan				3.505.989.685.707	
Total Urusan + Non Urusan				5.593.190.664.883	

Penetapan pagu indikatif perangkat daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa total pagu indikatif Urusan adalah sebesar kurang lebih 5,593 Triliun, dan pagu indikatif Non Urusan sebesar kurang lebih 2,087 Triliun atau dengan P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 selisih kurang sebesar 1,906 Triliun seperti pada Tabel 6.3. Dimana terdapat deviasi pagu indikatif yang cukup besar antara P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023. Terkait deviasi perhitungan indikasi anggaran ini dapat dijelaskan bahwa asumsi perhitungan dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengakomodir program – program prioritas daerah yang langsung berkontribusi pada Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, namun kenyataannya asumsi tersebut tidak dapat digunakan dalam perhitungan pendapatan dan pembiayaan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2023, misalnya: a. asumsi perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan seperti Program TJPS yang seharusnya berkontribusi langsung pada kenaikan PAD namun tidak dapat dilaksanakan karena merupakan belanja hibah; b. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada P-RPJMD diproyeksikan naik akan tetapi pada Tahun 2021 dan 2022 realisasinya menurun, c. Pada P-RPJMD penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah disumsikan juga terjadi untuk sektor ekonomi (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) akan tetapi skema pinjaman untuk sektor – sektor tersebut tidak terealisasi. Pinjaman yang terealisasi hanya berupa pinjaman untuk pembangunan Infrastruktur dari skema pembiayaan PT. SMI. Asumsi – asumsi tersebut tentunya sangat mempengaruhi konstelasi perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagai inputan untuk belanja dan pengeluaran penerimaan yang pada akhirnya mempengaruhi penetapan target dan pagu indikatif pada RKPD 2023.

Dengan demikian, terhadap ketidaksesuaian pagu dana per program setiap perangkat daerah dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa pagu pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 merupakan pagu indikatif sedangkan pagu pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kondisi riil keuangan dan disesuaikan dengan kemampuan kapasitas keuangan daerah.

Tabel 6.3
Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		NON URUSAN	2,573,424,163,776	2,087,200,979,176	-486,223,184,600	
	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,573,424,163,776	2,087,200,979,176	-486,223,184,600	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,261,774,144,699	2,108,227,783,056	-1,153,546,361,643	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2,026,963,335,327	888,609,164,180	-1,138,354,171,147	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2,024,279,105,537	887,230,885,280	-1,137,048,220,257	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,021,160,000	1,168,776,500	147,616,500	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	850,515,500	0	-850,515,500	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	812,554,290	209,502,400	-603,051,890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	268,397,951,105	293,944,699,253	25,546,748,148	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240,423,900,642.43	56,055,466,800	-184,368,433,842	
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26,747,521,963	22,007,907,697	-4,739,614,266	
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	950,853,500	0	-950,853,500	
4	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	184,839,955,116	184,839,955,116	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	31,041,369,640	31,041,369,640	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
6	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	275,675,000	0	-275,675,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	880,867,229,016	840,917,940,799	-39,949,288,217	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	230,552,413,581	221,038,746,174	-9,513,667,407	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,112,488,220	19,350,000,000	12,237,511,780	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	747,495,000	3,450,000,000	2,702,505,000	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	4,250,000,000	4,250,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,000,000,000	6,750,000,000	3,750,000,000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	119,286,650,153	88,107,574,000	-31,179,076,153	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	964,067,445	3,510,000,164	2,545,932,719	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	300,000,000	300,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	508,561,982,990.97	486,479,057,932	-22,082,925,059	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3,392,588,789	745,274,820	-2,647,313,969	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7,249,542,837	6,937,287,709	-312,255,128	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61,233,833,608	59,485,686,142	-1,748,147,466	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,250,000,000	6,457,208,900	4,207,208,900	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44,735,271,907	40,307,582,192	-4,427,689,715	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14,248,561,701	12,720,895,050	-1,527,666,651	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,781,185,606	7,053,050,590	3,271,864,984	
1	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,585,749,356	1,404,298,800	-2,181,450,556	
2	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	195,436,250	43,535,000	-151,901,250	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	5,605,216,790	5,605,216,790	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20,530,610,037	18,217,242,092	-2,313,367,945	
1	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4,383,851,461	2,980,219,450	-1,403,632,011	
2	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	266,258,974	261,008,900	-5,250,074	
3	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11,615,319,471	10,121,567,042	-1,493,752,429	
4	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3,558,124,078	4,057,162,900	499,038,822	
5	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	627,890,720	713,283,800	85,393,080	
6	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79,165,333	84,000,000	4,834,667	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	179,370,419,880	176,536,949,031	-2,833,470,849	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	787,900,592	1,000,000,000	212,099,408	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	341,731,657	0	-341,731,657	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	209,810,028	600,000,000	390,189,972	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110,955,874	250,000,000	139,044,126	
4	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	125,403,033	150,000,000	24,596,967	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,664,506,896	2,183,370,659	-2,481,136,237	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,921,191,353	307,780,140	-1,613,411,213	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,072,452,696	782,989,599	-289,463,097	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	506,010,146	233,592,410	-272,417,736	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	195,772,674	124,695,060	-71,077,614	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	871,022,552	431,882,500	-439,140,052	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	98,057,475	302,430,950	204,373,475	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3,899,092,801	1,773,455,840	-2,125,636,961	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3,417,060,566	1,184,937,760	-2,232,122,806	
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135,674,583.04	206,419,680	70,745,097	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	346,357,651.95	382,098,400	35,740,748	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	368,863,406	1,442,080,800	1,073,217,394	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	0	111,089,600	111,089,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	87,703,600	87,703,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	127,311,600	127,311,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	994,489,400	994,489,400	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	121,486,600	121,486,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	368,863,406	0	-368,863,406	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12,942,542,131	6,695,028,872	-6,247,513,259	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,083,129,502	576,452,600	-506,676,902	
2		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	35,000,000	35,000,000	Tidak ada di dalam P-RPJMD
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,141,862,333	1,324,280,692	-817,581,641	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7,963,490,227	3,141,513,580	-4,821,976,647	
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	321,657,183	383,374,600	61,717,417	
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	564,693,511	104,666,000	-460,027,511	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	289,104,046	174,664,300	-114,439,746	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	578,605,329	955,077,100	376,471,771	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664,891,980	2,418,201,000	1,753,309,020	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	664,891,980	2,418,201,000	1,753,309,020	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40,750,855,080	80,987,718,246	40,236,863,166	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0	75,000,000	75,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0	
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,129,027,040	2,342,500,000	213,472,960	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	38,621,828,040	78,570,218,246	39,948,390,206	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29,784,267,514	39,048,542,687	9,264,275,173	
1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,667,820,456	4,590,588,653	922,768,197	
2	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24,704,988,168	34,457,954,034	9,752,965,866	
3	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1,411,458,890	0	-1,411,458,890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,569,574,642	3,130,994,560	-1,438,580,082	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,177,645,337	1,482,914,700	305,269,363	
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,391,929,305	1,648,079,860	-1,743,849,445	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2,129,223,847	3,419,964,000	1,290,740,153	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	2,255,674,000	2,255,674,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,129,223,847	1,164,290,000	-964,933,847	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2,451,539,522	1,246,219,491	-1,205,320,031	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	477,729,396	175,000,000	-302,729,396	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	624,211,565	195,000,000	-429,211,565	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	830,607,516	576,219,491	-254,388,025	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	358,298,711	150,000,000	-208,298,711	
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	160,692,334	150,000,000	-10,692,334	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	53,679,971,652	18,751,351,426	-34,928,620,226	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,173,355,891	2,800,000,000	-373,355,891	
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	49,420,851,761	15,251,351,426	-34,169,500,335	
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,085,764,000	700,000,000	-385,764,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	108,482,373	400,000,000	291,517,627	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108,482,373	400,000,000	291,517,627	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	302,561,841	500,000,000	197,438,159	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	302,561,841	500,000,000	197,438,159	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14,883,579,786	10,773,968,650	-4,109,611,136	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8,156,988,367	1,762,997,750	-6,393,990,617	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,776,160,113	3,352,976,700	576,816,587	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	271,441,000	300,000,000	28,559,000	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2,477,588,097	1,342,994,200	-1,134,593,897	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1,201,402,209	4,015,000,000	2,813,597,791	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,579,857,755	1,893,052,800	-3,686,804,955	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5,579,857,755	1,823,052,800	-3,756,804,955	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	70,000,000	70,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1,802,708,062	873,000,000	-929,708,062	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,476,979,047	770,000,000	-706,979,047	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	325,729,015	103,000,000	-222,729,015	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	229,062,613,013	167,582,264,086	-61,480,348,927	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	56,782,533,854	34,194,523,274	-22,588,010,580	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2,913,302,843	1,340,000,000	-1,573,302,843	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29,859,875,000	29,854,523,274	-5,351,726	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	18,372,652,563	855,000,000	-17,517,652,563	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,608,203,448	1,705,000,000	-2,903,203,448	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,028,500,000	440,000,000	-588,500,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21,664,865,188	31,072,061,268	9,407,196,080	
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9,500,000,000	13,515,445,299	4,015,445,299	
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,998,972,691	10,748,474,569	7,749,501,878	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6,248,182,400	3,843,312,200	-2,404,870,200	
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,917,710,097	2,964,829,200	47,119,103	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62,055,353,181	45,535,187,611	-16,520,165,570	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,405,624,440	5,233,178,000	-172,446,440	



NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,031,360,970	740,616,480	-290,744,490	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,443,610,156	2,200,000,000	-1,243,610,156	
4	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	47,302,845,316	35,000,614,690	-12,302,230,626	
1	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4,871,912,299	2,360,778,441	-2,511,133,858	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	61,506,334,281	21,554,201,933	-39,952,132,348	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50,891,993,376	18,707,175,473	-32,184,817,903	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9,108,559,656	926,758,620	-8,181,801,036	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1,379,440,176	1,485,267,840	105,827,664	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	126,341,073	435,000,000	308,658,927	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5,131,074,409	5,976,257,650	845,183,241	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1,638,364,891	1,443,762,710	-194,602,181	
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	677,616,948	519,854,580	-157,762,368	
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1,534,574,821	1,994,172,460	459,597,639	
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,280,517,749	2,018,467,900	737,950,151	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9,815,891,811	15,019,143,640	5,203,251,829	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	211,435,112	449,357,600	237,922,488	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	287,082,516	75,000,000	-212,082,516	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,290,320,114	1,078,296,440	-212,023,674	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	848,202,963	899,195,300	50,992,337	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3,219,860,981	1,683,698,500	-1,536,162,481	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3,958,990,125	10,833,595,800	6,874,605,675	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11,563,679,388	13,230,888,710	1,667,209,322	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11,017,608,955	12,831,797,970	1,814,189,015	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	326,750,513	89,325,740	-237,424,773	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	219,319,920	309,765,000	90,445,080	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	542,880,901	1,000,000,000	457,119,099	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62,200,933	225,000,000	162,799,067	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	289,884,167	300,000,000	10,115,833	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	190,795,801	475,000,000	284,204,199	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	247,217,368,972	103,284,726,480	-143,932,642,492	
		SEKRETARIAT DAERAH	168,723,220,975	25,276,784,270	-143,446,436,705	
1	Biro Umum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143,303,498,014	0	0	Disatukan ke Non Urusan
2	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3,543,199,068	1,336,802,700	-2,206,396,368	
3	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4,402,714,747	1,340,199,720	-3,062,515,027	
4	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2,308,594,926	1,076,503,000	-1,232,091,926	
5	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,505,603,684	13,046,546,100	6,540,942,416	
6	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,855,122,918	925,899,724	-929,223,194	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
7	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	32,572,486	600,472,326	567,899,840	
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6,771,915,132	6,950,360,700	178,445,568	
		SEKRETARIAT DPRD	78,494,147,997	78,007,942,210	-486,205,787	
1	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78,494,147,997	78,007,942,210	-486,205,787	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	985,173,730,015	933,779,717,503	-51,394,012,512	
		PERENCANAAN	11,242,677,348	10,342,798,938	-899,878,410	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,646,667,551	2,737,238,638	-909,428,913	
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7,596,009,797	7,605,560,300	9,550,503	
		KEUANGAN	898,123,311,051	883,822,055,981	-14,301,255,070	
1	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	846,128,806,654	857,826,055,981	11,697,249,327	
2	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	1,200,000,000	1,200,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,209,239,129	4,381,000,000	-1,828,239,129	
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	45,785,265,268	20,415,000,000	-25,370,265,268	
		KEPEGAWAIAN	10,581,622,617	3,492,859,700	-7,088,762,917	
1	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10,581,622,617	3,492,859,700	-7,088,762,917	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	51,965,003,999	32,459,107,970	-19,505,896,029	
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	51,965,003,999	32,459,107,970	-19,505,896,029	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,400,306,077	2,116,530,314	-1,283,775,763	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,400,306,077	2,116,530,314	-1,283,775,763	
		PENGELLOAAN PERBATASAN	4,327,778,302	804,999,600	-3,522,778,702	
1	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	4,327,778,302	804,999,600	-3,522,778,702	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P- RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		PENGHUBUNG	5,533,030,621	741,365,000	-4,791,665,621	
1	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5,533,030,621	741,365,000	-4,791,665,621	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18,349,240,381	6,610,923,701	-11,738,316,680	
		INSPEKTORAT DAERAH	18,349,240,381	6,610,923,701	-11,738,316,680	
1	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14,292,025,608	5,009,347,800	-9,282,677,808	
2	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4,057,214,773	1,601,575,901	-2,455,638,872	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4,821,997,346	9,967,321,850	5,145,324,504	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,821,997,346	9,967,321,850	5,145,324,504	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	297,530,421	400,000,000	102,469,579	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3,594,185,004	3,242,430,050	-351,754,954	
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	189,889,092	140,234,700	-49,654,392	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	148,975,767	401,291,700	252,315,933	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	591,417,062	5,783,365,400	5,191,948,338	
TOTAL NON URUSAN				2,087,200,979,176	-486,223,184,600	
TOTAL URUSAN			4,925,769,514,306	3,505,989,685,707	-1,419,779,828,599	
TOTAL URUSAN + NON URUSAN			7,499,193,678,082	5,593,190,664,883	-1,906,003,013,199	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2023.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel 7.1. dan 7.2 berikut dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap target RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN	KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	3,47 – 4,97*	3,47 – 4,97*
Inflasi (%)	0,67	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	19,75 – 16,66*	19,75 – 16,66*
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,03*	3,03*
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,345*	0,345*
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)			
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan			

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN	KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2023	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	41,7	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	135	135
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Angka Melek Huruf (%)	95,76	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	83	83

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII *beserta penyesuaian target 2023

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	- Pertumbuhan PDRB	%	5,20	3,37 -4,97*	3,37 -4,97*
	- Inflasi	%	0,67	3 – 3,2	3 – 3,2
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	19,5	25 - 27	25 – 27
	- Indeks Gini	Poin	0,355	0,345*	0,345*
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1,12	0,85	0,85
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	4,13	3,40	3,40
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,23	65,73*	65,73*
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	100	100
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,03*	3,03*
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,90	39,74	39,74
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	66,85	69	69
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,50	69,76	69,76
	Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	21,02	21,02
	- Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	65	71	71
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,75	0,78	0,78
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,20	2,45	2,45
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,08	12,23	12,23
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
	Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan Menengah				
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	100	100
2	Urusan Kesehatan				
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	118	0	0
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	913	0	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	1.050	0	0
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	100	100
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	70	90	90
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	73	100	100
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	60	100	100
	- Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	41,7	100	100
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	13.974,00	9.238	47.948
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	- Meningkatkan pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100
	- Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100	100	100
6	Urusan Sosial				
	- Meningkatkan Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	70	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
7	Urusan Tenaga Kerja				
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,03*	3,03*
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	21,02	21,02
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	10,16	30	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	60	100	100
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	60	100	100
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	10	72,2	72,2
9	Urusan Pangan				
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	65	71	71
10	Urusan Pertanahan				
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%			
11	Urusan Lingkungan Hidup				
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,5	75	75
12	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	- Posyandu Aktif	Unit	5.532	6.302	6.652
	- BUMDes Aktif	Unit	302	1.320	1.500

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/ Kel	4,40	22,75	22,75
14	Urusan Perhubungan				
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	3,90	74,81	74,81
	- Dweling Time Pelabuhan	Hari	5	3	3
15	Urusan Komunikasi dan Informatika				
	- Skor PeGi Pemeringkatan E-government	Skor	42,23	95 (Informatif)	95 (Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	42,23	95	95
	- Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,1	2,7	2,7
16	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	0,7	1,2	1,3
17	Urusan Penanaman Modal				
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	4,9	6,2	6,2
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	4	17	17
	- Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	40	80	80
19	Urusan Statistik				
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Ada
20	Urusan Kebudayaan				
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	11,11	100	100,0
21	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan				
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan	%	25,0	100,0	100,0

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
	per Tahun				
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	60	100	100
	Layanan Urusan Pilihan				
22	Urusan Pertanian				
	- Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	103	103
23	Urusan Pariwisata				
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.057.384	1.634.144	1.634.144
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,71	4	4
24	Urusan Kehutanan				
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,30	1,30
25	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	85	85
26	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	105	106,8	106,8
27	Urusan Perindustrian dan Perdagangan				
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	63,10	63,10
28	Urusan Transmigrasi				
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	0	90	100
	Penunjang Urusan				
29	Urusan Perencanaan Pembangunan				
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
30	Urusan Keuangan				
	- Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat	%	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
	waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan				
31	Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan				
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	50	100	100
32	Urusan Penelitian dan Pengembangan				
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	0	13.852	13.852
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0	4,008	4,008
33	Urusan Pengawasan				
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
34	Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat				
	- Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	100
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	103	103
2.	Rasio Ketergantungan	%	64,10	62,08	61,36
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	63,10	63,10

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII, *beserta penyesuaian target 2023

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.01 - BIDANG PENDIDIKAN					
1		Terpenuhinya kebetutuhan dasar SPM bidang Pendidikan					
		Rata-rata kompentensi literasi SMA berdasarkan asesment nasional	Nilai	2			
		Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	73	76	78
		Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasrkan assesment nasional	Nilai	2			
		Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidkan menengah	%	100			
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasrkan asesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasrkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Tingkat penerapan lulusan SMK	%	56			
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	80			
2		Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing					



No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya	Orang	1,546,370	200	3,600	4,200
3		Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang di tempatkan					
		persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	72	50	50	80
		Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri	Orang	45,000	600	500	1,000
		Jumlah tenaga kerja yang di tempoatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	227,500	50	150	200
4		Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-haknya					
		Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	7,056,010	2,130	3,600	4,200
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	7,056,010	2,000	3,600	4,200
		1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
5		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan					
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Ratio TT:1000 penduduk	1	0,84:1000	0,84:1000	0,84:1000
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	-	90	90	90
		Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	-	76	85	100
		Presentase rumah sakit yang terakreditasi	%	95	-	-	-
6		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100
7		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					
		Jumlah Kab/Kota > 40% FKTP yang menyelenggarakan UBM	Kabupaten/ Kota	275	-	-	-
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (persen)	%	16	20	16	12

No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	47.85	59	100
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	385	5	6	22
				Jumlah Penurunan Kematian Ibu	Kematian Ibu	3,274	-	-	-
				Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	93	95	97	100
				Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	90	52	54	55
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	96	100	100
				Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95	59	77	85
				Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	Kabupaten/ Kota	474	41	45	45
				Jumlah Kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	%	60	22	22	22
				Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	%	7	8	8	8
				Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial	%	83	79	79	79
				Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	Kabupaten/ Kota	380	5	5	5
				Jumlah Kab/Kota Mencapai Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	Kabupaten/ Kota	-	11	17	22
				Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kabupaten/ Kota	-	-	45	45
				Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)	%	-	95	97	100
				Persentase Kabupaten/ Kota yang Memiliki Kinerja Baik dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	%	90	-	-	-
				Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki Griya Sehat	Kabupaten/ Kota	42	-	-	-
				Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	-	-	-	-
8				Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					
				Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	83	27	41	41



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, toko obat dan usaha mikro obat tradisional) sesuai standar	%	79	-	-	-
				Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	%	100	100	100	100
		1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
9			Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman						
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	98	83	85	90
				Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	1	9	7	-
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	92	-	41	-
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	14	11	7	-
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	28	14	-	-
				Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	92	33	100	-
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	86	77	80	90
10			Terwujudnya konektivitas jalan						
				Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	73	89	89	100
11			Terlaksanannya Pengelolaan SDA Terpadu						
				Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	30,447	-	-	1,200
				Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	110,672	36,876	35,638	41,781
				Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	3	1	1	1
12			Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang						
				Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	43	5	3	-
				Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	189	5	5	-
				Penetapan RTRW	Perda/ Perkada	43	-	-	-
				Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	132	-	-	-



No		Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
13			Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
			Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Alih Fungsi Lahan Sawah	Daerah	12	-	-	-
			Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS	Daerah Aliran Sungai (DAS)	6	-	-	-
			Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	15	-	-	-
			Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Daerah	6	-	-	-
		1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
14			Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat					
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	-	100	-
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	36	100	100
15			Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani					
			Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1,459	200	500	1,000
			Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	1,000	-	-	-
			Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	8	4	8	12
16			Meningkatnya jumlah rumah layak huni					
			Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan PBG dan SLF	Kabupaten/ Kota	Seluruh	-	-	-
			Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10,000	-	-	-



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Unit	291,400	1,000	-	-
				Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah	Unit	241,415	35	-	-
				Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	208,765	-	1,500	1,500
17				Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman					
				Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	62,500	70	-	100
				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	-	-	-
18				Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan Penyediaan Perumahan					
				Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rumah Tangga	220,000	-	-	-
				Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	135,000	556	-	-
19				Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau					
				Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	68	20	40	70
				1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
20				Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standars					
				Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	100	100	100
				Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
				Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	-	-	-	20
				Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	100	100	100	80

No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	100	100	100
				Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	100	100	100	50
				Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	%	100	100	100	10 (Perda/ Perkada)
				Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	%	100	100	100	100
				Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	%	-	-	-	1 (dokumen)
				Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	%	100	100	100	5 (orang)
				Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Orang	-	-	-	5
21				Meningkatnya manajemen kebencanaan yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana					
				Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	14	17	20	20
				Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100

No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	-	-	-	20
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	%	-	-	-	100
				Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	-	-	-	20
22			Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standard						
				Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
				Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	-	-	-	50
				Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	-	50
				Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	-	-	-	50
		1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
23			Tersedianya Data Fakir Miskin						
				Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100	100	100
				Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3,000		75	75
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	7,230	309	337	337
				Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	100	100	100	
24			Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial						
				Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang	Badan Usaha	200	22	22	



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Mendapatkan Penguatan					
				Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	KPM	15,000	6,500	6,500	
				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	KPM	10,000,000	351,894	401,894	
				Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	39,351	1,701	1,701	
				Jumlah Lembaga di Didang Kesos yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Lembaga	850		30	30
				Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Orang	38,000	78	78	78
				Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	34		10	10
				Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	34			
				Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Provinsi	34			
25				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial					
				Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Jiwa	204,330	1,000	1,000	
				Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana Yang mendapatkan Pencegahan Terorisme	Kelompok Masyarakat	250			
				Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	375	20	20	
				Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	50,000	200	200	



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang siap Ditugaskan	Orang	1,000	72	100	
				Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
				Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
				Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosia	%	100			
				Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/ atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	60	60	60
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		1			
				Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti		136			
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	50			
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2,720			
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan	Orang	1,360			



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				pelayanan reunifikasi keluarga					
				Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3,400	270	270	270
				Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		136			
				Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1,700			
				Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	680			
				Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340			
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3,400	140	140	140
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136			
				Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		68			
				Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2			
				Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	50			

No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	3,400			
				Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	25			
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10			
				Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	2			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti		1			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100			
				Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	340			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	25			
				Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	%	100	100	100	

No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				dalam panti					
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100			
26				Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
				Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		133,000			
				Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan		133,000			
				Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan		1,000			
				Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		1,000			
				Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		10,230			
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	
				Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		514			
				2.08 - URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
27				Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan					
				Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	-	-	-
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	90	75	80	100
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	Meningkat minimal 0,1 point	95.72	96.72	97.72

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
				dari kondisi 2021			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Meningkat minimal 2 point dari kondisi 2021	70.76	72.76	74.76
28		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak					
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	Provinsi menyesuaik a n dengan hasil proyeksi tahun 2023; Kab/Kota meningkat minimal 2 Point dari kondisi 2021	-	-	55.00
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	75	5.6	55.2	60
		2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
29		Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri					
		Skor pola pangan harapan	Nilai	94	67	69	71
		Jumlah cadangan pangan Pemerintahan Daerah	Ton	29930	10.20	685	719.25
		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	50	25.07	0.00
30		Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional					
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	48.84	74.42	100
		2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
31		Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah					
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	355,157	100	1,000	1,000
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	144,200	100	1,000	1,000
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
32		Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup					
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	69.48	75.13	75.42	75.66
33		Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH diterbitkan					



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	1800 Lembaga (target pusat) 20-30% ketaatan penanggung jawab usaha dari 75% usaha yang dilakukan pengawasa n	56.52	78.26	92
				Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	1800 Lembaga (target pusat) 75% penanggun g jawab usaha usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	14.81	17.28	19.75
		2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
34			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk						
				Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	98	85	97	100
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	100	100	100	100
				Pemanfaatan data kependudukan	%	80	40	80	80



No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
35		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien					
		Persentase aparaturnya/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	13,494	40	54	-
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	7,500	90	90	-
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	7,500	90	90	
36		Berkembangnya status pembangunan desa					
		Jumlah Desa Mandiri.	Desa	5,444	1	1	3
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	58,291	1,249	1,449	1,449
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	11,652	1,546	1,403	1,350
37		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)					
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Desa	9,000	60	63	
		Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	Bumdes Bersama	270	5	9	15
		2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
38		Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga					
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	59			
39		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana					
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per1000 WUS 15-19 tahun	20			
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2.19			
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	62,92			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.7			
		2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
40		Terwujudnya Konektivitas Nasional					
		Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	1	1	1	1
41		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan					
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	80	77	79	82
		Indeks Kepuasan	Nilai	88	82	85	88



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi					
42				Meningkatnya Keselamatan Transportasi					
				Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	26	6	5	5
				2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
43				Tersedianya Infrastruktur Digital					
				Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	80	51	56	60
44				Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital					
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	65	36	35	40
				Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	38	50	100
45				Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital					
				Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	50	50	60
				Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	117	100	100
46				Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah					
				Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	30	50	65



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	65	70	75
				Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
				Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	80	50	55	60
				Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	80	4	5	5
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
47				Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern					
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18	10	14	18
48				Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global					
				Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	2	4	6
				Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	70	43	65	70
				Pertumbuhan Wirausaha	%	3.5	4	6	6
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
49				Tercapainya Realisasi Penanaman Modal					
				Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.128 - 1.200 triliun	4,506,657 ,305 ,503.38	4,731,990 ,17 0,778.55	6,324,085, 076 ,096.00
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
50				Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional					
				Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas					
				Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir					
51				Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila					
				Indeks Pembangunan					



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				Pemuda					
				Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi					
				Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Provinsi					
				Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Provinsi					
52				Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa					
				Jumah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda					
				2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
53				Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah					
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
54				Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	100	100	100
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	50	100	100
				2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
55				Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah					
				Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	100	4	6	8
				Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	3	2	2	2
				Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Orang	100	25	50	100



No		Urusan/ Kinerja Urusan		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2		3	4	5	6	7	8
				(SPBE) dan CSIRT					
				Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	69	50	100	100
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
56				Kelestarian Cagar Budaya					
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	36.00	-	-	-
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12.00	-	-	10
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.99	-	-	10
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22.82	1	3	5
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	59	-	-	10
57				Pemajuan Kebudayaan					
				Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0.46	-	-	10
				Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.50	-	-	10
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
58				Peningkatan kegemaran membaca masyarakat					
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67	56	64	66
59				Pembangunan literasi masyarakat meningkat					
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	index	14	10	13	14
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
60				Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal					
				Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	8,051	850	2,000	3,900
				Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	411,095	500	2,000	2,500



No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	-	Orang	3,720	4,000	4,500
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	-	Arsip	850	6,000	6,500
61		Penerapan e-Arsip terintegrasi					
		Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	165	Provinsi/ Ka b/Kota	-	11	23
62		Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)					
		Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	32	Provinsi/ Ka b/Kota	6	12	15
63		Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti					
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	123	Rekomenda si	-	-	22
		3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
64		Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut					
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	15,800,000	150,069	75,098	199,688
		Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Provinsi	34	1	1	1
65		Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing					
		Produksi garam	Ton	1,700,000	-	-	-
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8,735,580	175,000	185,000	195,000
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21,580,000	1,945,000	2,145,000	2,570,000
		Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	61,02	46	50	54
66		Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative					
		Operasi kapal/speedboat pengawas	Hari	100	15	15	20
		POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1,150	70	85	100
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2,870	10	50	70
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1	1	1
		3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
67		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nasional					
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.	1,279,000,000,000	856,000,000,000	90,000,000,000	-
		Kontribusi PDB Pariwisata	%	4.4	10	15	-
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000 - 315.000.000	900,000	1,500,000	-
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
68		Meningkatnya produktivitas pertanian					
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	2.78	1.3	15	15
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	1.85	1.5	5	5
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapaqa, kakao, karet, lada)	%	2.05	1.05	1.75	2
		Jumlah produksi daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4647800			135459
		Jumlah produksi susu	Ton	986370			45
		Jumlah produksi telur	Ton	5831500			15000
69		Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan					
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	71.87	70	75	75
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	50.2	40	40-50	40-50
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	81	81.81	86.36	90.9
		3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
70		Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat					
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Ha	1172000	4169	5000	5313
71		Meningkatnya luas hutan dan lawan yan direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air					
		Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	200000	1476	2800	984

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
72		Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik					
		Rasio elektrifikasi	%	100	90	92	95
73		Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan					
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	18	12	15	18
74		Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik					
		Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99	98	99
		3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
75		Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi					
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	5.96 - 7.86	(30)	(10)	(5)
76		Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen					
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	62	64	64
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	80	82	85
77		Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah					
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	50 - 75	-	50	50
78		Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif					
		Tertib Usaha	%	75 - 90	80	80	-
79		Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat					
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	90	90	-
80		Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat					
		Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	5.9	10	10	10
81		Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan					
		Inflasi Pangan Bergejolak	%	3-5	-	-	-
82		Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang					
		Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	%	10-50	-	-	-
		3.31- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
83		Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas					
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	7.70	2	2	2
84		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB					
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.40	1.38	1.5	1.5



No		Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1		2	3	4	5	6	7	8
85			Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas					
			Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	160.64	2	2.2	15,915,940
86			Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas					
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.34 Juta	1,250	1,300	1,300
87			Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas					
			Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	544.59 Triliun	6.7	6.8	6.9
			3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
88			Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi					
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	55.31	3	44.08	46.14
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	44.08	3	33.94	35.47



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan paling bawah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Selanjutnya RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah. Secara spesifik RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sesuai RKPD 2023 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2023 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus memperhatikan kemanfaatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a)

- target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
 3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;
 4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
 5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2023 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT